

DAFTAR ARSIP STATIS

SEKRETARIAT NEGARA RI: SERI PRODUK HUKUM TAHUN 1949 – 2005

(UNDANG –UNDANG, UNDANG-UNDANG DARURAT, PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG)



**DIREKTORAT PENGOLAHAN
DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, 2016**

KATA PENGANTAR

Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Pengelolaan arsip oleh ANRI bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Arsip statis yang dikelola ANRI merupakan memori kolektif, identitas bangsa, bahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta sumber informasi publik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pengelolaan arsip statis, maka khazanah arsip statis yang tersimpan di ANRI harus diolah dengan benar berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan sehingga arsip statis dapat ditemukan dengan cepat, tepat dan lengkap.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sub Direktorat Pengolahan Arsip I, Direktorat Pengolahan ANRI pada Tahun Anggaran 2015 melaksanakan penyusunan Daftar Arsip Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum Tahun 1949 - 2005. Kami menyadari daftar arsip ini belum sempurna, namun setidaknya dapat digunakan sebagai sarana bantu penemuan kembali arsip statis (*finding aid*) Sekretariat Negara RI: seri produk hukum tahun 1949 – 2005 yang tersimpan di ANRI dalam rangka pelayanan publik.

Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan ANRI, anggota tim dan semua pihak yang telah membantu penyusunan inventaris arsip ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa membalas amal baik yang telah Bapak/ Ibu/ Sdr/i berikan. Amin.

Jakarta, Februari 2016

Direktur Pengolahan

Drs. Azmi, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah Arsip	iii
B. Pengolahan Arsip	iv
C. Petunjuk Penggunaan Daftar Arsip	iv
URAIAN DESKRIPSI ARSIP	
A. Undang-Undang	1
B. Undang-Undang Darurat	132
C. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang	148
D. Peraturan Pemerintah.....	164
E. Penetapan Presiden	588
F. Peraturan Presiden	596
G. Keputusan Presiden	610
1. Penyelenggaraan Pemerintahan	610
2. Penyelenggara Pemerintahan	1574
H. Instruksi Presiden	1651
INDEKS	1652
DAFTAR SINGKATAN	1872

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Arsip

Sekretariat Negara RI (Setneg RI) adalah sebuah Lembaga Pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta dipimpin oleh Sekretaris Negara. Tugas dan fungsi Sekretariat Negara adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintah di bidang kesekretariatan Negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Arsip Sekretariat Negara RI yang diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berdasarkan berita acara penyerahan sebagai berikut:

1. Berita Acara Serah Terima Arsip pada tanggal 20 Desember 1998 dari Ir. Akbar Tandjung (Menteri Sekretaris Negara RI) kepada Dr. Mukhlis Paeni (Kepala ANRI). Arsip yang diserahkan berupa naskah asli peraturan perundang – undangan dari tahun 1948 sampai dengan 1960;
2. Berita Acara Serah Terima Arsip pada tanggal 21 Desember 2009 dari Lambock V Nahattands (Wakil Sekretaris Kabinet RI) kepada Djoko Utomo (Kepala ANRI). Arsip yang diserahkan naskah asli dan berkas Undang – Undang, Peraturan pemerintah, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden dari tahun 1986 – 1995.
3. Berita Serah Terima Arsip pada tanggal 8 Desember 2010 dari Agus Sumartono, S.H.,M.H. (Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Administrasi) kepada Dr. Tulkah Mansyur, M.Si (Plt. Deputi Bidang Konservasi Arsip – ANRI). Arsip yang diserahkan naskah asli Peraturan Perundang – undangan berupa naskah asli dan berkas Undang – Undang, Peraturan pemerintah Pengganti Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden dari tahun 1996 – 2000.

Informasi yang terkandung dalam arsip Sekretariat Negara RI : seri produk hukum tahun 1949 – 2005 secara keseluruhan terdiri atas peraturan perundang-undangan berupa naskah asli dan berkas Undang-Undang, Undang-Undang Darurat, Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Penetapan Presiden, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden (Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan) dan Instruksi Presiden.

B. Pengolahan Arsip

Pengolahan arsip Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum Tahun 1949 – 2005 bertujuan untuk menghasilkan sarana bantu penemuan kembali arsip statis (*finding aids*) berupa daftar arsip statis. Pengolahan arsip Sekretariat Negara RI: seri produk hukum tahun 1949 - 2005 dilakukan oleh tim kerja di lingkungan Subdit Pengolahan Arsip I, Direktorat Pengolahan berdasarkan Surat Perintah No. KN.03/31/2015 tentang Tim Penyusunan Daftar Arsip Sekretariat Kabinet RI: Seri Produk Hukum Tahun 2000 – 2010 yang terdiri dari: Drs. Azmi, M.si sebagai Penanggung Jawab Kegiatan, Dra. Retno Wulandari, M.Hum selaku Penanggung Jawab Pelaksana Teknis, Titik Kurniawati, Wiyaningsih, Dedi Febri Martono, Risma Anggiyani, Bakat Untoro, Yustizia, F.X. Ariyanto Adibowo, Supriyono, Sukmawati Mochtar, Sari Diana, Yudhi Risti Purnomo, Dwi Hening Cipto, selaku Anggota.

Pengolahan Daftar Arsip Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum Tahun 1949 – 2005 dilaksanakan selama dua belas bulan, mulai Januari s.d. Desember 2015. Prosedur pengolahan arsip mengacu kepada Peraturan Kepala ANRI Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis dan kaidah-kaidah pengolahan arsip statis. Tahapan kegiatannya meliputi identifikasi arsip, penyusunan rencana teknis, penelusuran sumber referensi, pembuatan skema pengaturan arsip sementara, rekonstruksi arsip, deskripsi arsip, penyusunan skema pengaturan arsip definitif, manuver data dan fisik arsip, penomoran definitif, pemberian label arsip, penataan arsip dalam boks, penulisan daftar arsip, ekspose, penilaian dan uji petik, penyempurnaan, pengesahan daftar arsip.

Pengaturan arsip Sekretariat Negara RI disusun berdasarkan tugas dan fungsi organisasi Sekretariat Negara RI dengan skema pengaturan arsip meliputi: Undang-Undang, Undang-Undang darurat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Penetapan Presiden, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden.

C. Petunjuk Penggunaan Daftar Arsip

Pengolahan Daftar Arsip Statis Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum Tahun 1949 – 2005 dilakukan berdasarkan prinsip asal usul (*provenance*) dan aturan asli (*Original Order*), Daftar arsip statis ini memuat (12896) nomor yang tersimpan dalam 924 boks. Daftar Arsip Statis Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum Tahun 1949 – 2000 berjumlah 7 jilid disertai indeks dengan rincian sebagai berikut:

1. Jilid I (nomor 1 – 1355) Undang –Undang, Undang-Undang Darurat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. Jilid II (nomor 1356 – 4565) Peraturan Pemerintah, Penetapan Presiden, Peraturan Presiden;
3. Jilid III (nomor 4566 – 7166) Keputusan Presiden – Penyelenggaraan Pemerintahan;

4. Jilid IV(nomor 7167 – 9139) Keputusan Presiden – Penyelenggaraan Pemerintahan;
5. Jilid V (nomor 9140 – 11440) Keputusan Presiden – Penyelenggaraan Pemerintahan;
6. Jilid VI (nomor 11441 – 12896) Keputusan Presiden – Penyelenggara Pemerintahan, Instruksi Presiden;
7. Jilid VII Indeks dan Daftar Singkatan.

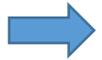
Untuk mempermudah akses bagi pengguna arsip, daftar arsip ini juga dilengkapi dengan indeks nama, nama organisasi, masalah, tempat dan daftar singkatan. Indeks ini digunakan untuk mencari nama orang/nama tokoh, tempat, dan masalah, dimana indeks tersebut mengacu pada nomor arsip yang tertera pada daftar arsip ini.

Untuk melakukan peminjaman arsip, pengguna dapat menyebutkan langsung **Nomor** dan **Tahun** produk hukum yang diperlukan dengan menyebutkan nomor yang tertuang pada daftar arsip statis . Contoh (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers pengguna dapat menyebut nomor yang tertuang pada daftar arsip ini yaitu nomor **450**. (2) Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1976 tentang Tata Cara Penelitian dan Penilaian terhadap Warganegara Republik Indonesia yang terlibat dalam G.30.S/PKI Golongan C yang dapat dipertimbangkan Penggunaan Hak Memilihnya, serta Pengesahannya dalam Pemiluhan Umum Tahun 1977, pengguna dapat menyebutkan nomor yang tertuang pada daftar arsip ini yaitu **9471**. Apabila pengguna akan meminjam naskah asli (**naskah undang-undang**) maka pengguna dapat menuju nomor arsip pada daftar arsip ini nomor **9471 A**. Apabila pengguna akan meminjam arsip kedua – duanya (**naskah undang-undang** dan **berkas penyusunan**) maka pengguna dapat menuju nomor arsip pada daftar arsip ini yaitu nomor **9471 A** dan **9471 B**.

Tabel Alur Penemuan Kembali Arsip

DAFTAR ARSIP STATIS

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
450	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.	12 Oktober 2005	asli	8 lembar
947	Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1976 tentang Tata Cara Penelitian dan Penilaian terhadap Warganegara Republik Indonesia yang terlibat dalam G.30.S/PKI Golongan C yang dapat dipertimbangkan Penggunaan Hak Memilihnya, serta Pengesahannya dalam Pemiluhan Umum Tahun 1977			
9471 A	Naskah Keputusan Presiden	6 April 1976	asli	1 sampul
9471 B	Berkas Penyusunan	20 Januari – 3 April 1976	tembusan, copy	1 sampul



DAFTAR ARSIP STATIS

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
A. UNDANG - UNDANG				
TAHUN 1950				
1	Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.	06 Mei 1950	asli	1 sampul
2	Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 2 Tahun 1950 tentang Penerbitan Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita-Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan mulai berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah.	15 Mei 1950	asli	4 lembar
3	Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi.	1 Juli 1950	asli	4 lembar
4	Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 4 Tahun 1950 tentang Penggantian Kerugian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat.	20 Juli 1950	asli	4 lembar
5	Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan sebagai Undang-Undang Federal.	20 Juli 1950	asli	9 lembar
6	Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara (Undang - Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950) sebagai Undang-Undang Federal.	20 Juli 1950	asli	3 lembar
7	Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Tentang Perubahan Konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.	15 Agustus 1950	asli	1 sampul
8	Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 8 Tahun 1950 tentang Pinjaman Republik Indonesia pada Export - Import <i>Bank of Washington</i> .	04 November 1950	asli	2 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
TAHUN 1951				
9	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia.	6 Januari 1951	asli	6 lembar
10	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia.	6 Januari 1951	asli	1 sampul
11	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia.	6 Januari 1951	asli	3 lembar
12	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1951 tentang Memberi Persetujuan kepada Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Kerajaan Nederland dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat.	31 Januari 1951	asli	7 lembar
13	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1951 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Pengesahan dan Pengakuan Hutang terhadap Kerajaan Belanda sebagai Undang-Undang.	31 Januari 1951	asli	2 lembar
14	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1951 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	30 Juni 1951	asli	5 lembar
15	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan (Wegverkeers Ordonnantie, Staatsblad 1933 Nomor 86).	30 Juni 1951	asli	10 lembar
16	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951 tentang Penangguhan Pemberian Surat Izin Kepada Dokter dan Dokter Gigi.	30 Juni 1951	asli	2 lembar
17	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1951 tentang Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi dan Bidan secara rasionil.	30 Juni 1951	asli	2 lembar
18	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1951 tentang Mengatur Tenaga Dokter Partikelir dalam keadaan genting.	30 Juni 1951	asli	3 lembar
19	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1951 tentang Pengesahan Perjanjian Pinjaman Pertama Republik Indonesia dengan Export Import Bank of Washington.	10 Juli 1951	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
20	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penghapusan Badan Hukum " Algemeene Volkscredietbank".	29 Agustus 1951	asli	2 lembar
21	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1951 tentang Menetapkan " Undang-Undang Darurat tentang Menaikkan jumlah maksimum Porto dan Bea" sebagai Undang-Undang.	01 September 1951	asli	2 lembar
22	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1951 tentang Penggantian Pajak Bumi dengan Pajak Peralihan 1944.	29 Agustus 1951	asli	2 lembar
23	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1951 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932" (Undang-Undang Darurat Nomor 37 Tahun 1950 seperti ditambah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang.	16 September 1951	asli	8 lembar
24	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1950 tentang Penurunan Cukai Tembakau sebagai Undang-Undang.	17 September 1951	asli	2 lembar
25	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951 tentang Menetapkan " Undang-Undang Darurat tentang Pengeluaran Uang Kertas atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat" sebagai Undang-Undang.	12 Oktober 1951	asli	2 lembar
26	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu kabupaten dengan nama Kulon Progo.	12 Oktober 1951	asli	2 lembar
27	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1951 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penggabungan Pulau Weh kedalam daerah Pabean Indonesia" sebagai Undang-Undang.	12 Oktober 1951	asli	2 lembar
28	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1951 tentang Pembebasan Cukai guna Pegawai-pegawai Diplomatik atau Konsuler dari Negeri-negeri Asing yang menjalankan tugasnya dinegeri ini.	30 Oktober 1951	asli	1 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
29	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1951 tentang Penghapusan " <i>Centrale Verkooporganisatie van Ondernemingslandbouwproducten (C.V.O)</i> ".	30 Oktober 1951	asli	3 lembar
30	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1951 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat tentang Penetapan Kejahatan-kejahatan dan Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam masa pekerjaan oleh para pejabat yang menurut pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam tingkat pertama dan tertinggi diadili oleh Mahkamah Agung Indonesia" sebagai Undang-Undang.	28 November 1951	asli	2 lembar
31	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1951 tentang Penyerahan Urusan Penilikan Film kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.	28 November 1951	asli	3 lembar
32	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi <i>De Javasche Bank N.V.</i>	6 Desember 1951	asli	1 sampul
TAHUN 1952				
33	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang perubahan " <i>Rechtennordonnatie</i> " (Staatsblad 1882 Nomor 240 jo. Staatsblad 1931 Nomor 471) sebagai Undang-Undang	5 Februari 1952	asli	8 lembar
34	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1952 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang pinjaman darurat" sebagai Undang-Undang	11 Maret 1952	asli	5 lembar
35	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1952 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang memperpanjang waktu masih terbukanya dinas tahun anggaran 1950" sebagai Undang-Undang	14 Mei 1952	asli	2 lembar
36	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang, Undang-Undang Darurat dan Ordonansi-ordonansi mengenai Masalah-masalah Pajak, dikeluarkan sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Darurat Nomor 36 Tahun 1950) sebagai Undang-Undang.	29 Juli 1952	asli	3 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
37	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1952 tentang Pembebasan Bea-Masuk untuk Barang-barang berupa Kiriman-kiriman Hadiah yang bertujuan Kesejahteraan Rohani Penduduk, Maksud Amal, atau Kebudayaan.	29 Juli 1952	asli	2 lembar
38	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1952 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1951 untuk mengubah "Grondhuurordonnantie" (Staatsblad1918 Nomor 88) dan "Vorstenlandsch Grond-Huurreglement" (Staatsblad 1918 Nomor 20)" sebagai Undang-Undang.	23 Juli 1952	asli	2 lembar
39	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1952 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Verponding atas Tahun 1951 sebagai Undang-Undang.	02 Agustus 1952	asli	5 lembar
40	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1952 tentang Pemungutan Pajak Verponding untuk Tahun 1952.	02 Agustus 1952	asli	2 lembar
41	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1952 tentang Mengadakan Perubahan Atas Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1952.	02 Agustus 1952	asli	2 lembar
42	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Tambahan Pokok Bea (<i>Opsenten</i>) atas Bea-bea Masuk selama Tahun 1951 (Undang-Undang Darurat Nomor 39 Tahun 1950) sebagai Undang-Undang.	11 Agustus 1952	asli	2 lembar
43	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Tambahan Pokok Bea (<i>Opsenten</i>) atas Bea-bea Masuk selama Tahun 1952 (Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1952) sebagai Undang-Undang.	11 Agustus 1952	asli	2 lembar
44	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1952 tentang Pembaharuan Bea-Bea Spesifik dan Penggantiannya dengan Bea-Bea AD Valorem.	11 Agustus 1952	asli	1 sampul
45	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1952 tentang Perubahan berselang dari jumlah Opsenten atas beberapa pos dari Tarif Bea-Bea Masuk.	11 Agustus 1952	asli	2 lembar
46	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1952 tentang Penunjukan Jawatan Regi Garam sebagai Perusahaan I.B.W dengan nama baru Perusahaan Garam dan Soda Negeri.	26 September 1952	asli	3 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
47	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat tentang Bursa" sebagai Undang-Undang.	26 September 1952	asli	4 lembar
48	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antar Negara Republik Indonesia dan Negara India.	2 Oktober 1952	asli	5 lembar
49	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antar Negara Republik Indonesia dan Negara Pakistan.	2 Oktober 1952	asli	5 lembar
50	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antar Negara Republik Indonesia dan Negara Uni Birma.	2 Oktober 1952	asli	5 lembar
51	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antar Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Philipina.	2 Oktober 1952	asli	6 lembar
52	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1952 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil.	7 Oktober 1952	asli	6 lembar
53	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat" (Undang-Undang Darurat Nomor 25 dan Nomor 34 Tahun 1950) sebagai Undang-Undang Republik Indonesia.	24 Oktober 1952	asli	3 lembar
54	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952 tentang Peraturan Untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan dan Surat-surat Pemeriksaan Pengadilan.	23 Desember 1952	asli	3 lembar
55	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan Tahun 1950 sebagai Undang-Undang.	30 Desember 1952	asli	2 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
56	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan Tahun 1951 (Undang-Undang Darurat Nomor 35 Tahun 1950) sebagai Undang-Undang.	30 Desember 1952	asli	2 lembar
TAHUN 1953				
57	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Penimbunan Barang-barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang.	7 Januari 1953	asli	5 lembar
58	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1953 tentang Mengubah dan Menambah Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908.	7 Januari 1953	asli	1 sampul
59	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotek.	2 Februari 1953	asli	2 lembar
60	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1953 tentang Apotek Darurat.	2 Februari 1953	asli	4 lembar
61	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1953 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 tentang Kenaikan Tarif Pengenaan Pajak Perseroan untuk Tahun Dinas 1952 (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1952) sebagai Undang-Undang.	14 Februari 1953	asli	2 lembar
62	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1953 tentang Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir dikembalikan Menjadi Tanah Negeri.	11 Maret 1953	asli	5 lembar
63	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.	04 April 1953	asli	1 sampul
64	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penilaian Persediaan Uang Emas dan Bahan Uang Emas pada <i>De Javasche Bank</i> .	21 April 1953	asli	3 lembar
65	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang bersifat Pensiun kepada bekas Ketua dan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	4 Mei 1953	asli	4 lembar
66	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1953 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.	9 Mei 1953	asli	7 lembar
67	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Peraturan-Peraturan Pokok Bank Indonesia.	19 Mei 1953	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
68	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1953 tentang Penetapan Peraturan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang RIS (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1950) sebagai Undang-Undang.	20 Mei 1953	asli	5 lembar
69	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1953 tentang Penetapan Peraturan dalam Undang-Undang Darurat tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam Dinas Ketentaraan (Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952, Lembaran Negara Nomor 84 Tahun 1952) sebagai Undang-Undang.	20 Mei 1953	asli	2 lembar
70	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1953 tentang Perlakuan Terhadap Anggota Angkatan Perang yang diberhentikan dari Dinas Ketentaraan karena tidak Memperbarui Ikatan Dinas.	20 Mei 1953	asli	3 lembar
71	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1953 tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela.	20 Mei 1953	asli	2 lembar
72	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1953 tentang Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang.	20 Mei 1953	asli	6 lembar
73	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1953 tentang Akibat-Akibat Daripada Undang-Undang tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam Dinas Ketentaraan.	20 Mei 1953	asli	2 lembar
74	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1953 tentang Penunjukan Rumah-Sakit Rumah-Sakit Partikulir yang Merawat Orang-orang yang Miskin dan Orang-orang yang Kurang Mampu.	3 Juni 1953	asli	2 lembar
75	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1953 tentang Mengubah Bea Pemburuan yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat 2 " <i>Jachtordonnantie Java en Madura 1940</i> " (<i>Staatsblad 1939 Nomor 733</i>).	17 Juni 1953	asli	1 lembar
76	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1953 tentang Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington.	25 Juni 1953	asli	8 lembar
77	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1953 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Republik Suria.	18 Juni 1953	asli	8 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
78	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1953 tentang Perubahan Komisi Urusan Perburuhan.	25 November 1953	asli	3 lembar
79	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan.	25 November 1953	asli	4 lembar
80	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1951 untuk Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Pajak Peredaran 1950" (Lembaran-Negara Nomor 93 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang.	18 Desember 1953	asli	7 lembar
81	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 tentang Mengadakan Pajak Peredaran 1950" dan Undang-Undang Darurat Nomor 38 Tahun 1950 tentang Tambahan dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950" sebagai Undang-Undang.	18 Desember 1953	asli	1 sampul
82	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Larangan Untuk Mempergunakan dan Memasukkan Dalam Peredaran Uang Perak Lama, Yang Dikeluarkan Berdasarkan "Indische Muntwet 1912" (Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1952) sebagai Undang-Undang.	18 Desember 1953	asli	5 lembar
83	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Penghentian Berlakunya " Indische Muntwet 1912" dan Penetapan Peraturan Baru tentang Mata-Uang" (Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951) sebagai Undang-	18 Desember 1953	asli	8 lembar
84	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1951 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Opsenten atas Beberapa macam Cukai (Lembaran Negara Nomor 43 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang.	18 Desember 1953	asli	3 lembar
85	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951 tentang Pengenaan Tambahan Opsenten atas Bensin dan Sebagainya (Lembaran Negara Nomor 96 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang.	18 Desember 1953	asli	6 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
86	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1953 tentang Pengenaan Tambahan Opsenten atas Bensin dan Sebagainya (Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang.	18 Desember 1953	asli	3 lembar
87	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Postspaarbank (Staatsblad 1934 Nomor 653, 1937 Nomor 176 dan 197 dan 1941 Nomor 295) sebagai Undang-Undang.	18 Desember 1953	asli	2 lembar
88	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1953 untuk Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1951, tentang Perubahan, dan Penambahan Ordonansi Pajak Peralihan Tahun 1944 (Lembaran Negara Nomor 103 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang.	18 Desember 1953	asli	3 lembar
89	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1953 untuk Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952 untuk Pemungutan Pajak Verponding untuk Tahun-Tahun 1953 dan Berikutnya (Lembaran Negara Nomor 90 Tahun 1952) sebagai Undang-Undang.	18 Desember 1953	asli	3 lembar
90	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1953 untuk Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951 tentang Penilaian dari Bagian-bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang diperoleh Maupun yang berada dalam Uang Asing, untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan tentang Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944 (Lembaran Negara Nomor 87 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang.	18 Desember 1953	asli	4 lembar
91	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan" (Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang.	18 Desember 1953	asli	1 sampul
92	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos.	18 Desember 1953	asli	10 lembar
93	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1953 tentang Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.	29 Desember 1953	asli	2 lembar
TAHUN 1954				

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
94	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1954 untuk Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1952 tentang Perubahan dan Penambahan dari " <i>Ordonnantie Op De Vennootschapsbelasting 1925</i> " yang Memberikan Pula Aturan Kelengkapan Lebih Lanjut Mengenai Pemungutan Pajak Ini (Lembaran Negara Nomor 83 Tahun 1952) sebagai Undang-Undang.			
94 A	Naskah Undang-Undang	29 Desember 1953	asli	8 lembar
94 B	Berkas Penyusunan	2 Juni - 29 Desember 1953	asli	1 sampul
95	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1954 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.			
95 A	Naskah Undang-Undang	29 Desember 1953	asli	1 sampul
95 B	Berkas Penyusunan	16 -29 Desember 1953	asli	1 sampul
96	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1953 tentang Memungut Opsenten atas Bea-Masuk (Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang.			
96 A	Naskah Undang-Undang	29 Desember 1953	asli	3 lembar
96 B	Berkas Penyusunan	25 April - 29 Desember 1953	asli	1 sampul
97	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1951 tentang Perubahan <i>Reglement A</i> yang dilampirkan pada <i>Rechtenordonnantie</i> , Staatsblad 1931 Nomor 471 (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang.			
97 A	Naskah Undang-Undang	30 Desember 1953	asli	3 lembar
97 B	Berkas Penyusunan	4 Juni 1952 - 30 Desember 1953	asli	1 sampul
98	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1954 tentang Keanggotaan Republik Indonesia Dari Dana Moneter Internasional (<i>International Monetary Fund</i>) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (<i>International Bank For Reconstruction And Development</i>).			
98 A	Naskah Undang-Undang	13 Januari 1954	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
98 B	Berkas Penyusunan	2 Mei 1953 - 13 Januari 1954	asli	1 sampul
99	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat.			
99 A	Naskah Undang-Undang	9 Februari 1954	asli	1 sampul
99 B	Berkas Penyusunan	30 Januari - 9 Februari 1954	asli	1 sampul
100	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1954 tentang Pemindahan Kekuasaan Menteri Urusan Pegawai Kepada Perdana Menteri Berhubung dengan Penghapusan Jabatan Menteri Urusan Pegawai.			
100 A	Naskah Undang-Undang	9 Februari 1954	asli	2 lembar
100 B	Berkas Penyusunan	24 November 1953 - 9 Februari 1954	asli	1 sampul
101	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1950 tentang Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri sebagai Undang-Undang.	27 Februari 1954	asli	3 lembar
102	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1951 tentang Perubahan Beberapa Pos tarip Bea Masuk sebagai Undang-Undang.	27 Februari 1954	asli	6 lembar
103	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1952 tentang Mengadakan Bea Keluar Tambahan Sementara (Lembaran-Negara Nomor 8) sebagai Undang-Undang.	27 Februari 1954	asli	4 lembar
104	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1950 tentang Peraturan-Tambahan Perjalanan Keluar Negeri sebagai Undang-Undang.	27 Februari 1954	asli	3 lembar
105	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah untuk Seluruh Indonesia..	12 Maret 1954	asli	1 sampul
106	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan-Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa.	12 Maret 1954	asli	6 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
107	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1954 tentang Pencabutan Ordonansi "Uitvoerverbod Plantenmateriaal Negara Sumatra Timur 1949".	27 Februari 1954	asli	2 lembar
108	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1951 untuk memperpanjang waktu berlakunya Aturan-Hukuman termaksud dalam Pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia Tahun 1948 Nomor 141) sebagai Undang-Undang.	10 Mei 1954	asli	3 lembar
109	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1951 untuk memperpanjang waktu berlakunya Aturan-Hukuman termaksud dalam Pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia Tahun 1948 Nomor 141) sebagai Undang-Undang.	10 Mei 1954	asli	3 lembar
110	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1953 untuk memperpanjang waktu berlakunya Aturan-Hukuman termaksud dalam Pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia Tahun 1948 Nomor 141) sebagai Undang-Undang.	10 Mei 1954	asli	3 lembar
111	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1954 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1954 guna menetapkan waktu berlakunya Aturan-Hukuman yang termaksud dalam Pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia Tahun 1948 Nomor 141) untuk selanjutnya" (Lembaran Negara 1954 Nomor 12) sebagai Undang-Undang.	10 Mei 1954	asli	3 lembar
112	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1954 tentang Peraturan Penagihan Penghasilan Lebih yang terhutang Kepada Negara.	10 Mei 1954	asli	1 sampul
113	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1953 tentang memperpanjang waktu berlakunya Peraturan-peraturan Militer termaksud dalam Pasal 34 ayat 5 Staatsblad 1939 Nomor 582, Sebagaimana Telah diubah dan/atau ditambah kemudian sepanjang mengenai urusan Perumahan sebagai Undang-Undang.	15 April 1954	asli	3 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
114	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan.	28 Mei 1954	asli	1 sampul
115	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.	27 Juli 1954	asli	1 sampul
116	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1954 tentang Pencabutan " <i>Persbreidel-Ordonnantie</i> ".	12 Juli 1954	asli	2 lembar
117	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Pemindahan Hak Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap yang Lainnya yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah (Undang-Undang darurat Nomor 1 Tahun 1952) sebagai Undang-Undang.	13 Juli 1954	asli	3 lembar
118	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Perjanjian-perjanjian Pos Sedunia.	12 Juli 1954	asli	10 lembar
119	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1954 tentang Pembayaran Kembali <i>Pinjaman Nasional 1946</i> .	30 Juli 1954	asli	4 lembar
120	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1954 tentang Mempersatukan Opsenten yang berlaku dalam Tahun 1953 atas Cukai Dari Beberapa Jenis Barang Dalam Pokoknya, Kenaikan Jumlah Cukai Atas Alkohol Sulingan Dalam Negeri dan Bir dan Kenaikan Bea-Masuk Atas Bir (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1954) sebagai Undang-Undang.	30 Juli 1954	asli	8 lembar
121	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1954 tentang Biaya Legalisasi Tandatangan.	7 Agustus 1954	asli	2 lembar
122	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia.	03 September 1954	asli	1 sampul
123	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1954 tentang Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia.	14 September 1954	asli	10 lembar
124	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1954 tentang Pemungutan Tambahan Pembayaran Atas Pengiriman Uang Keluar Negeri sebagai Undang-Undang.	07 September 1954	asli	3 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
125	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk diseluruh daerah luar Jawa dan Madura.	26 Oktober 1954	asli	9 lembar
126	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.	13 November 1954	asli	7 lembar
127	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar "Akuntan" (Accountant).	13 November 1954	asli	5 lembar
128	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1954 tentang Pengesahan Persetujuan Tambahan Republik Indonesia dengan <i>Export-Import Bank of Washington</i> .	3 Desember 1954	asli	1 sampul
129	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1954 tentang Penetapan Tarif Pajak Perseroan.	10 Desember 1954	asli	6 lembar
130	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1954 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand.	15 Desember 1954	asli	7 lembar
131	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-Badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	7 lembar
132	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian II (Kementerian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	3 lembar
133	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	9 lembar
134	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian IV (Kementerian Keuangan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
135	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian IV A (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-Perhitungannya Mengenai Perusahaan-Perusahaan dan Jawatan-Jawatan (Pemerintah) yang Mempunyai Pengurus Sendiri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	1 sampul
136	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian V A (Kementerian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	1 sampul
137	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian V B (Kementerian Perekonomian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	1 sampul
138	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian VI (Kementerian Pertahanan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	10 lembar
139	Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian VII (Kementerian Kehakiman) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	6 lembar
140	Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian VIII A (Kementerian Perhubungan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	1 sampul
141	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian VIII B (Kementerian Perhubungan- Jawatan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	8 lembar
142	Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian IX (Kementerian Penerangan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	5 lembar
143	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian X (Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
144	Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian XI (Kementerian Kesehatan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	8 lembar
145	Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian XII (Kementerian Sosial) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	10 lembar
146	Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian XIII (Kementerian Perburuhan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	30 November 1954	asli	4 lembar
147	Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian XIV (Kementerian Agama) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	6 lembar
148	Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian XV (Kementerian Urusan Pegawai) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	3 lembar
149	Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian XVI (Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga)) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	1 sampul
150	Undang-Undang Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W I (Jawatan Pegadaian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	4 lembar
151	Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W II (Perusahaan Garam dan Soda Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	4 lembar
152	Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W III (Pusat Perkebunan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	5 lembar
153	Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W IV (Percetakan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	3 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
154	Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W V (Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	6 lembar
155	Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W VI (Perusahaan, Negeri Untuk Pembangkit Tenaga Listrik) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	3 lembar
156	Undang-Undang Nomor 63 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W VII (Pelabuhan Makasar) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	3 lembar
157	Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W VIII (Pelabuhan Teluk Bayur (Padang)) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	3 lembar
158	Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W IX (Pelabuhan Belawan)) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	3 lembar
159	Undang-Undang Nomor 66 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W X (Pelabuhan Semarang)) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	3 lembar
160	Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W XI (Pelabuhan Tanjung Priuk) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	3 lembar
161	Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W XII (Pelabuhan Surabaya) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	4 lembar
162	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	4 lembar
163	Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W XIV (Perusahaan Batu Bara Umbilin) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	3 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
164	Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W XV (Perusahaan Batu Bara Bukit Asam) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	5 lembar
165	Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W XVI (Jawatan Kereta Api) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	5 lembar
166	Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W XVII (Perusahaan Reproduksi Jawatan Topografi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	4 lembar
167	Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W XVIII (Penataran Angkatan Laut) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953.	29 November 1954	asli	4 lembar
168	Undang-Undang Nomor 75 Tahun 1954 tentang Acara Pidana Kusus Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.	30 December 1954	asli	5 lembar
169	Undang-Undang Nomor 76 Tahun 1954 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea" sebagai Undang-Undang.	30 December 1954	asli	5 lembar
TAHUN 1955				
170	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1955 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 2 tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayar Yang Sah Dari Uang Kertas Pemerintah Yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan" sebagai Undang-Undang.			
170 A	Naskah Undang-Undang	16 Februari 1955	asli	4 lembar
170 B	Berkas Penyusunan	21 Oktober 1954 - 22 Februari 1955	tembusan	1 sampul
171	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1955 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Bea-Statistik.			
171 A	Naskah Undang-Undang	5 Maret 1955	asli	2 lembar
171 B	Berkas Penyusunan	26 Juni 1954 - 5 Maret 1955	tembusan	1 sampul
172	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1955 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Bea-Keluar-Umum 1949.			
172 A	Naskah Undang-Undang	5 Maret 1955	asli	2 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
172 B	Berkas Penyusunan	26 Juni 1954 - 5 Maret 1955	tembusan	1 sampul
173	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1955 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Penjelasan Hutang Negara di Zaman Revolusi" sebagai Undang-Undang.			
173 A	Naskah Undang-Undang	29 Maret 1955	asli	5 lembar
173 B	Berkas Penyusunan	13 Oktober 1952 - 29 Maret 1955	tembusan	1 sampul
174	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1955 tentang Mengubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953, tentang Pemberian Tunjangan yang bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 36)			
174 A	Naskah Undang-Undang	14 Maret 1955	asli	2 lembar
174 B	Berkas Penyusunan	26 Juli 1954 - 14 Maret 1955	tembusan	1 sampul
175	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1955 tentang Biaya Surat Kenal Lahir dan Surat Kenal Mati.			
175 A	Naskah Undang-Undang	4 Mei 1955	asli	2 lembar
175 B	Berkas Penyusunan	12 November 1954 - 16 Mei 1955	tembusan	1 sampul
176	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 33 Tahun 1950 untuk Mencabut kembali Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 6 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota sebagai Undang-Undang.			
176 A	Naskah Undang-Undang	29 Maret 1955	asli	4 lembar
176 B	Berkas Penyusunan	26 Juli 1954 - 8 Juni 1955	tembusan	1 sampul
177	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1951 tentang Pencabutan Peraturan Gaji Militer 1950, seperti yang termuat dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 5 Tahun 1950 dan diubah dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 27 Tahun 1950, sebagai Undang-Undang.			
177 A	Naskah Undang-Undang	24 April 1955	asli	1 sampul
177 B	Berkas Penyusunan	18 Agustus 1954 - 18 Juni 1955	tembusan	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
178	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.			
178 A	Naskah Undang-Undang	30 Juni 1955	asli	3 lembar
178 B	Berkas Penyusunan	16 Maret - 2 Juli 1955	tembusan	1 sampul
179	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1955 tentang Perubahan Nama Universiteit, Universitet dan Universitit, Faculiteit, Fakultet, dan Fakultit menjadi Universitas dan Fakultas.			
179 A	Naskah Undang-Undang	11 Juli 1955	asli	3 lembar
179 B	Berkas Penyusunan	29 Januari - 16 Juli 1955	tembusan	1 sampul
180	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1955 tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang Muka pada Bank Indonesia lebih daripada batas yang ditetapkan dalam Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953).			
180 A	Naskah Undang-Undang	16 Juli 1955	asli	4 lembar
180 B	Berkas Penyusunan	25 Februari - 1 Agustus 1955	tembusan	1 sampul
181	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1954 tentang Mengubah "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 Nomor 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 Nomor 419) sebagai Undang-Undang.			
181 A	Naskah Undang-Undang	8 Agustus 1955	asli	1 sampul
181 B	Berkas Penyusunan	28 Agustus 1954 - 22 Agustus 1955	tembusan	1 sampul
TAHUN 1956				
182	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia.	8 Maret 1956	asli	10 lembar
183	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950.	19 Maret 1956	asli	4 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
184	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah.	19 Maret 1956	asli	6 lembar
185	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah.	19 Maret 1956	asli	5 lembar
186	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1956 tentang Pembelanjaan Pensiun.	19 Maret 1956	asli	1 sampul
187	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah.	19 Maret 1956	asli	7 lembar
188	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956 tentang Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland Berdasarkan Perjanjian Konferensi Maja Bundar.	3 Mei 1956	asli	2 lembar
189	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan.	16 Juli 1956	asli	5 lembar
190	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Irian Barat.	16 Agustus 1956	asli	6 lembar
191	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1956 tentang Perubahan dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 Nomor 517).	27 Agustus 1956	asli	3 lembar
192	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1956 tentang Perubahan dan Tambahan Indische Tariefwet (Staatsblad 1924 Nomor 487).	01 September 1956	asli	2 lembar
193	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Kompensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 Mengenai Berlakunya Dasar-dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama.	29 Agustus 1956	asli	1 sampul
194	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1956 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	08 September 1956	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
195	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1956 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1955 tentang Larangan Untuk Mengumpulkan Uang Logam Yang Sah dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah" sebagai Undang-Undang.	f	asli	6 lembar
196	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1956 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Penggantian Kerugian Anggota-Anggota Senat Republik Indonesia Serikat (Undang-Undang Darurat Nomor 30 Tahun 1950) sebagai Undang-Undang.	01 September 1956	asli	3 lembar
197	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pengadilan dan Acara Pidana Khusus untuk Anggota Konstituante.	29 November 1956	asli	2 lembar
198	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara.	29 November 1956	asli	1 sampul
199	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.	29 November 1956	asli	1 sampul
199 A	Naskah Undang-Undang	29 November 1956	asli	1 sampul
199 B	Berkas Penyusunan	9 November - 15 Desember 1956	asli	1 sampul
200	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1956 tentang Keanggotaan Republik Indonesia Pada Badan Keuangan Internasional (<i>International Finance Corporation</i>).			
200 A	Naskah Undang-Undang	18 Desember 1956	asli	5 lembar
200 B	Berkas Penyusunan	2 Agustus 1956 - 5 Januari 1957	asli	1 sampul
201	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1956 tentang Mengadakan Suatu Tarip Minimum dan Maksimum Dalam Tarip Bea Masuk.			
201 A	Naskah Undang-Undang	26 Desember 1956	asli	5 lembar
201 B	Berkas Penyusunan	11 Desember 1956 - 10 Januari 1957	asli	1 sampul
202	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Peminahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan.	31 Desember 1956	asli	6 lembar
203	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1956 tentang Perubahan dan Tambahan "Postordonnatie 1935" (Staatsblad 1934 Nomor 720).	26 Desember 1956	asli	2 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
204	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1955 tentang Mengadakan Opsenten atas Cukai Bensin (Lembaran Negara tahun 1955 Nomor 24) sebagai Undang-Undang.	26 Desember 1956	asli	3 lembar
205	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah-Daerah, Yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri..	31 Desember 1956	asli	4 lembar
206	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1956 tentang Penghapusan Ordonansi Staatsblad 1946 Nomor 115 dan Pembebasan Bea Materai, Pajak Pendapatan dan Pajak Perseroan untuk Hal-Hal Tertentu Tentang Pembesaran Modal Dari Perseroan dan Persekutuan.	31 Desember 1956	asli	4 lembar
207	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1955 tentang Memberhentikan Berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1955 tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 51) sebagai Undang-Undang.	31 Desember 1956	asli	2 lembar
208	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1956 tentang Pengubahan Redaksi Bagian II Bab A Dari Pos 173 dari tarif Bea Masuk dan Kenaikan Jumlah Bea Dalam Bagian Pos yang Tersebut Terakhir.	31 Desember 1956	asli	3 lembar
TAHUN 1957				
209	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.			
209 A	Naskah Undang-Undang	17 Januari 1957	asli	1 sampul
209 B	Berkas Penyusunan	18 Januari 1954 - 30 Januari 1957	asli	1 sampul
210	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1957 tentang Perjanjian Internasional Mengenai Pemberitaan Jarak Jauh.			
210 A	Naskah Undang-Undang	28 Januari 1957	asli	1 sampul
210 B	Berkas Penyusunan	10 Januari 1956 - 28 Januari 1957	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
211	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang Muka Pada Bank Indonesia Lebih Daripada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953, Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 40).			
211 A	Naskah Undang-Undang	6 Februari 1957	asli	2 lembar
211 B	Berkas Penyusunan	1 Juni 1956 - 21 Februari 1957	asli	1 sampul
212	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penetapan Bagian I dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953.	25 Maret 1957	asli	1 lembar
213	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penetapan Bagian II dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953.	25 Maret 1957	asli	1 lembar
214	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penetapan Bagian III dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953.	25 Maret 1957	asli	1 lembar
215	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penetapan Bagian IV dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953.	25 Maret 1957	asli	3 lembar
216	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penetapan Bagian IV A dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953.	25 Maret 1957	asli	5 lembar
217	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penetapan Bagian V A dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953.	25 Maret 1957	asli	3 lembar
218	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penetapan Bagian V B dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953.	25 Maret 1957	asli	3 lembar
219	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penetapan Bagian VI dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953.	25 Maret 1957	asli	1 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
220	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penetapan Bagian VII dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953.	25 Maret 1957	asli	3 lembar
221	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penetapan Bagian VIII A dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953.	25 Maret 1957	asli	5 lembar
222	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penetapan Bagian VIII B dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953.	25 Maret 1957	asli	2 lembar
223	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penetapan Bagian X dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953.	25 Maret 1957	asli	3 lembar
224	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penetapan Bagian XI dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953.	25 Maret 1957	asli	1 lembar
225	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penetapan Bagian XII dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953.	25 Maret 1957	asli	3 lembar
226	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penetapan Bagian XIII dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953.	25 Maret 1957	asli	1 lembar
227	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penetapan Bagian XIV dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953.	25 Maret 1957	asli	2 lembar
228	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penetapan Bagian XVI dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953.	25 Maret 1957	asli	3 lembar
229	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952 tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah dan Pajak Kekayaan (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 87) sebagai Undang-Undang.	31 Januari 1957	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
230	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.	08 April 1957	asli	1 sampul
231	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1955 tentang Penunjukan Bagian Pembikinan Sera dan Vaksin Daripada Lembaga Pasteur di Bandung menjadi Perusahaan Negara dalam Arti "Indische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 Nomor 419) sebagai Undang-Undang.	25 Maret 1957	asli	5 lembar
232	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1957 tentang Pemasukan dan Berlakunya Anggaran Belanja Negara.	01 April 1957	asli	3 lembar
233	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1957 tentang Persetujuan Negara Republik Indonesia terhadap Anggaran Dasar Dari Badan Tenaga Atom Internasional.	22 Juli 1957	asli	1 sampul
234	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.	27 Juli 1957	asli	1 lembar
235	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Irak.	14 Agustus 1957	asli	7 lembar
236	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 58) tentang Menambah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 78) tentang "Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-Undang Darurat Nomor 25 dan 34 Tahun 1950) sebagai Undang-Undang Republik Indonesia" sebagai Undang-Undang.	8 Oktober 1957	asli	3 lembar
237	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1957 tentang Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat, Berhenti Atau Berhalangan sedang Wakil Presiden Tidak Ada atau Berhalangan.	8 Oktober 1957	asli	2 lembar
238	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1957 tentang Pembebasan Saudara Untung Dari Penggantian Uang.	8 Oktober 1957	asli	2 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
239	Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1957 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Afghanistan.	12 November 1957	asli	4 lembar
240	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1957 tentang Persetujuan Kebudayaan dan Pendidikan antara Negara-Negara Republik Indonesia dan Republik India.	12 November 1957	asli	9 lembar
241	Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1957 tentang Persetujuan Kebudayaan antara Negara-Negara Republik Indonesia dan Republik Mesir.	12 November 1957	asli	9 lembar
242	Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954 tentang Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Maatschappij N.V. (B.V.M.) (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 67) sebagai Undang-Undang.	26 Oktober 1957	asli	3 lembar
243	Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri" sebagai Undang-Undang.	19 November 1957	asli	2 lembar
244	Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 1956.	5 Desember 1957	asli	2 lembar
245	Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya..	30 Oktober 1957	asli	1 sampul
246	Undang-Undang Nomor 75 Tahun 1957 tentang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.	13 Desember 1957	asli	4 lembar
247	Undang-Undang Nomor 76 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956.	13 Desember 1957	asli	1 lembar
248	Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1957 tentang Persetujuan Mengenai Warganegara yang Berada Secara Tidak Sah didaerah Republik Indonesia dan Republik Filipina.	19 Desember 1957	asli	1 sampul
249	Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1957 tentang Perubahan Canon dan Cijns atas Hak-Hak Erfpacht dan Konsesi Guna Perusahaan Kebun Besar.	19 Desember 1957	asli	2 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
250	Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957 tentang Pengesahan Pernyataan Keadaan Perang sebagai yang telah dilakukan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 255 Tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957.	27 Desember 1957	asli	2 lembar
251	Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvesi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 100 Mengenai Pengupahan yang sama Bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya.	19 December 1957	asli	9 lembar
TAHUN 1958				
252	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1958 tentang Kenaikan Tarip Uang Rambu.	6 Maret 1958	asli	4 lembar
253	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1957 tentang Perubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Yang dimaksud Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dewan Pemerintah Daerah Peralihan" (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 1 sebagai Undang-Undang.	20 Maret 1958	asli	3 lembar
254	Berkas Penyusunan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1958 tentang Perjanjian Perdamaian dan Persetujuan Pampasan antar Republik Indonesia dan Jepang.	11 Februari - 29 Maret 1958	asli	1 sampul
255	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang Perubahan Kedudukan Wilayah Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 5) sebagai Undang-Undang.	20 Maret 1958	asli	4 lembar
256	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1958 tentang Pengesahan Persetujuan Pinjaman Antara Republik Indonesia dan Export-Import Bank of Washington.	09 April 1958	asli	1 sampul
257	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1958 tentang Perubahan dan Penambahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1954 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.	16 April 1958	asli	4 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
258	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1955 tentang Pemungutan Sumbangan dari Pabrikasi-Pabrikasi Rokok Bagi "Badan Urusan Tembakau" (Krosok Centrale)" (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 34) sebagai Undang-Undang.	17 Juni 1958	asli	7 lembar
259	Berkas Penyusunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Kotapraja Sukabumi dan Daerah Swatantra Tingkat II Sukabumi.	7 Mei - 2 Juli 1958	asli	1 sampul
260	Berkas Penyusunan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang.	23 Juni - 2 Juli 1958	asli	1 sampul
261	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku sebagai Undang-Undang.	17 Juni 1958	asli	1 sampul
262	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang.	17 Juni 1958	asli	1 sampul
263	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 147) tentang Perubahan "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatblad Tahun 1937 Nomor 604)" sebagai Undang-Undang.	17 Juni 1958	asli	6 lembar
264	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 76) sebagai Undang-Undang.	17 Juni 1958	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
265	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Kotapradja Madiun dan Daerah Swatantra Tingkat II Madiun.	17 Juni 1958	asli	1 sampul
266	Berkas Penyusunan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1955 tentang Peraturan-Peraturan Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 78) sebagai Undang-Undang.	12 Juni - 26 Juli 1958	asli	1 sampul
267	Berkas Penyusunan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 30)	16 Mei - 26 Juli 1958	asli	1 sampul
268	Berkas Penyusunan Undang-Undang Nomor 57 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1952 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Bea Berat Barang (<i>Goederengeld Ordonnantie</i>) Beserta Peraturan Bea Berat Barang (<i>Algemeen Goederengeld Reglement</i>)" (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 39) sebagai Undang-Undang.	14 Juni - 31 Juli 1958	asli	1 sampul
269	Berkas Penyusunan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah" (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 77) sebagai Undang-Undang.	21 Juni - 30 Juli 1958	asli	1 sampul
270	Berkas Penyusunan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949.	24 Maret - 1 Agustus 1958	asli	1 sampul
271	Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku" (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang.	17 Juli 1958	asli	7 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
272	Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang.	25 Juli 1958	asli	1 sampul
273	Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	20 September 1958	asli	5 lembar
274	Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1957 tentang Pajak Bangsa Asing (Lembaran Negara Tahun 1957, Nomor 63) sebagai Undang-Undang.	11 Agustus 1958	asli	10 lembar
275	Undang-Undang Nomor 75 Tahun 1958 tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pembebasan Bank Indonesia dari Kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 dengan 12 (duabelas) Bulan , Setelah Berakhirnya Jangka Waktu Yang Ditetapkan Dengan Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1957 JO. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 61 JO. Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 114)	02 September 1958	asli	4 lembar
276	Undang-Undang Nomor 76 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1957 tentang Kenaikan Tarif Cukai atas Bir, Gula, Sacarin dan sebagainya dan Kenaikan Bea Masuk atas Bir (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 64)" sebagai Undang-Undang.	7 Oktober 1958	asli	5 lembar
277	Undang - Undang Nomor 77 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1957 Tentang Bank Tani dan Nelayan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 17) Sebagai Undang-Undang.	02 September 1958	asli	7 lembar
278	Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing.	14 Oktober 1958	asli	7 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
279	Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi	19 Oktober 1958	asli	1 sampul
280	Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 tentang Dewan Perancang Nasional.	23 Oktober 1958	asli	1 sampul
281	Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1958 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.	23 Oktober 1958	asli	1 sampul
282	Undang-Undang Nomor 82 Tahun 1958 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Satu Tahun Daripada Keadaan Perang Yang Telah Dinyatakan Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 1957 Tanggal 17 Desember 1957 dan Yang Desahkan Dengan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 170) Untuk Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.	17 Desember 1958	asli	1 sampul
283	Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan.	27 Desember 1958	asli	1 sampul
284	Undang-Undang Nomor 84 Tahun 1958 tentang Perubahan Pasal-Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953)	27 Desember 1958	asli	1 sampul
285	Undang-Undang Nomor 85 Tahun 1958 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960.	27 Desember 1958	asli	1 sampul
286	Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang <i>Nasionalisasi</i> Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda di Indonesia.	27 Desember 1958	asli	1 sampul
287	Undang-Undang Nomor 87 Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-Undang Pajak Bangsa Asing (Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1958)	27 Desember 1958	asli	1 sampul
TAHUN 1959				
288	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1959 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante.	14 Januari 1959	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
289	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1950 tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 28) Sebagaimana Kemudia Telah Diubah/Ditambah Pun Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 50) Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 76), Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 75) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 50) sebagai Undang-Undang.	12 Januari 1959	asli	1 sampul
290	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1959 tentang Persetujuan Kerjasama Ilmiah, Pendidikan dan Kebudayaan antara Republik Indonesia dan Republik Cekoslowakia.	24 Februari 1959	asli	1 sampul
291	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959 tentang Pos.	9 Maret 1959	asli	10 lembar
292	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 tentang Perubahan " <i>Regeling van Het Beroep in Belastingzaken</i> "	9 Maret 1959	asli	2 lembar
293	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Tugas-tugas Pemerintah Pusat Dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri Dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah.	24 Maret 1959	asli	10 lembar
294	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penghapusan "Peraturan Umum Korban Perang" Dahulu disebut "Algemene Oorlogsongevallen-Regeling".	2 April 1959	asli	4 lembar
295	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1955 tentang Perubahan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1953 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 37), sebagai Undang-Undang.	8 April 1959	asli	3 lembar
296	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1959 tentang Pembebasan R.Soemantri Soerjoadiprodjo dari Kewajiban Untuk Menggantikan Uang.	2 April 1959	asli	4 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
297	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan.	28 Maret 1959	asli	1 sampul
298	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1959 tentang Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden, dan Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Republik Indonesia.	26 Mei 1959	asli	5 lembar
299	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959 tentang Kedudukan Keuangan Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri-Muda Republik Indonesia.	26 Mei 1959	asli	4 lembar
300	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1957 tentang "Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat" (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 82) sebagai Undang-Undang.	26 Mei 1959	asli	5 lembar
301	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 82) sebagai Undang-Undang.	26 Juni 1959	asli	7 lembar
302	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1951 untuk Mengubah dan Menambah Peraturan Dalam Statblad 1916 Nomor 47" (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 14) sebagai Undang-Undang.	26 Juni 1959	asli	4 lembar
303	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1959 tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan Dan Pembukaan Tanah" (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 1) sebagai Undang-Undang.	26 Juni 1959	asli	7 lembar
304	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1959 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Iran.	26 Juni 1959	asli	6 lembar
305	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1958 tentang Kedudukan Hukum Apotek Darurat" (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 137) sebagai Undang-Undang.	26 Juni 1959	asli	5 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
306	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 84) sebagai Undang-Undang.	26 Juni 1959	asli	9 lembar
307	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1958 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 153) sebagai Undang-Undang.	26 Juni 1959	asli	3 lembar
308	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 154) sebagai Undang-Undang.	26 Juni 1959	asli	6 lembar
309	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 43 Tahun 1950 tentang Perubahan Pasal 45 "Zegelverordening 1921" (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 85) sebagai Undang-Undang.	1 Juli 1959	asli	3 lembar
310	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pemberian Tanda Kehormatan "Bintang Garuda" (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 19) sebagai Undang-Undang.	26 Juni 1959	asli	5 lembar
311	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1959 tentang Penarikan Kembali Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1955 tentang Pencabutan dan Penggantian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1953 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 38)	26 Juni 1959	asli	3 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
312	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan " dan "Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang.	26 Juni 1959	asli	7 lembar
313	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Daerah Yang dimaksud Dalam Pasal 6 Undang-Undang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Di Jawa (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53) sebagai Undang-Undang.	4 Juli 1959	asli	3 lembar
314	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang.	26 Juni 1959	asli	1 sampul
315	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapradja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang.	26 Juni 1959	asli	1 sampul
316	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi	4 Juli 1959	asli	1 sampul
TAHUN 1960				
317	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	5 Januari 1960	asli	3 lembar
318	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pejanjian Bagi Hasil.	7 Januari 1960	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
319	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960 tentang Pengesahan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 15) tentang Penunjukan Pelabuhan Palembang Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti "Indische Bedrijvenwet" (Staatblad 1927 Nomor 419) menjadi Undang-Undang.	7 Januari 1960	asli	7 lembar
320	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu.	8 Februari 1960	asli	7 lembar
321	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.	24 September 1960	asli	1 sampul
322	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus.	24 September 1960	asli	7 lembar
323	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik	26 September 1960	asli	1 sampul
324	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1960 tentang Pembuatan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Kamboja.	15 Oktober 1960	asli	2 lembar
325	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan.	15 Oktober 1960	asli	6 lembar
TAHUN 1961				
326	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang.	4 Februari 1961	asli	4 lembar
327	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman.	17 Februari 1961	asli	4 lembar
328	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1961 tentang Persetujuan Kompensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 106 Mengenai Istirahat Mingguan Dalam Perdagangan dan Kantor-Kantor.	25 Februari 1961	asli	1 sampul
329	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga.	25 Februari 1961	asli	6 lembar
330	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1961 tentang Perjanjian Pos Sedunia dan Persetujuan-Persetujuannya.	1 Maret 1961	asli	5 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
331	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1961 tentang Perjanjian Internasional Mengenai Pengiriman Berita Jarak Jauh.	1 Maret 1961	asli	1 sampul
332	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1961 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1961.	1 Maret 1961	asli	1 sampul
333	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana.	29 April 1961	asli	5 lembar
334	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang.	10 Mei 1961	asli	6 lembar
335	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang Menjadi Undang-Undang.	10 Mei 1961	asli	6 lembar
336	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1961 tentang Tambahan Atas Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan (Lembaran Negara Nomor 24 Tahun 1959- Tambahan Lembaran Negara Nomor 1759)	10 Mei 1961	asli	2 lembar
337	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pembuatan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok.	10 Juni 1961	asli	10 lembar
338	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.	30 Juni 1961	asli	8 lembar
339	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1961 tentang Tanda Kehormatan <i>Bintang Bhayangkara</i> .	30 Juni 1961	asli	9 lembar
340	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.	30 Juni 1961	asli	4 lembar
341	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.	30 Juni 1961	asli	4 lembar
342	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1961 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil.	12 Juli 1961	asli	3 lembar
343	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian.	21 Juli 1961	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
344	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961 tentang Persetujuan Atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut.	06 September 1961	asli	3 lembar
345	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya.	26 September 1961	asli	10 lembar
346	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.	11 Oktober 1961	asli	1 sampul
347	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi.	4 Desember 1961	asli	1 sampul
TAHUN 1962				
348	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut.	18 Januari 1962	asli	1 sampul
349	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara.	18 Januari 1962	asli	1 sampul
350	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1962 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tambahan Dari Republik Indonesia Untuk Tahun 1960.	18 Januari 1962	asli	1 sampul
351	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1962 tentang Penetapan Anggaran Tambahan Bagian-Bagian Perusahaan Negara Berdasarkan I.B.W. Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun 1960.	18 Januari 1962	asli	1 sampul
352	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.	14 Februari 1962	asli	1 sampul
353	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah.	5 Maret 1962	asli	7 lembar
354	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1962 tentang Pembuatan Perjanjian Persahabatan Dan Kerjasama Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Cekoslovakia.	18 Juni 1962	asli	1 lembar
355	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Pembuatan Perjanjian Persahabatan Dan Kerjasama Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Hongaria.	18 Juni 1962	asli	1 lembar
356	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1962 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1962.	18 Juni 1962	asli	2 lembar
357	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1962 tentang Penetapan Anggaran Bagian-bagian Perusahaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Indonesia Dari Anggaran Negara Republik Indonesia Untuk Tahun 1962.	18 Juni 1962	asli	1 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
358	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum.	3 Agustus 1962	asli	6 lembar
359	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta.	16 Agustus 1962	asli	1 sampul
360	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.	16 Agustus 1962	asli	1 sampul
361	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 Tentang Pemanggilan Dan Pengerahan Semua Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamanan Dan Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 8) menjadi Undang-Undang.	06 September 1962	asli	7 lembar
362	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 18) menjadi Undang-Undang.	02 November 1962	asli	3 lembar
363	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1962 tentang Pembuatan Perjanjian Hubungan Keramahan Dan Perniagaan Antara Republik Indonesia Dengan Jepang.	01 November 1962	asli	1 sampul
364	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1962 tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1962 Tentang Penerimaan dan Penggunaan Warga Negara Asing Yang Dengan Sukarela Turut Serta Dalam Perjuangan Pembebasan Irian Barat" (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 21) menjadi Undang-Undang.	17 November 1962	asli	7 lembar
365	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1962 tentang Perubahan /Penambahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Tahun 1961.	31 Desember 1962	asli	1 lembar
366	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1962 tentang Penetapan Anggaran Bagian-Bagian Perusahaan Negara I.B.W. Dari Anggaran Negara Republik Indonesia Untuk Tahun 1961.	31 Desember 1962	asli	1 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
TAHUN 1963				
367	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Atas Beberapa Jenis Barang (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 49) Menjadi Undang-Undang.	22 Juni 1963	asli	5 lembar
368	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Ketentuan dibidang Fiskal Mengenai Pembayaran Sumbangan Wajib Istimewa (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 50) Menjadi Undang-Undang.	22 Juni 1963	asli	5 lembar
369	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 51) Menjadi Undang-Undang.	22 Juni 1963	asli	9 lembar
370	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1962 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Atas Kendaraan Bermotor Yang Di Impor Kedalam Daerah Pabean Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 52) Menjadi Undang-Undang.	22 Juni 1963	asli	4 lembar
371	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1963 tentang Tanda Kehormatan Bintang Jasa.	22 Juli 1963	asli	5 lembar
372	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan.	22 Juli 1963	asli	7 lembar
373	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi.	5 Agustus 1963	asli	7 lembar
374	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1963 tentang Perubahan Dan Tambahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Untuk Tahun 1962 (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1962 Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 27)	24 Agustus 1963	asli	2 lembar
375	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1963 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1963	04 September 1963	asli	2 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
376	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1963 tentang Penetapan Bagian-Anggaran Perusahaan Negara I.B.W. Dari Anggaran Negara Republik Indonesia Untuk Tahun 1963.	04 September 1963	asli	1 lembar
377	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1964.	04 September 1963	asli	2 lembar
378	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1963 tentang Penetapan Bagian-Anggaran Perusahaan Negara I.B.W. Dari Anggaran Negara Republik Indonesia Untuk Tahun 1964.	04 September 1963	asli	1 sampul
379	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1962 Tentang Pengesahan "Perjanjian Karya" Antara Perusahaan Negara Pertamina Dengan Pan American Indonesia Oil Company Untuk Diri Sendiri Dan Atas Nama Pan American Internasional Oil Corporation (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 24), Menjadi Undang-Undang.	28 November 1963	asli	4 lembar
380	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1963 tentang Pengesahan "Perjanjian Karya" Antara PN Pertamina Dengan <i>PT. Caltex Indonesia Dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic) / Texaco Overseas Petroleum Company (Topco)</i> , PN Permina Dengan PT Stanvac Indonesia, PN Permigan Dengan PT Shell Indonesia.	28 November 1963	asli	4 lembar
381	Undang-Undang Nomor 1 s/d 14 Tahun 1963	22 Juni - 28 November 1963	tembusan	1 sampul
TAHUN 1964				
382	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan (Lembaran Negara 1962 Nomor 40) menjadi Undang-Undang.	20 Januari 1964	asli	6 lembar
383	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Bank Tabungan Negara.	25 Mei 1964	asli	7 lembar
384	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1962 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Nomor 70) menjadi Undang-Undang.	26 Mei 1964	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
385	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1963 tentang Pelunasan Cukai Tembakau oleh Perusahaan-Perusahaan Hasil Tembakau dan Pengeluaran Hasil-Hasil Tembakau Dari Perusahaan-Perusahaan Itu Kedalam Peredaran Bebas (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 11) menjadi Undang-Undang.	1 Juni 1964	asli	3 lembar
386	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 66) menjadi Undang-Undang.	4 Juni 1964	asli	1 sampul
387	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1963 tentang Surat Hutang Landreform (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 63) menjadi Undang-Undang.	16 Juni 1964	asli	7 lembar
388	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1964 tentang Pemungutan Bea-Bea, Cukai-Cukai dan Sumbangan-Sumbangan Wajib Istimewa (S.W.I) di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau.	27 Juni 1964	asli	6 lembar
389	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 (Lembara Negara Tahun 1964 Nomor 1) tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 65) tentang Penetapan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 154) tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai Termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949, menjadi Undang-Undang.	4 Agustus 1964	asli	4 lembar
390	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1964 tentang Gerakan Sukarelawan Indonesia.	14 Agustus 1964	asli	6 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
391	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta.	31 Agustus 1964	asli	2 lembar
392	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1964 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Palembang dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan dan di Jakarta.	08 September 1964	asli	3 lembar
393	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.	23 September 1964	asli	5 lembar
394	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembara Negara Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang.	23 September 1964	asli	9 lembar
395	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembara Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang.	23 September 1964	asli	7 lembar
396	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 DRT Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembara Negara Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang.	23 September 1964	asli	8 lembar
397	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.	23 September 1964	asli	1 sampul
398	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.	26 September 1964	asli	5 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
399	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1964 tentang Wajib Kerja Tenaga Para Medis.	31 Oktober 1964	asli	4 lembar
400	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.	31 Oktober 1964	asli	1 sampul
401	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 38 PRP Tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-Tanaman Tertentu.	31 Oktober 1964	asli	6 lembar
402	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964 tentang <i>Pengadilan Landreform.</i>	31 Oktober 1964	asli	1 sampul
403	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925.	25 November 1964	asli	9 lembar
404	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944.	25 November 1964	asli	8 lembar
405	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932.	25 November 1964	asli	5 lembar
406	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Aturan Bea Materai 1921.	25 November 1964	asli	6 lembar
407	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1964 tentang Pemberian Perangsang Penanaman Modal.	25 November 1964	asli	2 lembar
408	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1964 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Perseroan/Pajak Pendapatan	25 November 1964	asli	4 lembar
409	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1964 tentang Pengecualian Beberapa Macam Penyusutan-Penyusutan dan Pengeluaran-Pengeluaran Tertentu Dari Laba Perusahaan.	25 November 1964	asli	3 lembar
410	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1964 tentang Pengeluaran Pinjaman Obligasi Pembangunan Tahun 1964.	25 November 1964	asli	6 lembar
411	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1964 tentang Pengeluaran Pinjaman Obligasi Konfrontasi Tahun 1964.	25 November 1964	asli	6 lembar
412	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom.	26 November 1964	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
413	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa.	28 Desember 1964	asli	1 sampul
414	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang.	31 Desember 1964	asli	5 lembar
415	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.	31 Desember 1964	asli	5 lembar
416	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk 1963 (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1963 - Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 91)	31 Desember 1964	asli	1 sampul
417	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1964 tentang Pungutan Istimewa Atas Impor Untuk Pembiayaan Pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatera.	31 Desember 1964	asli	3 lembar
418	Undang-Undang Nomor 1 s/d 36 Tahun 1964	20 Januari s/d 31 Desember 1964	tembusan	1 sampul
TAHUN 1965				
419	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Denpasar dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar.	27 Januari 1965	asli	2 lembar
420	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Pradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta.	6 Februari 1965	asli	6 lembar
421	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya.	1 April 1965	asli	1 sampul
422	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Djompo.	10 Mei 1965	asli	6 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
423	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan.	14 Juni 1965	asli	5 lembar
424	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah.	14 Juni 1965	asli	6 lembar
425	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah.	14 Juni 1965	asli	6 lembar
426	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.	14 Juni 1965	asli	7 lembar
427	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.	14 Juni 1965	asli	6 lembar
428	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Pradja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.	14 Juni 1965	asli	6 lembar
429	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-Undang.	14 Juni 1965	asli	5 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
430	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1962 tentang Pencabutan Undang-Undang Krisis Impor 1933 (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 44) menjadi Undang-Undang.	14 Juni 1965	asli	2 lembar
431	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.	6 Juli 1965	asli	1 sampul
432	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian.	2 Agustus 1965	asli	1 sampul
433	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1965 tentang Veteran Republik Indonesia.	10 Agustus 1965	asli	1 sampul
434	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 138) Yang Telah Diubah dan Ditambah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 42).	23 Agustus 1965	asli	3 lembar
435	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 41) menjadi Undang-Undang.	23 Agustus 1965	asli	1 sampul
436	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Tembusan Asli Undang - Undang Nomor 1-18 Tahun 1965.	27 Januari - 1 September 1965	tembusan, copy	1 sampul
437	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapradja sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.	01 September 1965	asli	1 sampul
438	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1965 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banjarmasin dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya.	22 September 1965	asli	3 lembar
439	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1965 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bukit Tinggi dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan.	24 November 1965	asli	3 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
440	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1965 tentang Anggaran Moneter Tahun-Anggaran 1966.	31 Desember 1965	asli	5 lembar

TAHUN 1966				
441	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1966 tentang Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (<i>International Monetary Fund</i>) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (<i>International Bank for Reconstruction and Development</i>).	14 Februari 1966	asli	5 lembar
442	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang <i>Hygiene</i> .	11 Juni 1966	asli	4 lembar
443	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa.	11 Juni 1966	asli	7 lembar
444	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Ambon dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar.	27 Oktober 1966	asli	3 lembar
445	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1966 tentang Persetujuan-persetujuan untuk Normalisasi Hubungan antara Republik Indonesia dan Malaysia.	27 Oktober 1966	asli	5 lembar
446	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela.	01 November 1966	asli	1 sampul
447	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1966 tentang Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Soal-soal Keuangan.	08 November 1966	asli	4 lembar
448	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Republik Indonesia dalam Bank Pembangunan Asia (<i>Asian Development Bank</i>).	08 November 1966	asli	2 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
449	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (<i>International Monetary Fund</i>) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (<i>International Bank for Reconstruction and Development</i>).	08 November 1966	asli	7 lembar
450	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.	12 Desember 1966	asli	1 sampul
451	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1966 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966.	31 Desember 1966	asli	1 sampul

TAHUN 1967				
452	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.	10 Januari 1967	asli	1 sampul
453	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1967 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan kembali Republik Indonesia dalam <i>International Monetary Fund</i> dan <i>International Bank for Reconstruction and Development</i> (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 36).	10 Januari 1967	asli	2 lembar
454	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung.	6 Mei 1967	asli	9 lembar
455	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.	6 Mei 1967	asli	3 lembar
456	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.	24 Mei 1967	asli	1 sampul
457	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.	8 Juli 1967	asli	1 sampul
458	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia.	7 Agustus 1967	asli	1 sampul
459	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925.	26 Agustus 1967	asli	10 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
460	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu.	12 September 1967	asli	6 lembar
461	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Tambahan atas Perubahan dan Tambahan Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966.	11 Oktober 1967	asli	8 lembar
462	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.	2 Desember 1967	asli	1 sampul
463	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.	18 Desember 1967	asli	1 sampul
464	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1967 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1968.	30 Desember 1967	asli	6 lembar
465	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.	30 Desember 1967	asli	1 sampul
TAHUN 1968				
466	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1967 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 33).	4 Maret 1968	asli	2 lembar
467	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968 tentang Perubahan/Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951.	22 Maret 1968	asli	4 lembar
468	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1968 tentang Keanggotaan Republik Indonesia pada <i>International Development Association</i> .	17 Juni 1968	asli	1 sampul
469	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat.	29 Juni 1968	asli	10 lembar
470	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal.	29 Juni 1968	asli	1 sampul
471	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.	3 Juli 1968	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
472	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah.	16 Juli 1968	asli	3 lembar
473	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1968 tentang Perubahan dan Tambahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1967.	16 Juli 1968	asli	2 lembar
474	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 "Indische Compatibiliteitswet" (Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 DRT. 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6).	25 Oktober 1968	asli	5 lembar
475	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah.	25 Oktober 1968	asli	4 lembar
476	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1968 tentang <i>Charter of the Southeast Asian Ministers of Education Organization</i> .	25 Oktober 1968	asli	7 lembar
477	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1968 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Manado dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar.	26 November 1968	asli	4 lembar
478	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.	7 Desember 1968	asli	1 sampul
479	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang "Jalasena".	7 Desember 1968	asli	1 sampul
480	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1968 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peralihan Triwulan I Tahun 1969.	16 Desember 1968	asli	1 sampul
481	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1968 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan.	17 Desember 1968	asli	3 lembar
482	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946.	18 Desember 1968	asli	1 sampul
483	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara.	18 Desember 1968	asli	1 sampul
484	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya.	18 Desember 1968	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
485	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.	18 Desember 1968	asli	1 sampul
486	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia.	18 Desember 1968	asli	1 sampul
487	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia.	18 Desember 1968	asli	1 sampul
488	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1968 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2858) tentang <i>Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi</i> menjadi Undang-Undang.	27 Desember 1968	asli	1 sampul
489	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan <i>Bintang Swa Bhuwana Paksa</i> .	31 Desember 1968	asli	1 sampul
490	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1968 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Republik Indonesia.	31 Desember 1968	asli	1 sampul
TAHUN 1969				
491	Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bandung dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta.			
491 A	Naskah Undang - Undang	11 Maret 1969	asli	4 lembar
491 B	Berkas Penyusunan	15 Oktober 1968 - 5 Maret 1969	asli	1 sampul
492	Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1969/1970			
492 A	Naskah Undang - Undang	31 Maret 1969	asli	7 lembar
492 B	Berkas Penyusunan	Desember 1968 - 4 April 1969	salinan	1 sampul
493	Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Kompensi Organisasi Perburuan Internasional Nomor 120 Mengenai <i>Hygiene</i> Dalam Perniagaan dan Kantor - Kantor			
493 A	Naskah Undang - Undang	05 April 1969	asli	3 lembar
493 B	Berkas Penyusunan	8 Juli 1964 - 5 April 1969	salinan	9 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
494	Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan RRT Mengenai Soal Dwikewarganegaraan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 5)			
494 A	Naskah Undang - Undang	10 April 1969	asli	4 lembar
494 B	Berkas Penyusunan	1 Juli 1968 - 10 April 1969	salinan	3 lembar
495	Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang - Undang			
495 A	Naskah Undang - Undang	5 Juli 1969	asli	1 sampul
495 B	Berkas Penyusunan	16 Maret 1968 - 26 Juli 1969	tembusan, konsep	1 sampul
496	Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang			
496 A	Naskah Undang - Undang	5 Juli 1969	asli	6 lembar
496 B	Berkas Penyusunan	16 Juli 1968 - 5 Juli 1969	tembusan	1 sampul
497	Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1969 tentang Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Menjadi Undang - Undang			
497 A	Naskah Undang - Undang	5 Juli 1969	asli	4 lembar
497 B	Berkas Penyusunan	5 Desember 1968 - 5 Juli 1969	tembusan	1 sampul
498	Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1969 tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1968			
498 A	Naskah Undang - Undang	5 Juli 1969	asli	3 lembar
498 B	Berkas Penyusunan	31 Desember 1968 - 5 Juli 1969	tembusan	1 sampul
499	Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Negara Nomor 2890) Tentang Bentuk - Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang - Undang			

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
499 A	Naskah Undang - Undang	1 Agustus 1969	asli	8 lembar
499 B	Berkas Penyusunan	10 April - 1 Agustus 1969	tembusan	1 sampul
500	Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1969 tentang Konvensi Internasional <i>Telecommunication Union</i> di Montreux 1965			
500 A	Naskah Undang - Undang	1 Agustus 1969	asli	1 sampul
500 B	Berkas Penyusunan	24 Mei 1969	tembusan, copy	1 sampul
501	Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun-Janda/Duda Pegawai.			
501 A	Naskah Undang - Undang	8 Agustus 1969	asli	1 sampul
501 B	Berkas Penyusunan	8 April 1967 - 3 Juni 1970	tembusan, copy	1 sampul
502	Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat			
502 A	Naskah Undang - Undang	10 September 1969	asli	1 sampul
502 B	Berkas Penyusunan	16 Agustus - 3 Oktober 1969	tembusan, konsep	1 sampul
503	Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1969 tentang Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia di Wina Tahun 1964			
503 A	Naskah Undang - Undang	25 Oktober 1969	asli	1 sampul
503 B	Berkas Penyusunan	9 September - 25 Oktober 1969	copy	1 sampul
504	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja			
504 A	Naskah Undang - Undang	19 November 1969	asli	1 sampul
504 B	Berkas Penyusunan	18 Maret - 25 November 1969	tembusan, copy	1 sampul
505	Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota - Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat			
505 A	Naskah Undang - Undang	17 Desember 1969	asli	1 sampul
505 B	Berkas Penyusunan	3 Agustus 1966 - 25 Npember 1969	tembusan, copy	1 sampul
506	Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			
506 A	Naskah Undang - Undang	17 Desember 1969	asli	1 sampul
506 B	Berkas Penyusunan	Oktober 1966 - 25 Nopember 1969	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
TAHUN 1970				
507	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.			
507 A	Naskah Undang-Undang	12 Januari 1970	asli	1 sampul
507 B	Berkas Penyusunan	25 Novemer 1968 - 23 Desember 1969	tembusan, copy	1 sampul
508	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1970 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik Bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia.			
508 A	Naskah Undang-Undang	11 Februari 1970	asli	3 lembar
508 B	Berkas Penyusunan	18 September 1968 - 21 November 1969	tembusan, copy	1 sampul
509	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.			
509 A	Naskah Undang-Undang	27 Maret 1970	asli	1 sampul
509 B	Berkas Penyusunan	29 Maret 1968 - 2 Desember 1969	tembusan, copy	1 sampul
510	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas Dengan Pelabuhan Bebas Sabang.			
510 A	Naskah Undang-Undang	27 Maret 1970	asli	10 lembar
510 B	Berkas Penyusunan	18 Juni 1968 - 11 Maret 1970	tembusan, copy	1 sampul
511	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1970 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971.			
511 A	Naskah Undang-Undang	30 Maret 1970	asli	1 sampul
511 B	Berkas Penyusunan	30 Desember 1969 - 30 Maret 1970	tembusan, copy	1 sampul
512	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1970 tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1969/1970.			
512 A	Naskah Undang-Undang	17 Juli 1970	asli	1 sampul
512 B	Berkas Penyusunan	30 Maret - 17 Juli 1970	tembusan, copy	1 sampul
513	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan Landreform.			
513 A	Naskah Undang-Undang	31 Juli 1970	asli	7 lembar
513 B	Berkas Penyusunan	14 Mei 1968- 28 agustus 1970	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
514	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925.			
514 A	Naskah Undang-Undang	7 Agustus 1970	asli	1 sampul
514 B	Berkas Penyusunan	7 Maret - 7 Agustus 1970	tembusan, copy	1 sampul
515	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944.			
515 A	Naskah Undang-Undang	7 Agustus 1970	asli	5 lembar
515 B	Berkas Penyusunan	8 Desember 1969 - 7 Agustus 1970	tembusan, copy	1 sampul
516	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Pajak Dividen 1959.			
516 A	Naskah Undang-Undang	7 Agustus 1970	asli	1 sampul
516 B	Berkas Penyusunan	8 Desember 1969 - 2 Juli 1971	tembusan, copy	1 sampul
517	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.			
517 A	Naskah Undang-Undang	7 Agustus 1970	asli	8 lembar
517 B	Berkas Penyusunan	8 Desember 1969 - 29 Juli 1970	tembusan, copy	1 sampul
518	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.			
518 A	Naskah Undang-Undang	7 Agustus 1970	asli	9 lembar
518 B	Berkas Penyusunan	8 Desember 1969 - 29 Juli 1970	tembusan, copy	1 sampul
519	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota-Anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.			
519 A	Naskah Undang-Undang	28 November 1970	asli	10 lembar
519 B	Berkas Penyusunan	8 Desember 1969 - 28 November 1970	tembusan, copy	1 sampul
520	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.			
520 A	Naskah Undang-Undang	17 Desember 1970	asli	1 sampul
520 B	Berkas Penyusunan	22 Maret 1968 - 28 November 1970	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
TAHUN 1971				
521	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Malaysia			
521 A	Naskah Undang-Undang	10 Maret 1971	asli	10 lembar
521 B	Berkas Penyusunan	17 Februari - 10 Maret 1971	tembusan, copy	1 sampul
522	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka			
522 A	Naskah Undang-Undang	10 Maret 1971	asli	7 lembar
522 B	Berkas Penyusunan	5 November 1970 - 10 Maret 1971	tembusan, copy	1 sampul
523	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.			
523 A	Naskah Undang-Undang	29 Maret 1971	asli	1 sampul
523 B	Berkas Penyusunan	11 Juli 1970 - 29 Maret 1971	tembusan, copy	1 sampul
524	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (S.1847:23).			
524 A	Naskah Undang-Undang	29 Maret 1971	asli	6 lembar
524 B	Berkas Penyusunan	30 Maret 1970 - 11 November 1971	tembusan, copy	1 sampul
525	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1971 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972.			
525 A	Naskah Undang-Undang	29 Maret 1971	asli	10 lembar
525 B	Berkas Penyusunan	31 Desember 1970 - 29 Maret 1971	tembusan, copy	1 sampul
526	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1971 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971.			
526 A	Naskah Undang-Undang	18 Mei 1971	asli	4 lembar
526 B	Berkas Penyusunan	31 Maret - 18 Mei 1971	tembusan, copy	1 sampul
527	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan.			
527 A	Naskah Undang-Undang	18 Mei 1971	asli	8 lembar
527 B	Berkas Penyusunan	18 Juni 1970 - 18 Mei 1971	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
528	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.	15 September 1971	asli	1 sampul
529	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1971 tentang Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia.			
529 A	Naskah Undang-Undang	18 September 1971	asli	8 lembar
529 B	Berkas Penyusunan	15 April - 18 September 1971	salinan	6 lembar
530	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1971 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.			
530 A	Naskah Undang-Undang	24 September 1971	asli	3 lembar
530 B	Berkas Penyusunan	11 September - 24 September 1971	tembusan, copy	1 sampul
531	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1971 tentang Perhitungan Anggaran Tahun 1967.			
531 A	Naskah Undang-Undang	24 September 1971	asli	3 lembar
531 B	Berkas Penyusunan	15 Agustus 1968 - 24 September 1971	tembusan, copy	1 sampul
532	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong menjadi Undang-Undang.			
532 A	Naskah Undang-Undang	16 Oktober 1971	asli	3 lembar
532 B	Berkas Penyusunan	30 Juli - 16 Oktober 1971	tembusan, copy	1 sampul
533	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma menjadi Undang-Undang.			
533 A	Naskah Undang-Undang	11 Desember 1971	asli	1 sampul
533 B	Berkas Penyusunan	6 Oktober - 11 Desember 1971	tembusan, copy	1 sampul
TAHUN 1972				
534	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1972 tentang Anggaran Belanja dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1972/1973.			

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
534 A	Naskah Undang-Undang	6 Maret 1972	asli	7 lembar
534 B	Berkas Penyusunan	3 Januari - 3 Maret 1972	tembusan, copy	1 sampul
535	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1972 tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Belanja dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972.			
535 A	Naskah Undang-Undang	13 Juni 1972	asli	5 lembar
535 B	Berkas Penyusunan	25 Maret - 7 Juni 1972	tembusan, copy	1 sampul
536	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi.			
536 A	Naskah Undang-Undang	28 Juli 1972	asli	1 sampul
536 B	Berkas Penyusunan	6 Maret - 15 Mei 1972	tembusan, copy	1 sampul
537	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang.			
537 A	Naskah Undang-Undang	09 November 1972	asli	1 sampul
537 B	Berkas Penyusunan	29 Juli - 13 Oktober 1972	tembusan, copy	1 sampul
538	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1972 tentang Perhitungan Anggaran Tahun 1968.			
538 A	Naskah Undang-Undang	13 Desember 1972	asli	4 lembar
538 B	Berkas Penyusunan	12 Agustus - 13 Desember 1972	tembusan, copy	1 sampul
539	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1972 tentang Perhitungan Anggaran Peralihan Triwulan I Tahun 1969.			
539 A	Naskah Undang-Undang	13 Desember 1972	asli	3 lembar
539 B	Berkas Penyusunan	27 November - 13 Desember 1972	tembusan, copy	1 sampul
	TAHUN 1973			
540	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia			
540 A	Naskah Undang-Undang	6 Januari 1973	asli	9 lembar
540 B	Berkas Penyusunan	26 September 1972 - 6 Januari 1973	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
541	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1973 tentang Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia terhadap Perubahan Pasal VI Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional.			
541 A	Naskah Undang-Undang	12 Januari 1973	asli	10 lembar
541 B	Berkas Penyusunan	26 September 1972 - 12 Januari 1973	tembusan, copy	1 sampul
542	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1973 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974.			
542 A	Naskah Undang-Undang	14 Maret 1973	asli	9 lembar
542 B	Berkas Penyusunan	6 Januari - 14 Maret 1973	tembusan, copy	1 sampul
543	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1973 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1972/1973.			
543 A	Naskah Undang-Undang	8 Juni 1973	asli	5 lembar
543 B	Berkas Penyusunan	30 Maret - 8 Juni 1973	tembusan, copy	1 sampul
544	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.			
544 A	Naskah Undang-Undang	16 Juli 1973	asli	1 sampul
544 B	Berkas Penyusunan	2 - 8 Juni 1973	tembusan, copy	1 sampul
545	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973 tentang Perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea.			
545 A	Naskah Undang-Undang	8 Desember 1973	asli	1 sampul
545 B	Berkas Penyusunan	15 Oktober - 8 Desember 1973	tembusan, asli	1 sampul
546	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura.			
546 A	Naskah Undang-Undang	8 Desember 1973	asli	9 lembar
546 B	Berkas Penyusunan	19 Oktober - 8 Desember 1973	tembusan, copy	1 sampul
TAHUN 1974				
547	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.			
547 A	Naskah Undang-Undang	2 Januari 1974	asli	1 sampul
547 B	Berkas Penyusunan	14 September - 29 Desember 1973	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
548	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/ 1975.			
548 A	Naskah Undang-Undang	14 Maret 1974	asli	1 sampul
548 B	Berkas Penyusunan	22 Desember 1973 - 1 Maret 1974	tembusan, copy	1 sampul
549	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatn dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974.			
549 A	Naskah Undang-Undang	3 Juni 1974	asli	7 lembar
549 B	Berkas Penyusunan	21 Maret - 3 Juni 1974	tembusan, copy	1 sampul
550	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.			
550 A	Naskah Undang-Undang	4 Juni 1974	asli	1 sampul
550 B	Berkas Penyusunan	31 Mei 1972 - 28 Mei 1974	tembusan, copy	1 sampul
551	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.			
551 A	Naskah Undang-Undang	23 Juli 1974	asli	1 sampul
551 B	Berkas Penyusunan	1 April - 8 Juli 1974	tembusan, copy	2 sampul
552	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.			
552 A	Naskah Undang-Undang	6 November 1974	asli	1 sampul
552 B	Berkas Penyusunan	31 Agustus 1968 - 26 Oktober 1974	tembusan, copy	1 sampul
553	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.			
553 A	Naskah Undang-Undang	6 November 1974	asli	7 lembar
553 B	Berkas Penyusunan	1 April - 26 Oktober 1974	tembusan, copy	1 sampul
554	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian.			
554 A	Naskah Undang-Undang	6 November 1974	asli	1 sampul
554 B	Berkas Penyusunan	13 Juli - 28 Oktober 1974	tembusan, copy	1 sampul
555	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi.			

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
555 A	Naskah Undang-Undang	26 Desember 1974	asli	4 lembar
555 B	Berkas Penyusunan	16 Oktober - 16 Desember 1974	tembusan, copy	1 sampul
556	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Pasal 19 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2971).			
556 A	Naskah Undang-Undang	26 Desember 1974	asli	5 lembar
556 B	Berkas Penyusunan	1 November - 14 Desember 1974	tembusan, copy	1 sampul
557	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.			
557 A	Naskah Undang-Undang	26 Desember 1974	asli	1 sampul
557 B	Berkas Penyusunan	2 Juli 1968 - 16 Desember 1974	tembusan, copy	1 sampul

TAHUN 1975				
558	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976.			
558 A	Naskah Undang-Undang	8 Maret 1975	asli	9 lembar
558 B	Berkas Penyusunan	27 Desember 1974 - 28 Februari 1975	tembusan, copy	1 sampul
559	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1975 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975.			
559 A	Naskah Undang-Undang	16 Juni 1975	asli	7 lembar
559 B	Berkas Penyusunan	26 Maret 1975 - 12 Juni 1975	tembusan, copy	1 sampul
560	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.			
560 A	Naskah Undang-Undang	27 Agustus 1975	asli	1 sampul
560 B	Berkas Penyusunan	25 Februari 1974 - 16 Agustus 1975	tembusan, copy	1 sampul
561	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.			
561 A	Naskah Undang-Undang	24 November 1975	asli	1 sampul
561 B	Berkas Penyusunan	21 Oktober 1974 - 10 November 1975	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
562	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.			
562 A	Naskah Undang-Undang	24 November 1975	asli	1 sampul
562 B	Berkas Penyusunan	21 Oktober 1974 - 12 November 1975	tembusan, copy	1 sampul
TAHUN 1976				
563	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977.			
563 A	Naskah Undang-Undang	8 Maret 1976	asli	1 sampul
563 B	Berkas Penyusunan	27 Desember 1975 - 16 September 1976	tembusan, copy	1 sampul
564	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi <i>The Hague</i> 1970, dan Konvensi Montreal 1971.			
564 A	Naskah Undang-Undang	31 Maret 1976	asli	9 lembar
564 B	Berkas Penyusunan	29 Desember 1975 - 8 Juli 1976	tembusan, copy	1 sampul
565	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.			
565 A	Naskah Undang-Undang	05 April 1976	asli	6 lembar
565 B	Berkas Penyusunan	29 November 1975 - 5 April 1976	tembusan, copy	1 sampul
566	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.			
566 A	Naskah Undang-Undang	27 April 1976	asli	1 sampul
566 B	Berkas Penyusunan	22 November 1975 - 17 Juni 1976	tembusan, copy	1 sampul
567	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1976 tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976.			
567 A	Naskah Undang-Undang	17 Juni 1976	asli	7 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
567 B	Berkas Penyusunan	27 Maret - 8 Juli 1976	tembusan, copy	1 sampul
568	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara.			
568 A	Naskah Undang-Undang	21 Juni 1976	asli	1 sampul
568 B	Berkas Penyusunan	18 Maret - 8 Juli 1976	tembusan, copy	1 sampul
569	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor-Timur Ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur.			
569 A	Naskah Undang-Undang	17 Juli 1976	asli	7 lembar
569 B	Berkas Penyusunan	31 Mei 1975 - 29 Juli 1976	tembusan, copy	1 sampul
570	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya.			
570 A	Naskah Undang-Undang	26 Juli 1976	asli	1 sampul
570 B	Berkas Penyusunan	26 Februari 1975 - 26 Juli 1976	tembusan, copy	2 sampul
571	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.			
571 A	Naskah Undang-Undang	26 Juli 1976	asli	1 sampul
571 B	Berkas Penyusunan	19 Juni 1976 - 26 Juli 1976	tembusan, copy	2 sampul
572	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Philipina Serta Protokol.			
572 A	Naskah Undang-Undang	26 Juli 1976	asli	1 sampul
572 B	Berkas Penyusunan	10 Januari - 26 Juli 1976	tembusan, copy	1 sampul
573	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (<i>International Telecommunication Convention</i>) Malaga-Torremolinos, 1973.			
573 A	Naskah Undang-Undang	22 November 1976	asli	7 lembar
573 B	Berkas Penyusunan	15 Januari - 22 November 1976	tembusan, copy	1 sampul
TAHUN 1977				
574	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1977 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978.			
574 A	Naskah Undang-Undang	1 Maret 1977	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
574 B	Berkas Penyusunan	25 Maret - 23 Juni 1977	tembusan, copy	1 sampul
575	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1977 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977.			
575 A	Naskah Undang-Undang	30 Juni 1977	asli	6 lembar
575 B	Berkas Penyusunan	29 Desember 1976 - 22 Februari 1977	tembusan, copy	1 sampul
	TAHUN 1978			
576	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979.			
576 A	Naskah Undang-Undang	7 Maret 1978	asli	8 lembar
576 B	Berkas Penyusunan	29 Desember 1977 - 11 Maret 1978	tembusan, copy	1 sampul
577	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Ekstradisi.			
577 A	Naskah Undang-Undang	18 Maret 1978	asli	1 sampul
577 B	Berkas Penyusunan	7 September 1976 - 1 April 1978	tembusan, copy	1 sampul
578	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1978 tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978.			
578 A	Naskah Undang-Undang	30 Juni 1978	asli	1 sampul
578 B	Berkas Penyusunan	28 Maret - 21 Juni 1978	tembusan, copy	1 sampul
579	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung.			
579 A	Naskah Undang-Undang	26 Juli 1978	asli	9 lembar
579 B	Berkas Penyusunan	17 Mei - 24 Juli 1978	tembusan, copy	1 sampul
580	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta.			
580 A	Naskah Undang-Undang	3 Agustus 1978	asli	5 lembar
580 B	Berkas Penyusunan	7 Oktober 1976 - 28 Juli 1978	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
581	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.			
581 A	Naskah Undang-Undang	3 Agustus 1978	asli	6 lembar
581 B	Berkas Penyusunan	7 Oktober 1976 - 13 Juli 1978	tembusan, copy	1 sampul
582	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia.			
582 A	Naskah Undang-Undang	18 Desember 1978	asli	1 sampul
582 B	Berkas Penyusunan	11 Oktober 1969 - 28 Nopember 1978	tembusan, copy	1 sampul
583	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-senjata Nuklir.			
583 A	Naskah Undang-Undang	18 Desember 1978	asli	1 sampul
583 B	Berkas Penyusunan	15 Maret 1979 - 28 Februari 1979	tembusan, copy	1 sampul
TAHUN 1979				
584	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.			
584 A	Naskah Undang-Undang	18 Januari 1979	asli	1 sampul
584 B	Berkas Penyusunan	22 November 1975 - 28 Januari 1980	tembusan, copy	1 sampul
585	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1979/1980.			
585 A	Naskah Undang-Undang	12 Maret 1979	asli	1 sampul
585 B	Berkas Penyusunan	28 Desember 1978 - 28 Januari 1980	tembusan, copy	1 sampul
586	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1978/1979.			
586 A	Naskah Undang-Undang	29 Juni 1979	asli	6 lembar
586 B	Berkas Penyusunan	15 Agustus 1972 - 28 Januari 1980	tembusan, copy	1 sampul
587	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.			
587 A	Naskah Undang-Undang	23 Juli 1979	asli	1 sampul
587 B	Berkas Penyusunan	1 Februari 1966 - 28 Januari 1980	tembusan, copy	1 sampul
588	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.			

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
588 A	Naskah Undang-Undang	1 Desember 1979	asli	1 sampul
588 B	Berkas Penyusunan	1 April 1974 - 28 Januari 1980	tembusan, copy	1 sampul
TAHUN 1980				
589	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1980/1981.			
589 A	Naskah Undang-Undang	10 Maret 1980	asli	1 sampul
589 B	Berkas Penyusunan	28 Desember 1979 - 3 Maret 1980	tembusan, copy	1 sampul
590	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975.			
590 A	Naskah Undang-Undang	20 Maret 1980	asli	1 sampul
590 B	Berkas Penyusunan	24 Juli 1979 - 29 Februari 1980	tembusan, copy	1 sampul
591	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980.			
591 A	Naskah Undang-Undang	28 Juni 1980	asli	1 sampul
591 B	Berkas Penyusunan	28 Maret - 20 Juni 1980	tembusan, copy	1 sampul
592	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1980 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1969/1970.			
592 A	Naskah Undang-Undang	5 Juli 1980	asli	3 lembar
592 B	Berkas Penyusunan	10 Agustus 1979 - 30 Juni 1980	tembusan, copy	1 sampul
593	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1980 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1970/1971.			
593 A	Naskah Undang-Undang	5 Juli 1980	asli	3 lembar
593 B	Berkas Penyusunan	10 Agustus 1979 - 5 Juli 1980	tembusan, copy	1 sampul
594	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1980 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1971/1972.			
594 A	Naskah Undang-Undang	5 Juli 1980	asli	3 lembar
594 B	Berkas Penyusunan	10 Agustus 1979 - 5 Juli 1980	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
595	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang.			
595 A	Naskah Undang-Undang	29 Juli 1980	asli	6 lembar
595 B	Berkas Penyusunan	31 Agustus 1978 - 29 Juli 1980	tembusan, copy	1 sampul
596	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin.			
596 A	Naskah Undang-Undang	29 Juli 1980	asli	7 lembar
596 B	Berkas Penyusunan	10 Juli 1979 - 15 September 1980	tembusan, copy	1 sampul
597	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang.			
597 A	Naskah Undang-Undang	29 Juli 1980	asli	6 lembar
597 B	Berkas Penyusunan	10 Juli 1979 - 29 Juli 1980	tembusan, copy	1 sampul
598	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma.			
598 A	Naskah Undang-Undang	2 Agustus 1980	asli	1 sampul
598 B	Berkas Penyusunan	18 Maret - 2 Agustus 1980	tembusan, copy	1 sampul
599	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.			
599 A	Naskah asli	27 Oktober 1980	asli	7 lembar
599 B	Berkas Penyusunan	8 Januari - 27 Oktober 1980	tembusan, copy	1 sampul
600	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tertinggi Negara.			
600 A	Naskah Undang-Undang	26 Desember 1980	asli	1 sampul
600 B	Berkas Penyusunan	1 Maret 1979 - 26 Desember 1980	tembusan, copy	1 sampul
601	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.			
601 A	Naskah Undang-Undang	29 Desember 1980	asli	1 sampul
601 B	Berkas Penyusunan	3 April 1975 - 29 Desember 1980	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
TAHUN 1981				
602	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982.			
602 A	Naskah Undang-Undang	14 Maret 1981	asli	1 sampul
602 B	Berkas Penyusunan	26 Desember 1980 - 14 Maret 1981	tembusan, copy	1 sampul
603	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.			
603 A	Naskah Undang-Undang	01 April 1981	asli	1 sampul
603 B	Berkas Penyusunan	23 Agustus 1977 - 01 April 1981	tembusan, copy	1 sampul
604	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981.			
604 A	Naskah Undang-Undang	26 Juni 1981	asli	1 sampul
604 B	Berkas Penyusunan	24 Maret - 26 Juni 1981	tembusan, copy	1 sampul
605	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1981 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1972/1973.			
605 A	Naskah Undang-Undang	4 Juli 1981	asli	3 lembar
605 B	Berkas Penyusunan	25 Maret - 04 Juli 1981	tembusan, copy	1 sampul
606	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1973/1974.			
606 A	Naskah Undang-Undang	4 Juli 1981	asli	3 lembar
606 B	Berkas Penyusunan	30 Maret - 04 Juli 1981	tembusan, copy	1 sampul
607	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Pemberantasan Uang Palsu beserta Protokol (<i>International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol, Geneve 1929</i>).			
607 A	Naskah Undang-Undang	21 Juli 1981	asli	6 lembar
607 B	Berkas Penyusunan	20 Juli 1972 - 21 Juli 1981	tembusan, copy	1 sampul
608	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan.			
608 A	Naskah Undang-Undang	31 Juli 1981	asli	1 sampul
608 B	Berkas Penyusunan	21 Januari 1980 - 31 Juli 1981	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
609	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.			
609 A	Naskah Undang-Undang	31 Desember 1981	asli	1 sampul
609 B	Berkas Penyusunan	12 September 1979 - 31 Desember 1981	tembusan, copy	1 sampul
TAHUN 1982				
610	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan <i>Konvensi Wina</i> (1961) Mengenai Hubungan Diplomatik dan Pengesahan <i>Konvensi Wina</i> (1963) Mengenai Hubungan Konsuler, beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan.	25 Januari 1982	asli	1 sampul
611	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (<i>Convention On Special Missions, New York 1969</i>).	25 Januari 1982	asli	1 sampul
612	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.			
612 A	Naskah Undang-Undang	1 Februari 1982	asli	1 sampul
612 B	Berkas Penyusunan	20 Juni 1979 - 29 Januari 1982	tembusan, copy	1 sampul
613	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.			
613 A	Naskah Undang-Undang	11 Maret 1982	asli	1 sampul
613 B	Berkas Penyusunan	18 Maret 1980 - 11 Maret 1982	tembusan, copy	1 sampul
614	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1982/1983 beserta lampirannya.			
614 A	Naskah Undang-Undang	11 Maret 1982	asli	1 sampul
614 B	Berkas Penyusunan	26 Desember 1981 - 10 Maret 1982	tembusan, copy	1 sampul
615	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.			
615 A	Naskah Undang-Undang	12 April 1982	asli	1 sampul
615 B	Berkas Penyusunan	29 Desember 1977 - 12 April 1982	tembusan, copy	1 sampul
616	Undang-Undang Nomor 7 tahun 1982 tentang Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982.			
616 A	Naskah Undang-Undang	29 Juni 1982	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
616 B	Berkas Penyusunan	25 Maret - 29 Juni 1982	tembusan, copy	1 sampul
617	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun. 1974/1975.			
617 A	Naskah Undang-Undang	29 Juni 1982	asli	4 lembar
617 B	Berkas Penyusunan	26 maret - 29 Juni 1982	tembusan, copy	1 sampul
618	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1975/1976.			
618 A	Naskah Undang-Undang	29 Juni 1982	asli	4 lembar
618 B	Berkas Penyusunan	26 maret - 29 Juni 1982	tembusan, copy	1 sampul
619	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1976/1977.			
619 A	Naskah Undang-Undang	29 Juni 1982	asli	4 lembar
619 B	Berkas Penyusunan	16 Juni 1981 - 29 Juni 1982	tembusan, copy	1 sampul
620	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1977/1978.			
620 A	Naskah Undang-Undang	29 Juni 1982	asli	4 lembar
620 B	Berkas Penyusunan	16 Juni 1981 - 29 Juni 1982	tembusan, copy	1 sampul
621	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1978/1979.			
621 A	Naskah Undang-Undang	29 Juni 1982	asli	4 lembar
621 B	Berkas Penyusunan	16 Juni 1981 - 29 Juni 1982	tembusan, copy	1 sampul
622	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang.			
622 A	Naskah Undang-Undang	20 Agustus 1982	asli	5 lembar
622 B	Berkas Penyusunan	26 Oktober 1981 - 20 Agustus 1982	tembusan, copy	1 sampul
623	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang.			
623 A	Naskah Undang-Undang	20 Agustus 1982	asli	5 lembar
623 B	Berkas Penyusunan	26 Oktober 1981 - 20 Agustus 1982	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
624	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.			
624 A	Naskah Undang-Undang	20 Agustus 1982	asli	6 lembar
624 B	Berkas Penyusunan	26 Oktober 1981 - 20 Agustus 1982	tembusan, copy	1 sampul
625	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.			
625 A	Naskah Undang-Undang	20 Agustus 1982	asli	5 lembar
625 B	Berkas Penyusunan	26 Oktober 1981 - 20 Agustus 1982	tembusan, copy	1 sampul
626	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin.			
626 A	Naskah Undang-Undang	20 Agustus 1982	asli	5 lembar
626 B	Berkas Penyusunan	26 Oktober 1981 - 20 Agustus 1982	tembusan, copy	1 sampul
627	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado.			
627 A	Naskah Undang-Undang	20 Agustus 1982	asli	5 lembar
627 B	Berkas Penyusunan	26 Oktober 1981 - 20 Agustus 1982	tembusan, copy	1 sampul
628	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang			
628 A	Naskah Undang-Undang	20 Agustus 1982	asli	6 lembar
628 B	Berkas Penyusunan	26 Oktober 1981 - 20 Agustus 1982	tembusan, copy	1 sampul
629	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia			
629 A	Naskah Undang-Undang	19 September 1982	asli	1 sampul
629 B	Berkas Penyusunan	20 Februari - 22 September 1982	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
630	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967.			
630 A	Naskah Undang-Undang	20 September 1982		20 lembar
630 B	Berkas Penyusunan	15 Juli 1981 - 20 September 1982		1 sampul
TAHUN 1983				
631	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Rejim Hukum Negara Nusantara dan Hak-hak Malaysia di Laut Teritorial dan Perairan Nusantara serta Ruang Udara di atas Laut Teritorial Peairan Nusantara dan Wilayah Republik Indonesia yang Terletak diantara Malaysia Timur dan Malaysia Barat.			
631 A	Naskah Undang-Undang	25 Februari 1983	asli	1 sampul
631 B	Berkas Penyusunan	19 Oktober 1982 - 25 Februari 1983	tembusan, copy	1 sampul
632	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984			
632 A	Naskah Undang-Undang	28 Februari 1983	asli	1 sampul
632 B	Berkas Penyusunan	1 Januari - 28 Februari 1983	tembusan, copy	1 sampul
633	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983			
633 A	Naskah Undang-Undang	28 Juni 1983	asli	7 lembar
633 B	Berkas Penyusunan	26 Maret - 28 Juni 1983	tembusan, copy	1 sampul
634	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1983 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1979/1980			
634 A	Naskah Undang-Undang	28 Juni 1983	asli	4 lembar
634 B	Berkas Penyusunan	31 Maret - 28 Juni 1983	tembusan, copy	1 sampul
635	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia			
635 A	Naskah Undang-Undang	18 Oktober 1983	asli	1 sampul
635 B	Berkas Penyusunan	28 Januari 1981- 18 Oktober 1983	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
636	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan			
636 A	Naskah Undang-Undang	31 Desember 1983	asli	1 sampul
636 B	Berkas Penyusunan	24 Oktober - 31 Desember 1983	tembusan, copy	1 sampul
637	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan			
637 A	Naskah Undang-Undang	31 Desember 1983	asli	1 sampul
637 B	Berkas Penyusunan	24 Oktober - 31 Desember 1983	tembusan, copy	1 sampul
638	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah			
638 A	Naskah Undang-Undang	31 Desember 1983	asli	1 sampul
638 B	Berkas Penyusunan	18 Oktober - 31 Desember 1983	tembusan, copy	1 sampul
TAHUN 1984				
639	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985			
639 A	Naskah Undang-Undang	10 Maret 1984	asli	1 sampul
639 B	Berkas Penyusunan	21 Desember 1983 - 10 Maret 1984	tembusan, copy	1 sampul
640	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1980/1981			
640 A	Naskah Undang-Undang	5 Juni 1984	asli	1 sampul
640 B	Berkas Penyusunan	28 Maret - 5 Juni 1984	tembusan, copy	1 sampul
641	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984			
641 A	Naskah Undang-Undang	5 Juni 1984	asli	1 sampul
641 B	Berkas Penyusunan	27 Maret - 5 Juni 1984	tembusan, copy	1 sampul
642	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular			
642 A	Naskah Undang-Undang	22 Juni 1984	asli	1 sampul
642 B	Berkas Penyusunan	2 Oktober 1979 - 22 Juni 1984	tembusan, copy	1 sampul
643	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.			
643 A	Naskah Undang-Undang	29 Juni 1984	asli	1 sampul
643 B	Berkas Penyusunan	24 Juni 1982 - 29 Juni 1984	tembusan, copy	2 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
644	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang POS.			
644 A	Naskah Undang-Undang	21 Juli 1984	asli	1 sampul
644 B	Berkas Penyusunan	5 Agustus 1981 - 21 Juli 1984	tembusan, copy	2 sampul
645	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (<i>Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>).			
645 A	Naskah Undang-Undang	24 Juli 1984	asli	1 sampul
645 B	Berkas Penyusunan	8 Januari 1983 - 24 Juli 1984	tembusan, copy	1 sampul
646	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Menjadi Undang-Undang.			
646 A	Naskah Undang-Undang	27 Oktober 1984	asli	6 lembar
646 B	Berkas Penyusunan	20 Juni - 27 Oktober 1984	tembusan, copy	1 sampul
TAHUN 1985				
647	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 Dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980.			
647 A	Naskah Undang-Undang	7 Januari 1985	asli	1 sampul
647 B	Berkas Penyusunan	5 Oktober 1983 - 8 Januari 1985	tembusan, copy	2 sampul
648	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975.			
648 A	Naskah Undang-Undang	7 Januari 1985	asli	1 sampul
648 B	Berkas Penyusunan	5 Oktober 1983 - 7 Februari 1985	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
649	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik Dan Golongan Karya.			
649 A	Naskah Undang-Undang	19 Februari 1985	asli	8 lembar
649 B	Berkas Penyusunan	5 Oktober 1983 - 21 Maret 1985	tembusan, copy	2 sampul
650	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/ 1986.			
650 A	Naskah Undang-Undang	7 Maret 1985	asli	1 sampul
650 B	Berkas Penyusunan	11 Desember 1984 - 30 Maret 1985	tembusan, copy	1 sampul
651	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum.			
651 A	Naskah Undang-Undang	18 Maret 1985	asli	1 sampul
651 B	Berkas Penyusunan	5 Oktober 1983 - 19 Maret 1985	tembusan, copy	1 sampul
652	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1985 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1981/ 1982.			
652 A	Naskah Undang-Undang	10 Juni 1985	asli	1 sampul
652 B	Berkas Penyusunan	23 Maret - 6 Juni 1985	tembusan, copy	1 sampul
653	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/ 1985.			
653 A	Naskah Undang-Undang	10 Juni 1985	asli	1 sampul
653 B	Berkas Penyusunan	29 Maret - 3 April 1985	tembusan, copy	1 sampul
654	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.			
654 A	Naskah Undang-Undang	17 Juni 1985	asli	1 sampul
654 B	Berkas Penyusunan	5 Oktober 1983 - 17 Juni 1985	tembusan, copy	2 sampul
655	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan			
655 A	Naskah Undang-Undang	19 Juni 1985	asli	1 sampul
655 B	Berkas Penyusunan	5 Juni 1979 - 19 Juni 1985	tembusan, copy	2 sampul
656	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1985 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas Dengan Pelabuhan Bebas Sabang.			
656 A	Naskah Undang-Undang	2 Oktober 1985	asli	7 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
656 B	Berkas Penyusunan	15 Agustus - 4 Oktober 1985	tembusan, copy	1 sampul
657	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (<i>International Telecommunication Convention</i>) Nairobi, 1982.			
657 A	Naskah Undang-Undang	22 Oktober 1985	asli	1 sampul
657 B	Berkas Penyusunan	23 Januari 1985 - 5 Februari 1986	tembusan, copy	1 sampul
658	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.			
658 A	Naskah Undang-Undang	27 Desember 1985	asli	1 sampul
658 B	Berkas Penyusunan	3 Januari 1985 - 14 Januari 1986	tembusan, copy	3 sampul
659	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai			
659 A	Naskah Undang-Undang	27 Desember 1985	asli	1 sampul
659 B	Berkas Penyusunan	11 September - 28 Desember 1985	tembusan, copy	1 sampul
660	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.			
660 A	Naskah Undang-Undang	30 Desember 1985	asli	1 sampul
660 B	Berkas Penyusunan	12 Agustus - 31 Desember 1985	tembusan, copy	3 sampul
661	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.			
661 A	Naskah Undang-Undang	30 Desember 1985	asli	1 sampul
661 B	Berkas Penyusunan	28 Juni 1983 - 31 Desember 1985	tembusan, copy	2 sampul
662	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.			
662 A	Naskah Undang-Undang	31 Desember 1985	asli	1 sampul
662 B	Berkas Penyusunan	18 Februari 1982 - 14 April 1990	tembusan, copy	2 sampul
663	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention On The Law Of The Sea</i> .			
663 A	Naskah Undang-Undang	31 Desember 1985	asli	1 sampul
663 B	Berkas Penyusunan	14 November 1983 - 3 Januari 1986	tembusan, copy	1 sampul
TAHUN 1986				
664	Berkas Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1986 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987	27 Desember 1985 - 7 Maret 1986	tembusan, copy	1 sampul
665	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum			
665 A	Naskah Undang-Undang	8 Maret 1986	asli	1 sampul
665 B	Berkas Penyusunan	12 Agustus 1985 - 8 Maret 1986	tembusan, copy	2 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
666	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1986 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986			
666 A	Naskah Undang-Undang	4 Juni 1986	asli	1 sampul
666 B	Berkas Penyusunan	29 Maret - 4 Juni 1986	tembusan, copy	1 sampul
667	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggarn 1982/1983			
667 A	Naskah Undang-Undang	4 Juni 1986	asli	1 sampul
667 B	Berkas Penyusunan	29 Maret - 4 Juni 1986	tembusan, copy	1 sampul
668	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara			
668 A	Naskah Undang-Undang	29 Desember 1986	asli	1 sampul
668 B	Berkas Penyusunan	19 Agustus 1978 - 29 Desember 1986	tembusan, copy	4 sampul
TAHUN 1987				
669	Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang KADIN.			
669 A	Naskah Undang - Undang	28 Januari 1987	asli	1 sampul
669 B	Berkas Penyusunan	5 Agustus 1986 - 29 januari 1987	tembusan, copy	3 sampul
670	Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pengesahan " <i>Treaty of Mutual Respect, Friendship And Cooperation Between The Republic of Indonesia and The Independent State of Papua New Guinea</i> .			
670 A	Naskah Undang - Undang	21 Februari 1987	asli	1 sampul
670 B	Berkas Penyusunan	29 Desember 1986 - 23 Februari 1987	tembusan, copy	1 sampul
671	Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggggaran 1987/1988.			
671 A	Naskah Undang - Undang	12 Maret 1987	asli	1 sampul
671 B	Berkas Penyusunan	24 Desember 1986 - 14 Maret 1987	tembusan, copy	1 sampul
672	Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987.			
672 A	Naskah Undang - Undang	25 Juli 1987	asli	1 sampul
672 B	Berkas Penyusunan	23 Maret - 28 Juli 1987	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
673	Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1987 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1983/1984.			
673 A	Naskah Undang - Undang	25 Juli 1987	asli	1 sampul
673 B	Berkas Penyusunan	26 Maret - 28 Juli 1987	tembusan, copy	1 sampul
674	Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1987 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1984/1985.			
674 A	Naskah Undang - Undang	25 Juli 1987	asli	1 sampul
674 B	Berkas Penyusunan	25 - 28 Juli 1987	tembusan, copy	1 sampul
675	Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.			
675 A	Naskah Undang - Undang	19 September 1987	asli	1 sampul
675 B	Berkas Penyusunan	15 Juli 1986 - 23 September 1987	tembusan, copy	1 sampul
676	Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol.			
676 A	Naskah Undang - Undang	28 September 1987	asli	1 sampul
676 B	Berkas Penyusunan	9 Juli 1985 - 30 September 1987	tembusan, copy	4 sampul
TAHUN 1988				
677	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.			
677 A	Naskah Undang-Undang	1 Maret 1988	asli	7 lembar
677 B	Berkas Penyusunan	11 November 1987 - 15 Maret 1988	tembusan, copy	1 sampul
678	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.			
678 A	Naskah Undang-Undang	1 Maret 1988	asli	1 sampul
678 B	Berkas Penyusunan	18 November 1986 - 14 Maret 1988	tembusan, copy	1 sampul
679	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989.			
679 A	Naskah Undang-Undang	10 Maret 1988	asli	1 sampul
679 B	Berkas Penyusunan	22 Desember 1987 - 22 Maret 1988	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
680	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pengesahan "Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia".			
680 A	Naskah Undang-Undang	1 Juli 1988	asli	7 lembar
680 B	Berkas Penyusunan	24 Maret - 4 Juli 1988	tembusan, copy	1 sampul
681	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Tambahan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1987/1988.			
681 A	Naskah Undang-Undang	5 Agustus 1988	asli	1 sampul
681 B	Berkas Penyusunan	23 Maret - 10 Agustus 1988	tembusan, copy	1 sampul
682	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1985/1986.			
682 A	Naskah Undang-Undang	5 Agustus 1988	asli	1 sampul
682 B	Berkas Penyusunan	29 Maret - 9 Agustus 1988	tembusan, copy	1 sampul
TAHUN 1989				
683	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990.			
683 A	Naskah Undang - Undang	27 Maret 1989	asli	1 sampul
683 B	Berkas Penyusunan	22 Desember 1988 - 28 Maret 1989	tembusan, copy	1 sampul
684	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.			
684 A	Naskah Undang - Undang	27 Maret 1989	asli	1 sampul
684 B	Berkas Penyusunan	26 Mei 1984 - 14 Januari 1992	tembusan, copy	2 sampul
685	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi.			
685 A	Naskah Undang - Undang	1 April 1989	asli	1 sampul
685 B	Berkas Penyusunan	9 September 1985 - 15 Maret 1989	tembusan, copy	2 sampul
686	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1989 tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989.			
686 A	Naskah Undang - Undang	20 Juli 1989	asli	1 sampul
686 B	Berkas Penyusunan	30 Maret - 25 Juli 1989	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
687	Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1986/1987.			
687 A	Naskah Undang - Undang	20 Juli 1989	asli	1 sampul
687 B	Berkas Penyusunan	30 Maret - 25 Juli 1989	tembusan, copy	1 sampul
688	Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.			
688 A	Naskah Undang - Undang	01 November 1989	asli	1 sampul
688 B	Berkas Penyusunan	24 April 1986 - 24 Oktober 1989	tembusan, copy	1 sampul
689	Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.			
689 A	Naskah Undang - Undang	29 Desember 1989	asli	1 sampul
689 B	Berkas Penyusunan	31 Agustus 1971 - 11 Desember 1989	tembusan, copy	2 sampul
TAHUN 1990				
690	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991.			
690 A	Naskah Undang-Undang	14 Maret 1990	asli	1 sampul
690 B	Berkas Penyusunan	28 Desember 1989 - 23 Mei 1990	tembusan, copy	1 sampul
691	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1990 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990.			
691 A	Naskah Undang-Undang	19 Juli 1990	asli	1 sampul
691 B	Berkas Penyusunan	19 Maret - 19 Juli 1990	tembusan, copy	1 sampul
692	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1990 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1987/1988.			
692 A	Naskah Undang-Undang	19 Juli 1990	asli	1 sampul
692 B	Berkas Penyusunan	26 Maret - 24 Juli 1990	tembusan, copy	1 sampul
693	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.			
693 A	Naskah Undang-Undang	9 Agustus 1990	asli	1 sampul
693 B	Berkas Penyusunan	30 Juli 1983 - 11 Agustus 1990	tembusan, copy	1 sampul
694	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.			
694 A	Naskah Undang-Undang	10 Agustus 1990	asli	1 sampul
694 B	Berkas Penyusunan	9 November 1989 - 11 Agustus 1990	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
695	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah.			
695 A	Naskah Undang-Undang	15 Agustus 1990	asli	1 sampul
695 B	Berkas Penyusunan	13 April 1987 - 15 Agustus 1990	tembusan, copy	1 sampul
696	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung.			
696 A	Naskah Undang-Undang	15 Agustus 1990	asli	1 sampul
696 B	Berkas Penyusunan	13 April 1987 - 15 Agustus 1990	tembusan, copy	1 sampul
697	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.			
697 A	Naskah Undang-Undang	13 Oktober 1990	asli	1 sampul
697 B	Berkas Penyusunan	22 Februari 1983 - 13 Oktober 1990	tembusan, copy	1 sampul
698	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan			
698 A	Naskah Undang-Undang	18 Oktober 1990	asli	1 sampul
698 B	Berkas Penyusunan	12 Januari 1989 - 20 Oktober 1990	tembusan, copy	1 sampul
699	Berkas Penyusunan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang.	27 Februari - 31 Oktober 1990	tembusan, copy	1 sampul
700	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.			
700 A	Naskah Undang-Undang	14 November 1990	asli	1 sampul
700 B	Berkas Penyusunan	24 November 1980 - 14 November 1990	tembusan, copy	1 sampul
TAHUN 1991				
701	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pengesahan " <i>Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on the Zone Of Cooperation In An Area Between The Indonesian Province Of East Timor and Northern Australia</i> " (Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Zona Kerjasama di Daerah Antara Propinsi Timor Timur dan Australia Bagian Utara).			

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
701 A	Naskah Undang-Undang	7 Januari 1991	asli	1 sampul
701 B	Berkas Penyusunan	14 September 1988 - 9 Januari 1991	tembusan, copy	1 sampul
702	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/92.			
702 A	Naskah Undang-Undang	20 Maret 1991	asli	1 sampul
702 B	Berkas Penyusunan	2 Januari - 23 Maret 1991	tembusan, copy	1 sampul
703	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1991 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991.			
703 A	Naskah Undang-Undang	18 Juli 1991	asli	1 sampul
703 B	Berkas Penyusunan	21 Maret - 25 Juli 1991	tembusan, copy	1 sampul
704	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1988/1989.			
704 A	Naskah Undang-Undang	18 Juli 1991	asli	1 sampul
704 B	Berkas Penyusunan	23 Maret - 25 Juli 1991	tembusan, copy	1 sampul
705	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.			
705 A	Naskah Undang-Undang	22 Juli 1991	asli	1 sampul
705 B	Berkas Penyusunan	30 Juli 1985 - 22 Juli 1991	tembusan, copy	2 sampul
706	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.			
706 A	Naskah Undang-Undang	16 Juli 1991	asli	1 sampul
706 B	Berkas Penyusunan	16 Januari 1985 - 16 Agustus 1991	tembusan, copy	
707	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.			
707 A	Naskah Undang-Undang	30 Desember 1991	asli	1 sampul
707 B	Berkas Penyusunan	18 Februari - 31 Desember 1991	tembusan, copy	1 sampul
TAHUN 1992				
708	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.			
708 A	Naskah Undang-Undang	15 Januari 1992	asli	1 sampul
708 B	Berkas Penyusunan	9 Maret 1991 - 8 Januari 1992	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
709	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.			
709 A	Naskah Undang-Undang	11 Februari 1992	asli	1 sampul
709 B	Berkas Penyusunan	8 Mei 1987 - 9 November 1990	tembusan, copy	2 sampul
710	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.			
710 A	Naskah Undang-Undang	17 Februari 1992	asli	1 sampul
710 B	Berkas Penyusunan	28 Januari 1986 - 20 Februari 1992	tembusan, copy	1 sampul
711	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.			
711 A	Naskah Undang-Undang	10 Maret 1992	asli	1 sampul
711 B	Berkas Penyusunan	4 November 1986 - 4 Maret 1992	tembusan, copy	1 sampul
712	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.			
712 A	Naskah Undang-Undang	21 Maret 1992	asli	1 sampul
712 B	Berkas Penyusunan	31 Agustus 1982 - 21 Maret 1992	tembusan, copy	1 sampul
713	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/93.			
713 A	Naskah Undang-Undang	23 Maret 1992	asli	1 sampul
713 B	Berkas Penyusunan	31 Desember 1991 - 25 Maret 1992	tembusan, copy	1 sampul
714	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.			
714 A	Naskah Undang-Undang	25 Maret 1992	asli	1 sampul
714 B	Berkas Penyusunan	9 Januari 1991 - 26 Maret 1992	tembusan, copy	5 sampul
715	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman.			
715 A	Naskah Undang-Undang	30 Maret 1992	asli	1 sampul
715 B	Berkas Penyusunan	24 Oktober 1990 - 30 Maret 1992	tembusan, copy	1 sampul
716	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.			
716 A	Naskah Undang-Undang	31 Maret 1992	asli	1 sampul
716 B	Berkas Penyusunan	12 April 1978 - 1 April 1992	tembusan, copy	1 sampul
717	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.			
717 A	Naskah Undang-Undang	16 April 1992	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
717 B	Berkas Penyusunan	15 Februari 1978 - 1 Mei 1992	tembusan, copy	1 sampul
718	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.			
718 A	Naskah Undang-Undang	20 April 1992	asli	1 sampul
718 B	Berkas Penyusunan	18 Januari 1984 - 16 April 1992	tembusan, copy	3 sampul
719	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.			
719 A	Naskah Undang-Undang	30 April 1992	asli	1 sampul
719 B	Berkas Penyusunan	8 Maret 1990 - 5 Mei 1992	tembusan, copy	1 sampul
720	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian.			
720 A	Naskah Undang-Undang	11 Mei 1992	asli	1 sampul
720 B	Berkas Penyusunan	2 April - 14 Mei 1992	tembusan, copy	1 sampul
721	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.			
721 A	Naskah Undang-Undang	12 Mei 1992	asli	1 sampul
721 B	Berkas Penyusunan	2 April 1992 - 18 Oktober 1993	tembusan, copy	1 sampul
722	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.			
722 A	Naskah Undang-Undang	25 Mei 1992	asli	1 sampul
722 B	Berkas Penyusunan	31 Maret 1984 - 30 Juni 1992	tembusan, copy	1 sampul
723	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.			
723 A	Naskah Undang-Undang	8 Juni 1992	asli	1 sampul
723 B	Berkas Penyusunan	5 Desember 1983 - 8 Juni 1992	tembusan, copy	1 sampul
724	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1992 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/92.			
724 A	Naskah Undang-Undang	24 Agustus 1992	asli	1 sampul
724 B	Berkas Penyusunan	23 Maret - 25 Agustus 1992	tembusan, copy	1 sampul
725	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1992 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1989/1990.			
725 A	Naskah Undang-Undang	24 Agustus 1992	asli	1 sampul
725 B	Berkas Penyusunan	23 Maret - 15 Agustus 1992	tembusan, copy	1 sampul
726	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.			

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
726 A	Naskah Undang-Undang	28 Agustus 1992	asli	1 sampul
726 B	Berkas Penyusunan	19 Agustus 1988 - 28 Agustus 1992	tembusan, copy	1 sampul
727	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, di Bandar Lampung, dan di Jambi.			
727 A	Naskah Undang-Undang	31 Agustus 1982	asli	1 sampul
727 B	Berkas Penyusunan	9 Juli 1984 - 1 September 1992	tembusan, copy	1 sampul
728	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.			
728 A	Naskah Undang-Undang	17 September 1992	asli	1 sampul
728 B	Berkas Penyusunan	4 Agustus - 16 September 1992	tembusan, copy	1 sampul
729	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi Undang-Undang.			
729 A	Naskah Undang-Undang	17 September 1992	asli	1 sampul
729 B	Berkas Penyusunan	2 September - 27 September 1992	tembusan, copy	1 sampul
730	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.			
730 A	Naskah Undang-Undang	17 September 1992	asli	1 sampul
730 B	Berkas Penyusunan	14 Maret 1984 - 27 September 1991	tembusan, copy	3 sampul
731	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.			
731 A	Naskah Undang-Undang	13 Oktober 1992	asli	1 sampul
731 B	Berkas Penyusunan	23 Juli 1986 - 21 Oktober 1992	tembusan, copy	2 sampul
732	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.			
732 A	Naskah Undang-Undang	21 Oktober 1992	asli	1 sampul
732 B	Berkas Penyusunan	2 Desember 1989 - 16 Oktober 1992	tembusan, copy	1 sampul
TAHUN 1993				
733	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.			
733 A	Naskah Undang-Undang	11 Februari 1993	asli	1 sampul
733 B	Berkas Penyusunan	2 September 1992 - 12 Februari 1993	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
734	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.			
734 A	Naskah Undang-Undang	27 Februari 1993	asli	1 sampul
734 B	Berkas Penyusunan	14 September 1992 - 2 Maret 1993	tembusan, copy	1 sampul
735	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94.			
735 A	Naskah Undang-Undang	10 Maret 1993	asli	1 sampul
735 B	Berkas Penyusunan	30 Desember 1992 - 13 Maret 1993	tembusan, copy	1 sampul
736	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram.			
736 A	Naskah Undang-Undang	26 Juli 1993	asli	1 sampul
736 B	Berkas Penyusunan	18 Februari 1992 - 5 Desember 1995	tembusan, copy	1 sampul
737	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1993 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/93.			
737 A	Naskah Undang-Undang	30 Juli 1993	asli	1 sampul
737 B	Berkas Penyusunan	20 Maret - 31 Juli 1993	tembusan, copy	1 sampul
738	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura.			
738 A	Naskah Undang-Undang	2 Agustus 1993	asli	1 sampul
738 B	Berkas Penyusunan	19 November 1991 - 5 Agustus 1993	tembusan, copy	1 sampul
739	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1990/1991.			
739 A	Naskah Undang-Undang	2 Agustus 1993	asli	1 sampul
739 B	Berkas Penyusunan	25 Februari - 4 Agustus 1993	tembusan, copy	1 sampul
TAHUN 1994				
740	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995.			
740 A	Naskah Undang-Undang	22 Maret 1994	asli	1 sampul
740 B	Berkas Penyusunan	30 Desember 1993 - 23 Maret 1994	ali, salinan	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
741	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1994 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994.			
741 A	Naskah Undang-Undang	22 April 1994	asli	1 sampul
741 B	Berkas Penyusunan	25 Februari 1994 - 21 April 1994	tembusan, copy	1 sampul
742	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1994 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1991/1992.			
742 A	Naskah Undang-Undang	18 Juli 1994	asli	1 sampul
742 B	Berkas Penyusunan	21 Desember 1993 - 20 Juli 1994	tembusan, copy	1 sampul
743	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu.			
743 A	Naskah Undang-Undang	22 Juli 1994	asli	1 sampul
743 B	Berkas Penyusunan	15 Januari 1993 - 15 Juni 1994	tembusan, copy	1 sampul
744	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>United Nations Convension on Biological Diversity</i> (Konvensi Perserikatan bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati).			
744 A	Naskah Undang-Undang	1 Agustus 1994	asli	1 sampul
744 B	Berkas Penyusunan	23 Februari - 2 Agustus 1994	tembusan, copy	1 sampul
745	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i> (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).			
745 A	Naskah Undang-Undang	1 Agustus 1994	asli	1 sampul
745 B	Berkas Penyusunan	5 Pebruari - 2 Agustus 1994	tembusan, copy	1 sampul
746	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>Agreement Establishing the World Trade Organization</i> (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).			
746 A	Naskah Undang-Undang	2 November 1994	asli	1 sampul
746 B	Berkas Penyusunan	4 Maret - 10 November 1994	tembusan, copy	1 sampul
747	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstrasidi antara Republik Indonesia dan Australia.			
747 A	Naskah Undang-Undang	02 November 1994	asli, lampiran	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
747 B	Berkas Penyusunan	8 Juni - 23 Oktober 1993	tembusan, copy	1 sampul
748	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.			
748 A	Naskah Undang-Undang	9 November 1994	asli	1 sampul
748 B	Berkas Penyusunan	25 Maret - 14 Oktober 1994	tembusan, copy	1 sampul
749	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991.			
749 A	Naskah Undang-Undang	9 November 1994	asli	1 sampul
749 B	Berkas Penyusunan	25 Maret - 28 Oktober 1994	tembusan, copy	1 sampul
750	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Tambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.			
750 A	Naskah Undang-Undang	9 November 1994	asli	1 sampul
750 B	Berkas Penyusunan	8 September - 23 Desember 1994	tembusan, copy	1 sampul
751	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.			
751 A	Naskah Undang-Undang	9 November 1994	asli	1 sampul
751 B	Berkas Penyusunan	7 Januari - 5 April 1986	tembusan, copy	1 sampul
TAHUN 1995				
752	Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.			
752 A	Naskah Undang - Undang	7 Maret 1995	asli	1 sampul
752 B	Berkas Penyusunan	26 Juli 1991 - 10 Maret 1995	tembusan, copy	1 sampul
753	Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996.			
753 A	Naskah Undang - Undang	31 Maret 1995	asli	1 sampul
753 B	Berkas Penyusunan	3 Januari - 31 Maret 1995	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
754	Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, di Palu, di Kendari dan di Kupang.			
754 A	Naskah Undang - Undang	27 April 1995	asli	1 sampul
754 B	Berkas Penyusunan	21 - 27 Aapril 1995	tembusan, copy	1 sampul
755	Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Tambahan dn Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995.			
755 A	Naskah Undang - Undang	27 April 1995	asli	1 sampul
755 B	Berkas Penyusunan	7 Maret - 27 April 1995	tembusan, copy	1 sampul
756	Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1985.			
756 A	Naskah Undang - Undang	3 Juli 1995	asli	1 sampul
756 B	Berkas Penyusunan	26 April - 5 Juli 1995	tembusan, copy	1 sampul
757	Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari.			
757 A	Naskah Undang - Undang	3 Agustus 1995	asli	1 sampul
757 B	Berkas Penyusunan	22 April 1994 - 8 Agustus 1995	tembusan, copy	1 sampul
758	Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1992/1993.			
758 A	Naskah Undang - Undang	24 Agustus 1995	asli	1 sampul
758 B	Berkas Penyusunan	31 Oktober 1994 - 29 Agustus 1995	tembusan, copy	1 sampul
759	Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.			
759 A	Naskah Undang - Undang	10 Nopember 1995	asli	1 sampul
759 B	Berkas Penyusunan	3 Oktober - 15 Nopember 1995	tembusan, copy	1 sampul
760	Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.			
760 A	Naskah Undang - Undang	26 Desember 1995	asli	1 sampul
760 B	Berkas Penyusunan	18 Mei 1991 - 27 Desember 1995	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
761	Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.			
761 A	Naskah Undang - Undang	30 Desember 1995	asli	1 sampul
761 B	Berkas Penyusunan	25 Februari 1995 - 25 Juli 1996	tembusan, copy	1 sampul
762	Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.			
762 A	Naskah Undang - Undang	30 Desember 1995	asli	1 sampul
762 B	Berkas Penyusunan	8 Maret - 11 Desember 1995	tembusan, copy	1 sampul
763	Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.			
763 A	Naskah Undang - Undang	30 Desember 1995	asli	1 sampul
763 B	Berkas Penyusunan	8 Desember 1990 - 28 Desember 1995	tembusan, copy	1 sampul
764	Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1995 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1993/1994.			
764 A	Naskah Undang - Undang	30 Desember 1995	asli	1 sampul
764 B	Berkas Penyusunan	28 September 1995 - 10 Januari 1996	tembusan, copy	1 sampul
TAHUN 1996				
765	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Dili.			
765 A	Naskah Undang-Undang	8 Januari 1996	asli	7 lembar
765 B	Berkas Penyusunan	26 Juli 1995 - 11 Januari 1996	tembusan, copy	1 sampul
766	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997.			
766 A	Naskah Undang-Undang	22 Maret 1996	asli	1 sampul
766 B	Berkas Penyusunan	27 Desember 1995 - 27 Maret 1996	tembusan, copy	1 sampul
767	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96.			
767 A	Naskah Undang-Undang	02 April 1996	asli	1 sampul
767 B	Berkas Penyusunan	16 Februari - 10 April 1996	tembusan, copy	1 sampul
768	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah.			
768 A	Naskah Undang-Undang	09 April 1996	asli	1 sampul
768 B	Berkas Penyusunan	15 Oktober 1990 - 16 April 1996	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
769	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.			
769 A	Naskah Undang-Undang	11 April 1996	asli	1 sampul
769 B	Berkas Penyusunan	6 November 1995 - 16 April 1996	asli	1 sampul
770	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.			
770 A	Naskah Undang-Undang	8 Agustus 1996	asli	1 sampul
770 B	Berkas Penyusunan	08 November 1995 - 15 Agustus 1996	tembusan, copy	1 sampul
771	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.			
771 A	Naskah Undang-Undang	04 November 1996	asli	1 sampul
771 B	Berkas Penyusunan	4 April 1995 - 5 November 1996	tembusan, copy	1 sampul
772	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan <i>Convention On Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971)</i> .			
772 A	Naskah Undang-Undang	07 November 1996	asli	1 sampul
772 B	Berkas Penyusunan	30 Agustus 1995 - 12 November 1996	tembusan, copy	1 sampul
773	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.			
773 A	Naskah Undang-Undang	16 Desember 1996	asli	1 sampul
773 B	Berkas Penyusunan	20 September - 18 Desember 1996	asli	1 sampul
TAHUN 1997				
774	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995.			
774 A	Naskah Undang-Undang	3 Januari 1997	asli	1 sampul
774 B	Berkas Penyusunan	10 September - 19 Desember 1996	tembusan, copy	1 sampul
775	Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.			
775 A	Naskah Undang-Undang	3 Januari 1997	asli	1 sampul
775 B	Berkas Penyusunan	3 Desember 1996 - 6 Januari 1997	tembusan, copy	1 sampul
776	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.			
776 A	Naskah Undang-Undang	3 Januari 1997	asli	1 sampul
776 B	Berkas Penyusunan	9 Mei 1994 - 6 Januari 1997	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
777	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.			
777 A	Naskah Undang-Undang	28 Februari 1997	asli	1 sampul
777 B	Berkas Penyusunan	23 Desember 1993 - 26 Maret 1996	tembusan, copy	1 sampul
778	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.			
778 A	Naskah Undang-Undang	11 Maret 1997	asli	1 sampul
778 B	Berkas Penyusunan	16 April 1981 - 13 Maret 1997	tembusan, copy	1 sampul
779	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998.			
779 A	Naskah Undang-Undang	18 Maret 1997	asli	1 sampul
779 B	Berkas Penyusunan	31 Desember 1996 - 19 Maret 1997	tembusan, copy	1 sampul
780	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).			
780 A	Naskah Undang-Undang	24 Maret 1997	asli	1 sampul
780 B	Berkas Penyusunan	14 Juni 1995 - 25 Maret 1997	tembusan, copy	1 sampul
781	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.			
781 A	Naskah Undang-Undang	24 Maret 1997	asli	1 sampul
781 B	Berkas Penyusunan	4 Mei 1994 - 26 Maret 1997	tembusan, copy	1 sampul
782	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pengesahan <i>Treaty The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone</i> (Traktan Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara).			
782 A	Naskah Undang-Undang	02 April 1997	asli	1 sampul
782 B	Berkas Penyusunan	16 September 1996 - 3 April 1997	tembusan, copy	1 sampul
783	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.			
783 A	Naskah Undang-Undang	10 April 1997	asli	1 sampul
783 B	Berkas Penyusunan	4 September 1995 - 16 April 1997	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
784	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997.			
784 A	Naskah Undang-Undang	29 April 1997	asli	1 sampul
784 B	Berkas Penyusunan	26 Februari 1997 - 15 Mei 1997	tembusan, copy	1 sampul
785	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.			
785 A	Naskah Undang-Undang	7 Mei 1997	asli	1 sampul
785 B	Berkas Penyusunan	2 Desember 1996 - 9 Mei 1997	tembusan, copy	1 sampul
786	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten.			
786 A	Naskah Undang-Undang	7 Mei 1997	asli	1 sampul
786 B	Berkas Penyusunan	9 Mei 1997	tembusan	1 sampul
787	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.			
787 A	Naskah Undang-Undang	7 Mei 1997	asli	1 sampul
787 B	Berkas Penyusunan	9 Mei 1997	tembusan	1 sampul
788	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.			
788 A	Naskah Undang-Undang	9 Mei 1997	asli	1 sampul
788 B	Berkas Penyusunan	8 Maret 1993 - 12 Mei 1997	asli	1 sampul
789	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.			
789 A	Naskah Undang-Undang	19 Mei 1997	asli	1 sampul
789 B	Berkas Penyusunan	5 Februari 1996 - 20 Mei 1997	tembusan, copy	1 sampul
790	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak .			
790 A	Naskah Undang-Undang	23 Mei 1997	asli	1 sampul
790 B	Berkas Penyusunan	28 April 1997 - 28 Mei 1997	tembusan, copy	1 sampul
791	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.			

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
791 A	Naskah Undang-Undang	23 Mei 1997	asli	1 sampul
791 B	Berkas Penyusunan	6 Januari 1997	tembusan, copy	1 sampul
792	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.			
792 A	Naskah Undang-Undang	23 Mei 1997	asli	1 sampul
792 B	Berkas Penyusunan	23 Mei 1997	tembusan, copy	1 sampul
793	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.			
793 A	Naskah Undang-Undang	23 Mei 1997	asli	1 sampul
793 B	Berkas Penyusunan	19 Juni 1995 - 28 Mei 1997	tembusan, copy	1 sampul
794	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.			
794 A	Naskah Undang-Undang	29 Mei 1997	asli	1 sampul
794 B	Berkas Penyusunan	21 Mei 1997- 30 Mei 1997	tembusan, copy	1 sampul
795	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.			
795 A	Naskah Undang-Undang	1 September 1997	asli	1 sampul
795 B	Berkas Penyusunan	3 Mei 1990 - 4 September 1997	tembusan, copy	1 sampul
796	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup			
796 A	Naskah Undang-Undang	19 September 1997	asli	1 sampul
796 B	Berkas Penyusunan	15 September - 26 September 1997	tembusan, copy	1 sampul
797	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran.			
797 A	Naskah Undang-Undang	29 September 1997	asli	1 sampul
797 B	Berkas Penyusunan	1 Maret 1996 - 30 September 1997	tembusan, copy	1 sampul
798	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.			
798 A	Naskah Undang-Undang	3 Oktober 1997	asli	1 sampul
798 B	Berkas Penyusunan	19 Juni 1995 - 7 Oktober 1997	tembusan, copy	3 sampul
799	Undang-Undang Nomor 26 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.			
799 A	Naskah Undang-Undang	3 Oktober 1997	asli	1 sampul
799 B	Berkas Penyusunan	29 Oktober 1996 - 1 November 1996	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
800	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi.			
800 A	Naskah Undang-Undang	3 Oktober 1997	asli	1 sampul
800 B	Berkas Penyusunan	18 Agustus 1994 - 7 Oktober 1997	tembusan, copy	1 sampul
801	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.			
801 A	Naskah Undang-Undang	7 Oktober 1997	asli	1 sampul
801 B	Berkas Penyusunan	1 Juli 1996 - 8 Oktober 1997	tembusan, copy	1 sampul
802	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pembentukan KotaMadya Daerah Tingkat II Tarakan.			
802 A	Naskah Undang-Undang	8 Oktober 1997	asli	1 sampul
802 B	Berkas Penyusunan	14 Agustus 1997 - 13 Oktober 1997	tembusan, copy	1 sampul
803	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1997 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1995/1996.			
803 A	Naskah Undang-Undang	8 Oktober 1997	asli	1 sampul
803 B	Berkas Penyusunan	7 Maret 1997 - 13 Agustus 1997	tembusan, copy	1sampil
804	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.			
804 A	Naskah Undang-Undang	15 Oktober 1997	asli	1 sampul
804 B	Berkas Penyusunan	18 November 1993 - 20 Oktober 1997	tembusan, copy	1 sampul
805	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.			
805 A	Naskah Undang-Undang	5 Desember 1997	asli	1 sampul
805 B	Berkas Penyusunan	9 Juli 1991 - 11 Desember 1997	asli	3 sampul
TAHUN 1998				
806	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Penangguhan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menjadi Undang-Undang.			
806 A	Naskah Undang-Undang	16 Februari 1998	asli	7 lembar
806 B	Berkas Penyusunan	05 Januari - 18 Februari 1998	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
807	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998.			
807 A	Naskah Undang-Undang	13 Maret 1998	asli	1 sampul
807 B	Berkas Penyusunan	28 Januari - 13 Maret 1998	tembusan, copy	1 sampul
808	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999.			
808 A	Naskah Undang-Undang	13 Maret 1998	asli	1 sampul
808 B	Berkas Penyusunan	30 Desember 1997 - 17 Maret 1998	tembusan, copy	1 sampul
809	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.			
809 A	Naskah Undang-Undang	22 April 1998	asli	1 sampul
809 B	Berkas Penyusunan	15 Juni - 16 September 1998	tembusan, copy	1 sampul
810	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan <i>Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i> (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).			
810 A	Naskah Undang-Undang	28 September 1998	asli	1 sampul
810 B	Berkas Penyusunan	08 Juli - 02 Oktober 1998	tembusan, copy	1 sampul
811	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan <i>Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction</i> (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang Pemusnahannya).			
811 A	Naskah Undang-Undang	30 September 1998	asli	1 sampul
811 B	Berkas Penyusunan	22 Oktober 1997 - 02 Oktober 1998	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
812	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999.			
812 A	Naskah Undang-Undang	1 Oktober 1998	asli	1 sampul
812 B	Berkas Penyusunan	09 Juli - 02 Oktober 1998	tembusan, copy	1 sampul
813	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997.			
813 A	Naskah Undang-Undang	1 Oktober 1998	asli	1 sampul
813 B	Berkas Penyusunan	31 Desember 1997 - 02 Oktober 1998	tembusan, copy	1 sampul
814	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.			
814 A	Naskah Undang-Undang	26 Oktober 1998	asli	1 sampul
814 B	Berkas Penyusunan	29 Juli - 27 Oktober 1998	tembusan, copy	1 sampul
815	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.			
815 A	Naskah Undang-Undang	10 November 1998	asli	1 sampul
815 B	Berkas Penyusunan	19 Mei - 10 November 1998	tembusan, copy	1 sampul
816	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.			
816 A	Naskah Undang-Undang	10 November 1998	asli	8 lembar
816 B	Berkas Penyusunan	19 Agustus - 10 November 1998	tembusan, copy	1 sampul
817	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal.			
817 A	Naskah Undang-Undang	23 November 1998	asli	1 sampul
817 B	Berkas Penyusunan	13 Februari - 27 November 1998	tembusan, copy	1 sampul
818	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.			
818 A	Naskah Undang-Undang	30 November 1998	asli	1 sampul
818 B	Berkas Penyusunan	06 Mei 1996 - 02 Desember 1998	tembusan, copy	1 sampul
TAHUN 1999				

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
819	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam masalah Pidana (<i>Treaty Between The Republic Of Indonesia and Australia On Mutual Assistance In Criminal Matters</i>).			
819 A	Naskah Undang-Undang	27 Januari 1999	asli	1 sampul
819 B	Berkas Penyusunan	4 Februari 1998 - 29 Januari 1999	tembusan, copy	1 sampul
820	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.			
820 A	Naskah Undang-Undang	1 Februari 1999	asli	1 sampul
820 B	Berkas Penyusunan	25 Agustus 1998 - 2 Februari 1999	tembusan, copy	1 sampul
821	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.			
821 A	Naskah Undang-Undang	1 Februari 1999	asli	1 sampul
821 B	Berkas Penyusunan	30 Januari - 1 Februari 1999	tembusan	1 sampul
822	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.			
822 A	Naskah Undang-Undang	1 Februari 1999	asli	1 sampul
822 B	Berkas Penyusunan	30 Januari - 1 Februari 1999	tembusan	1 sampul
823	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.			
823 A	Naskah Undang-Undang	5 Maret 1999	asli	1 sampul
823 B	Berkas Penyusunan	8 Januari 1992 - 5 Maret 1999	asli , copy	1 sampul
824	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang <i>Referendum</i> .			
824 A	Naskah Undang-Undang	23 Maret 1999	asli	6 lembar
824 B	Berkas Penyusunan	4 Februari - 23 Maret 1999	tembusan, copy	1 sampul
825	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000.			
825 A	Naskah Undang-Undang	29 Maret 1999	asli	1 sampul
825 B	Berkas Penyusunan	29 Desember 1998 - 30 Maret 1999	tembusan, copy	1 sampul
826	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.			
826 A	Naskah Undang-Undang	20 April 1999	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
826 B	Berkas Penyusunan	25 November 1996 - 15 April 1999	tembusan, copy	1 sampul
827	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru.			
827 A	Naskah Undang-Undang	20 April 1999	asli	1 sampul
827 B	Berkas Penyusunan	22 Februari - 20 April 1999	tembusan, copy	1 sampul
828	Undang-Undang Nomor 10 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang.			
828 A	Naskah Undang-Undang	20 April 1999	asli	1 sampul
828 B	Berkas Penyusunan	20 April 1999	tembusan	1 sampul
829	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate.			
829 A	Naskah Undang-Undang	20 April 1999	asli	1 sampul
829 B	Berkas Penyusunan	20 April 1999	tembusan	1 sampul
830	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur.			
830 A	Naskah Undang-Undang	20 April 1999	asli	1 sampul
830 B	Berkas Penyusunan	20 April 1999	tembusan	1 sampul
831	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara.			
831 A	Naskah Undang-Undang	20 April 1999	asli	1 sampul
831 B	Berkas Penyusunan	20 April 1999	tembusan	1 sampul
832	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil.			
832 A	Naskah Undang-Undang	20 April 1999	asli	1 sampul
832 B	Berkas Penyusunan	20 April 1999	tembusan	1 sampul
833	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya daerah Tingkat II Cilegon.			
833 A	Naskah Undang-Undang	20 April 1999	asli	1 sampul
833 B	Berkas Penyusunan	20 April 1999	tembusan	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
834	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai.			
834 A	Naskah Undang-Undang	20 April 1999	asli	1 sampul
834 B	Berkas Penyusunan	20 April 1999	tembusan	1 sampul
835	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.			
835 A	Naskah Undang-Undang	3 Mei 1999	asli	1 sampul
835 B	Berkas Penyusunan	4 Februari - 3 Mei 1999	tembusan, copy	1 sampul
836	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.			
836 A	Naskah Undang-Undang	7 Mei 1999	asli	1 sampul
836 B	Berkas Penyusunan	28 Desember 1995 - 11 Mei 1999	tembusan, copy	1 sampul
837	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 105 <i>Concerning The Abolition Of Forced Labour</i> (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa).			
837 A	Naskah Undang-Undang	7 Mei 1999	asli	1 sampul
837 B	Berkas Penyusunan	20 November 1998 - 11 Mei 1999	asli	1 sampul
838	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 <i>Concerning Minimum Age For Admission To Employment</i> (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja).			
838 A	Naskah Undang-Undang	7 Mei 1999	asli	1 sampul
838 B	Berkas Penyusunan	29 November 1996 - 11 Mei 1999	asli	1 sampul
839	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 <i>Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation</i> (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan).			
839 A	Naskah Undang-Undang	7 Mei 1999	asli	1 sampul
839 B	Berkas Penyusunan	11 Februari - 11 Mei 1999	asli	1 sampul
840	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.			
840 A	Naskah Undang-Undang	7 Mei 1999	asli	1 sampul
840 B	Berkas Penyusunan	29 Desember 1998 - 11 Mei 1999	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
841	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.			
841 A	Naskah Undang-Undang	17 Mei 1999	asli	1 sampul
841 B	Berkas Penyusunan	1 April 1985 - 17 Mei 1999	tembusan, copy	1 sampul
842	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.			
842 A	Naskah Undang-Undang	17 Mei 1999	asli	1 sampul
842 B	Berkas Penyusunan	6 Agustus 1998 - 20 Mei 1999	tembusan, copy	1 sampul
843	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.			
843 A	Naskah Undang-Undang	19 Mei 1999	asli	1 sampul
843 B	Berkas Penyusunan	8 Februari - 20 Mei 1999	tembusan, copy	1 sampul
844	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.			
844 A	Naskah Undang-Undang	19 Mei 1999	asli	6 lembar
844 B	Berkas Penyusunan	8 Februari - 20 Mei 1999	tembusan, copy	1 sampul
845	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.			
845 A	Naskah Undang-Undang	19 Mei 1999	asli	1 sampul
845 B	Berkas Penyusunan	8 Februari - 19 Mei 1999	tembusan	1 sampul
846	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari <i>Korupsi, Kolusi</i> , dan <i>Nepotisme</i> .			
846 A	Naskah Undang-Undang	19 Mei 1999	asli	1 sampul
846 B	Berkas Penyusunan	25 Januari - 19 Mei 1999	tembusan, copy	1 sampul
847	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan <i>International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965</i> (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965).			
847 A	Naskah Undang-Undang	25 Mei 1999	asli	1 sampul
847 B	Berkas Penyusunan	25 September 1998 - 1 Juni 1999	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
848	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang <i>Arbitrase</i> dan <i>Alternatif</i> Penyelesaian Sengketa.			
848 A	Naskah Undang-Undang	12 Agustus 1999	asli	1 sampul
848 B	Berkas Penyusunan	28 Januari - 13 Agustus 1999	tembusan, copy	1 sampul
849	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.			
849 A	Naskah Undang-Undang	16 Agustus 1999	asli	1 sampul
849 B	Berkas Penyusunan	24 Desember 1998 - 18 Agustus 1999	tembusan, copy	1 sampul
850	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998.			
850 A	Naskah Undang-Undang	23 Agustus 1999	asli	1 sampul
850 B	Berkas Penyusunan	2 Maret - 24 Agustus 1999	tembusan, copy	1 sampul
851	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998.			
851 A	Naskah Undang-Undang	23 Agustus 1999	asli	1 sampul
851 B	Berkas Penyusunan	9 November 1998 - 24 Agustus 1999	tembusan, copy	1 sampul
852	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.			
852 A	Naskah Undang-Undang	31 Agustus 1999	asli	1 sampul
852 B	Berkas Penyusunan	9 Maret - 1 September 1999	tembusan, copy	1 sampul
853	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.			
853 A	Naskah Undang-Undang	31 Agustus 1999	asli	1 sampul
853 B	Berkas Penyusunan	26 Agustus - 1 September 1999	tembusan, copy	1 sampul
854	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.			
854 A	Naskah Undang-Undang	08 September 1999	asli	1 sampul
854 B	Berkas Penyusunan	22 Oktober 1997 - 9 September 1999	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
855	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.			
855 A	Naskah Undang-Undang	14 September 1999	asli	1 sampul
855 B	Berkas Penyusunan	24 Juli 1996 - 14 September 1999	tembusan, copy	1 sampul
856	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.			
856 A	Naskah Undang-Undang	23 September 1999	asli	1 sampul
856 B	Berkas Penyusunan	30 April - 24 September 1999	tembusan, copy	1 sampul
857	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.			
857 A	Naskah Undang-Undang	23 September 1999	asli	1 sampul
857 B	Berkas Penyusunan	5 Februari - 24 September 1999	asli	1 sampul
858	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.			
858 A	Naskah Undang-Undang	23 September 1999	asli	1 sampul
858 B	Berkas Penyusunan	7 Juli - 24 September 1999	tembusan, copy	1 sampul
859	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.			
859 A	Naskah Undang-Undang	30 September 1999	asli	1 sampul
859 B	Berkas Penyusunan	22 Oktober 1998 - 26 Oktober 2000	tembusan, copy	1 sampul
860	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.			
860 A	Naskah Undang-Undang	30 September 1999	asli	1 sampul
860 B	Berkas Penyusunan	17 Maret - 1 Oktober 1999	tembusan, copy	1 sampul
861	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.			
861 A	Naskah Undang-Undang	30 September 1999	asli	1 sampul
861 B	Berkas Penyusunan	30 April - 1 Oktober 1999	tembusan, copy	1 sampul
862	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.			
862 A	Naskah Undang-Undang	4 Oktober 1999	asli	1 sampul
862 B	Berkas Penyusunan	19 Juli - 7 Oktober 1999	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
863	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.			
863 A	Naskah Undang-Undang	4 Oktober 1999	asli	1 sampul
863 B	Berkas Penyusunan	14 Juni - 7 Oktober 1999	tembusan, copy	1 sampul
864	Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.			
864 A	Naskah Undang-Undang	4 Oktober 1999	asli	1 sampul
864 B	Berkas Penyusunan	4 Oktober 1999	tembusan	1 sampul
865	Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.			
865 A	Naskah Undang-Undang	4 Oktober 1999	asli	1 sampul
865 B	Berkas Penyusunan	4 Oktober 1999	tembusan	1 sampul
866	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue.			
866 A	Naskah Undang-Undang	4 Oktober 1999	asli	1 sampul
866 B	Berkas Penyusunan	4 Oktober 1999	tembusan	1 sampul
867	Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai.			
867 A	Naskah Undang-Undang	4 Oktober 1999	asli	1 sampul
867 B	Berkas Penyusunan	4 Oktober 1999	tembusan	1 sampul
868	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.			
868 A	Naskah Undang-Undang	4 Oktober 1999	asli	1 sampul
868 B	Berkas Penyusunan	4 Oktober 1999	tembusan	1 sampul
869	Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan.			
869 A	Naskah Undang-Undang	4 Oktober 1999	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
869 B	Berkas Penyusunan	4 Oktober 1999	tembusan	1 sampul
870	Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata.			
870 A	Naskah Undang-Undang	4 Oktober 1999	asli	1 sampul
870 B	Berkas Penyusunan	4 Oktober 1999	tembusan	1 sampul
871	Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi, dan Kota Batam.			
871 A	Naskah Undang-Undang	4 Oktober 1999	asli	1 sampul
871 B	Berkas Penyusunan	4 Oktober 1999	tembusan	1 sampul
872	Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.			
872 A	Naskah Undang-Undang	4 Oktober 1999	asli	1 sampul
872 B	Berkas Penyusunan	4 Oktober 1999	tembusan	1 sampul
873	Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak.			
873 A	Naskah Undang-Undang	4 Oktober 1999	asli	1 sampul
873 B	Berkas Penyusunan	4 Oktober 1999	tembusan	1 sampul
874	Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih.			
874 A	Naskah Undang-Undang	4 Oktober 1999	asli	1 sampul
874 B	Berkas Penyusunan	9 Februari - 7 Oktober 1999	tembusan	1 sampul
TAHUN 2000				
875	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 <i>Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour</i> (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.			
875 A	Naskah Undang-Undang	8 Maret 2000	asli	10 lembar
875 B	Berkas Penyusunan	3 Nopember 1999-11 Januari 2000	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
876	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2000.			
876 A	Naskah Undang-Undang	21 Maret 2000	asli	1 sampul
876 B	Berkas Penyusunan	19 Januari -23 Maret 2000	asli,tembusan	1 sampul
877	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1999/2000.			
877 A	Naskah Undang-Undang	26 April 2000	asli	1 sampul
877 B	Berkas Penyusunan	13 Maret-28 April 2000	asli,tembusan	1 sampul
878	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu.			
878 A	Naskah Undang-Undang	7 Juni 2000	asli	8 lembar
878 B	Berkas Penyusunan	2 Maret- 12 Juni 2000	asli,tembusan	1 sampul
879	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah,Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabapten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong.			
879 A	Naskah Undang-Undang	7 Juni 2000	asli	10 lembar
879 B	Berkas Penyusunan	7 Juni 2000	tembusan	1 sampul
880	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.			
880 A	Naskah Undang-Undang	7 Juni 2000	asli	10 lembar
880 B	Berkas Penyusunan	7 Juni 2000	tembusan	10 lembar
881	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,Kabupaten Kutai Barat, Kapupaten Kutai Timur,dan Kutai Kota Bontang.			
881 A	Naskah Undang-Undang	7 Juni 2000	asli	10 lembar
881 B	Berkas Penyusunan	7 Juni 2000	tembusan	10 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
882	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun, Kabupaten Simeulue.			
882 A	Naskah Undang-Undang	7 Juni 2000	asli	9 lembar
882 B	Berkas Penyusunan	7 Juni 2000	tembusan	9 lembar
883	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai.			
883 A	Naskah Undang-Undang	7 Juni 2000	asli	9 lembar
883 B	Berkas Penyusunan	7 Juni 2000	tembusan	9 lembar
884	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.			
884 A	Naskah Undang-Undang	7 Juni 2000	asli	9 lembar
884 B	Berkas Berkas Penyusunan	7 Juni 2000	tembusan	9 lembar
885	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Kabupaten Baggai Kepulauan.			
885 A	Naskah Undang-Undang	7 Juni 2000	asli	10 lembar
885 B	Berkas Penyusunan	7 Juni 2000	tembusan	10 lembar
886	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata			
886 A	Naskah Undang-Undang	7 Juni 2000	asli	9 lembar
886 B	Berkas Penyusunan	7 Juni 2000	tembusan	9 lembar
887	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.			
887 A	Naskah Undang-Undang	7 Juni 2000	asli	10 lembar
887 B	Berkas Penyusunan	7 Juni 2000	tembusan	10 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
888	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.			
888 A	Naskah Undang-Undang	7 Juni 2000	asli	10 lembar
888 B	Berkas Berkas Penyusunan	7 Juni 2000	tembusan	10 lembar
889	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak.			
889 A	Naskah Undang-Undang	7 Juni 2000	asli	9 lembar
889 B	Berkas Berkas Penyusunan	7 Juni 2000	tembusan	9 lembar
890	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.			
890 A	Naskah Undang-Undang	2 Agustus 2000	asli	1 sampul
890 B	Berkas Penyusunan	25 Februari- 2 Agustus 2000	asli,tembusan	1 sampul
891	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan.			
891 A	Naskah Undang-Undang	2 Agustus 2000	asli	1 sampul
891 B	Berkas Penyusunan	2 Agustus 2000	tembusan	1 sampul
892	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.			
892 A	Naskah Undang-Undang	2 Agustus 2000	asli	1 sampul
892 B	Berkas Penyusunan	2 Agustus 2000	tembusan	1 sampul
893	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Kuasa.			
893 A	Naskah Undang-Undang	2 Agustus 2000	asli	1 sampul
893 B	Berkas Penyusunan	2 Agustus 2000	tembusan	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
894	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.			
894 A	Naskah Undang-Undang	2 Agustus 2000	asli	1 sampul
894 B	Berkas Penyusunan	2 Agustus 2000	tembusan	1 sampul
895	Undang-Undang 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.			
895 A	Naskah Undang-Undang	4 Agustus 2000	asli	1 sampul
895 B	Berkas Penyusunan	8 Juni - 7 Agustus 2000	asli,tembusan	1 sampul
896	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999.			
896 A	Naskah Undang-Undang	4 Agustus 2000	asli	1 sampul
896 B	Berkas Penyusunan	6 Juni -8 Agustus 2000	asli,tembusan	1 sampul
897	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan provinsi Banten.			
897 A	Naskah Undang-Undang	17 Oktober 2000	asli	1 sampul
897 B	Berkas Penyusunan	1 Maret-18 Oktober 2000	asli,tembusan	1 sampul
898	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.			
898 A	Naskah Undang-Undang	23 Oktober 2000	asli	1 sampul
898 B	Berkas Penyusunan	28 Januari1999-24 Oktober 2000	tembusan, copy	1 sampul
899	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas).			
899 A	Naskah Undang-Undang	20 Nopember 2000	asli	1 sampul
899 B	Berkas Penyusunan	6 Juni - 27 November 2000	tembusan, copy	1 sampul
900	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (<i>Propenas</i>).			
900 A	Naskah Undang-Undang	23 Nopember 2000	asli	1 sampul
900 B	Berkas Penyusunan	22 Maret -24 Nopember 2000	tembusan, copy	1 sampul
901	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.			
901 A	Naskah Undang-Undang	4 Desember 2000	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
901 B	Berkas Penyusunan	28 Agustus - 6 Desember 2000	tembusan, copy	1 sampul
902	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-Undang.			1 sampul
902 A	Naskah Undang-Undang	20 Desember 2000	asli	7 lembar
902 B	Berkas Penyusunan	24 Oktober -21 Desember 2000	tembusan, copy	1 sampul
903	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.			
903 A	Naskah Undang-Undang	20 Desember 2000	asli	1 sampul
903 B	Berkas Penyusunan	1 September 1999 -22 Desember 2000	tembusan, copy	1 sampul
904	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.			
904 A	Naskah Undang-Undang	20 Desember 2000	asli	1 sampul
904 B	Berkas Penyusunan	26 Mei 1999 -11 Januari 2001	tembusan, copy	1 sampul
905	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.			
905 A	Naskah Undang-Undang	20 Desember 2000	asli	1 sampul
905 B	Berkas Penyusunan	20 Desember 2000	tembusan	1 sampul
906	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.			
906 A	Naskah Undang-Undang	20 Desember 2000	asli	1 sampul
906 B	Berkas Penyusunan	20 Desember 2000	tembusan	1 sampul
907	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000.			
907 A	Naskah Undang-Undang	20 Desember 2000	asli	1 sampul
907 B	Berkas Penyusunan	30 Oktober-22 Desember 2000	tembusan, copy	1 sampul
908	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.			
908 A	Naskah Undang-Undang	20 Desember 2000	asli	1 sampul
908 B	Berkas Penyusunan	18 Agustus-22 Desember 2000	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
909	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001.			
909 A	Naskah Undang-Undang	21 Desember 2000	asli	1 sampul
909 B	Berkas Penyusunan	25 September-23 Desember 2000	tembusan, copy	1 sampul
910	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.			
910 A	Naskah Undang-Undang	21 Desember 2000	asli	1 sampul
910 B	Berkas Penyusunan	7 September-22 Desember 2000	tembusan, copy	1 sampul
911	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang.			
911 A	Naskah Undang-Undang	21 Desember 2000	asli	1 sampul
911 B	Berkas Penyusunan	21 Desember 2000	tembusan	1 sampul
912	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.			
912 A	Naskah Undang-Undang	22 Desember 2000	asli	1 sampul
912 B	Berkas Penyusunan	15 September -3 Januari 2000	tembusan, copy	1 sampul
TAHUN 2001				
913	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang melarikan diri (<i>Agreement Between the Government of the Republic Indonesia and the Government of Hongkong for the Surrender of Fugitive Offenders</i>).			
913 A	Naskah Undang-Undang	8 Mei 2001	asli, lampiran	10 lembar
913 B	Berkas Penyusunan	4 April 1997 - 9 Mei 2001	asli	1 sampul
914	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe.			
914 A	Naskah Undang-Undang	21 Juni 2001	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
914 B	Berkas Penyusunan	27 Maret - 26 Juni 2001	asli	1 sampul
915	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa.			
915 A	Naskah Undang-Undang	21 Juni 2001	asli	1 sampul
915 B	Berkas Penyusunan	21 Juni 2001	tembusan	1 sampul
916	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan.			
916 A	Naskah Undang-Undang	21 Juni 2001	asli	1 sampul
916 B	Berkas Penyusunan	21 Juni 2001	tembusan	1 sampul
917	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang.			
917 A	Naskah Undang-Undang	21 Juni 2001	asli	1 sampul
917 B	Berkas Penyusunan	21 Juni 2001	tembusan	1 sampul
918	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih.			
918 A	Naskah Undang-Undang	21 Juni 2001	asli	1 sampul
918 B	Berkas Penyusunan	21 Juni 2001	tembusan	1 sampul
919	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau.			
919 A	Naskah Undang-Undang	21 Juni 2001	asli	1 sampul
919 B	Berkas Penyusunan	21 Juni 2001	tembusan	1 sampul
920	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam.			
920 A	Naskah Undang-Undang	21 Juni 2001	asli	1 sampul
920 B	Berkas Penyusunan	21 Juni 2001	tembusan	1 sampul
921	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi.			
921 A	Naskah Undang-Undang	21 Juni 2001	asli	1 sampul
921 B	Berkas Penyusunan	21 Juni 2001	tembusan	1 sampul
922	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya.			
922 A	Naskah Undang-Undang	21 Juni 2001	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
922 B	Berkas Penyusunan	21 Juni 2001	tembusan	1 sampul
923	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu.			
923 A	Naskah Undang-Undang	21 Juni 2001	asli	1 sampul
923 B	Berkas Penyusunan	21 Juni 2001	tembusan	1 sampul
924	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang.			
924 A	Naskah Undang-Undang	21 Juni 2001	asli	1 sampul
924 B	Berkas Penyusunan	21 Juni 2001	tembusan	1 sampul
925	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau.			
925 A	Naskah Undang-Undang	21 Juni 2001	asli	1 sampul
925 B	Berkas Penyusunan	21 Juni 2001	tembusan	1 sampul
926	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.			
926 A	Naskah Undang-Undang	1 Agustus 2001	asli	1 sampul
926 B	Berkas Penyusunan	13 Desember 1999 - 3 Agustus 2001	tembusan, copy	1 sampul
927	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.			
927 A	Naskah Undang-Undang	1 Agustus 2001	asli	1 sampul
927 B	Berkas Penyusunan	1 Agustus 2001	tembusan	1 sampul
928	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.			
928 A	Naskah Undang-Undang	6 Agustus 2001	asli	1 sampul
928 B	Berkas Penyusunan	29 Mei 2000 - 26 November 2002	tembusan, copy	1 sampul
929	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000.			
929 A	Naskah Undang-Undang	6 Agustus 2001	asli	1 sampul
929 B	Berkas Penyusunan	10 Mei 2000 - 14 Agustus 2001	tembusan, copy	1 sampul
930	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.			
930 A	Naskah Undang-Undang	6 Agustus 2001	asli	1 sampul
930 B	Berkas Penyusunan	13 November 2000 - 13 Agustus 2001	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
931	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002.			
931 A	Naskah Undang-Undang	14 November 2001	asli	1 sampul
931 B	Berkas Penyusunan	11 Mei - 10 Desember 2001	tembusan, copy	1 sampul
932	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.			
932 A	Naskah Undang-Undang	21 November 2001	asli	1 sampul
932 B	Berkas Penyusunan	23 April - 22 Nopember 2001	tembusan, copy	1 sampul
933	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.			
933 A	Naskah Undang-Undang	21 November 2001	asli	1 sampul
933 B	Berkas Penyusunan	12 Maret - 21 November 2001	tembusan, copy	1 sampul
934	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.			
934 A	Naskah Undang-Undang	23 November 2001	asli	1 sampul
934 B	Berkas Penyusunan	15 Desember 1998 - 23 November 2001	tembusan, copy	1 sampul
TAHUN 2002				
935	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001.			
935 A	Naskah Undang-Undang	7 Januari 2002	asli	1 sampul
935 B	Berkas Penyusunan	22 Nopember 2001 -8 Januari 2002	tembusan, copy	1 sampul
936	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia			
936 A	Naskah Undang-Undang	8 Januari 2002	asli	1 sampul
936 B	Berkas Penyusunan	16 September 2000 -11 Januari 2002	asli,tembusan	1 sampul
937	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara			
937 A	Naskah Undang-Undang	8 Januari 2002	asli	1 sampul
937 B	Berkas Penyusunan	2 Pebruari 2001 -11 Januari 2002	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
938	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.			
938 A	Naskah Undang-Undang	10 April 2002	asli	1 sampul
938 B	Berkas Penyusunan	12 Nopember 2001 - 12 April 2002	tembusan, copy	1 sampul
939	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.			
939 A	Naskah Undang-Undang	10 April 2002	asli	1 sampul
939 B	Berkas Penyusunan	10 April 2002	tembusan	1 sampul
940	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatra Selatan.			
940 A	Naskah Undang-Undang	10 April 2002	asli	1 sampul
940 B	Berkas Penyusunan	10 April 2002	tembusan	1 sampul
941	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.			
941 A	Naskah Undang-Undang	10 April 2002	asli	1 sampul
941 B	Berkas Penyusunan	10 April 2002	tembusan	1 sampul
942	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara.			
942 A	Naskah Undang-Undang	10 April 2002	asli	1 sampul
942 B	Berkas Penyusunan	10 April 2002	tembusan	1 sampul
943	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote - Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur.			
943 A	Naskah Undang-Undang	10 April 2002	asli	1 sampul
943 B	Berkas Penyusunan	10 April 2002	tembusan	1 sampul
944	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah.			
944 A	Naskah Undang-Undang	10 April 2002	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
944 B	Berkas Penyusunan	10 April 2002	tembusan	1 sampul
945	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan.			
945 A	Naskah Undang-Undang	10 April 2002	asli	1 sampul
945 B	Berkas Penyusunan	10 April 2002	tembusan	1 sampul
946	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatra Barat.			
946 A	Naskah Undang-Undang	10 April 2002	asli	1 sampul
946 B	Berkas Penyusunan	10 April 2002	tembusan asli	1 sampul
947	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat.			
947 A	Naskah Undang-Undang	10 April 2002	asli	1 sampul
947 B	Berkas Penyusunan	10 April 2002	tembusan	1 sampul
948	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.			
948 A	Naskah Undang-Undang	12 April 2002	asli	1 sampul
948 B	Berkas Penyusunan	28 September 2000 - 30 April 2002	tembusan, copy	1 sampul
949	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.			
949 A	Naskah Undang-Undang	17 April 2002	asli	1 sampul
949 B	Berkas Penyusunan	1 Nopember 2000- 17 April 2002	tembusan, copy	1 sampul
950	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan <i>Treaty On Principles Governing The Activities Of State In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967</i> (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Ekplorasi dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967).			
950 A	Naskah Undang-Undang	17 April 2002	asli	1 sampul
950 B	Berkas Penyusunan	20 Oktober 1998- 3 Mei 2002	tembusan, copy	1 sampul
951	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000.			
951 A	Naskah Undang-Undang	28 Juni 2002	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
951 B	Berkas Penyusunan	30 Agustus 2001- 1 Juli 2002	tembusan, copy	1 sampul
952	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.			
952 A	Naskah Undang-Undang	29 Juli 2002	asli	1 sampul
952 B	Berkas Penyusunan	7 Juni 1996- 30 Juli 2002	tembusan, copy	1 sampul
953	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.			
953 A	Naskah Undang-Undang	29 Juli 2002	asli	1 sampul
953 B	Berkas Penyusunan	22 Nopember 1999- 30 Juli 2002	tembusan, copy	1 sampul
954	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan			
954 A	Naskah Undang-Undang	23 September 2002	asli	1 sampul
954 B	Berkas Penyusunan	11 Desember 2000 - 25 September 2002	tembusan, copy	1 sampul
955	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002.			
955 A	Naskah Undang-Undang	7 Oktober 2002	asli	1 sampul
955 B	Berkas Penyusunan	26 September - 8 Oktober 2002	tembusan, copy	1 sampul
956	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.			
956 A	Naskah Undang-Undang	22 Oktober 2002	asli	1 sampul
956 B	Berkas Penyusunan	4 Desember 2000- 24 Oktober 2002	tembusan, copy	1 sampul
957	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.			
957 A	Naskah Undang-Undang	22 Oktober 2002	asli	1 sampul
957 B	Berkas Penyusunan	27 Mei 1999- 31 Oktober 2002	tembusan, copy	1 sampul
958	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.			
958 A	Naskah Undang-Undang	22 Oktober 2002	asli	1 sampul
958 B	Berkas Penyusunan	6 Juli 2001- 4 Nopember 2002	asli,tembusan	1 sampul
959	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.			
959 A	Naskah Undang-Undang	25 Oktober 2002	asli	1 sampul
959 B	Berkas Penyusunan	28 Agustus 2000 - 14 Nopember 2002	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
960	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua.			
960 A	Naskah Undang-Undang	11 Desember 2002	asli	1 sampul
960 B	Berkas Penyusunan	30 Septemeber - 24 Desember 2002	tembusan, copy	1 sampul
961	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.			
961 A	Naskah Undang-Undang	11 Desember 2002	asli	1 sampul
961 B	Berkas Penyusunan	3 Desember 2002	tembusan, konsep	1 sampul
962	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.			
962 A	Naskah Undang-Undang	16 Desember 2002	asli	1 sampul
962 B	Berkas Penyusunan	23 Nopember 1985 - 18 Desember 2002	tembusan, copy	1 sampul
963	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003.			
963 A	Naskah Undang-Undang	24 Desember 2002	asli	1 sampul
963 B	Berkas Penyusunan	16 Mei 2002 -31 Desember 2002	tembusan, copy	1 sampul
964	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.			
964 A	Naskah Undang-Undang	24 Desember 2002	asli	1 sampul
964 B	Berkas Penyusunan	23 Mei 2001-31 Desember 2002	tembusan, copy	1 sampul
965	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.			
965 A	Naskah Undang-Undang	24 Desember 2002	asli	1 sampul
965 B	Berkas Penyusunan	30 April 2002-31 Desember 2002	asli,tembusan	1 sampul
966	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.			
966 A	Naskah Undang-Undang	28 Desember 2002	asli	1 sampul
966 B	Berkas Penyusunan	24 September 2000 - 4 Februari 2002	tembusan, copy	1 sampul
TAHUN 2003				

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
967	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Halmahera Utara, kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara.			
967 A	Naskah Undang-Undang	25 Februari 2003	asli	1 sampul
967 B	Berkas Penyusunan	17 Februari - 10 Maret 2003	tembusan, copy	1 sampul
968	Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan.			
968 A	Naskah Undang-Undang	25 Februari 2003	asli	1 sampul
968 B	Berkas Penyusunan	25 Februari 2003	tembusan	1 sampul
969	Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu			
969 A	Naskah Undang-Undang	25 Februari 2003	asli	1 sampul
969 B	Berkas Penyusunan	25 Februari 2003	tembusan	1 sampul
970	Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.			
970 A	Naskah Undang-Undang	25 Februari 2003	asli	1 sampul
970 B	Berkas Penyusunan	25 Februari 2003	tembusan	1 sampul
971	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.			
971 A	Naskah Undang-Undang	25 Februari 2003	asli	1 sampul
971 B	Berkas Penyusunan	25 Februari 2003	tembusan	1 sampul
972	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.			
972 A	Naskah Undang-Undang	25 Februari 2003	asli	1 sampul
972 B	Berkas Penyusunan	25 Februari 2003	tembusan	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
973	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur Dan Kabupaten Mamuju Utara Di Propinsi Sulawesi Selatan.			
973 A	Naskah Undang-Undang	25 Februari 2003	asli	1 sampul
973 B	Berkas Penyusunan	25 Februari 2003	tembusan	1 sampul
974	Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.			
974 A	Naskah Undang-Undang	25 Februari 2003	asli	1 sampul
974 B	Berkas Penyusunan	25 Februari 2003	tembusan	1 sampul
975	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.			
975 A	Naskah Undang-Undang	25 Februari 2003	asli	1 sampul
975 B	Berkas Penyusunan	25 Februari 2003	tembusan	1 sampul
976	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara.			
976 A	Naskah Undang-Undang	25 Februari 2003	asli	1 sampul
976 B	Berkas Penyusunan	25 Februari 2003	tembusan	1 sampul
977	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.			
977 A	Naskah Undang-Undang	25 Februari 2003	asli	1 sampul
977 B	Berkas Penyusunan	14 Februari - 18 Maret 2003	tembusan, copy	1 sampul
978	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.			
978 A	Naskah Undang-Undang	11 Maret 2003	asli	1 sampul
978 B	Berkas Penyusunan	23 Mei 2002- 11 Maret 2003	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
979	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.			
979 A	Naskah Undang-Undang	25 Maret 2003	asli	1 sampul
979 B	Berkas Penyusunan	11 Maret 2000- 17 April 2003	tembusan, copy	1 sampul
980	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001.			
980 A	Naskah Undang-Undang	31 Maret 2003	asli	1 sampul
980 B	Berkas Penyusunan	25 Juli 2002-20 Mei 2003	tembusan, copy	1 sampul
981	Naskah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.			
981 A	Naskah Undang-Undang	04 April 2003	asli	9 lembar
981 B	Berkas Penyusunan	18 Oktober 2002-9 April 2003	tembusan, copy	1 sampul
982	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, menjadi Undang-undang.			
982 A	Naskah Undang-Undang	04 April 2003	asli	7 lembar
982 B	Berkas Penyusunan	04 April 2003	tembusan	7 lembar
983	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.			
983 A	Naskah Undang-Undang	05 April 2003	asli	1 sampul
983 B	Berkas Penyusunan	14 Maret 2002 - 29 April 2003	tembusan, copy	1 sampul
984	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.			
984 A	Naskah Undang-Undang	05 April 2003	asli	1 sampul
984 B	Berkas Penyusunan	16 Agustus 2000 - 23 April 2003	tembusan, copy	1 sampul
985	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.			
985 A	Naskah Undang-Undang	19 Juni 2003	asli	1 sampul
985 B	Berkas Penyusunan	4 September 2001 - 23 Juni 2003	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
986	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.			
986 A	Naskah Undang-Undang	8 Juli 2003	asli	1 sampul
986 B	Berkas Penyusunan	6 Februari 2001-17 Juli 2003	asli	3 sampul
987	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 <i>Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce</i> (Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan).			
987 A	Naskah Undang-Undang	25 Juli 2003	asli, lampiran	1 sampul
987 B	Berkas Penyusunan	29 Oktober 2001 - 10 November 2003	tembusan, copy	1 sampul
988	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.			
988 A	Naskah Undang-Undang	31 Juli 2003	asli	1 sampul
988 B	Berkas Penyusunan	21 November 2002 - 4 Agustus 2003	tembusan, copy	1 sampul
989	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.			
989 A	Naskah Undang-Undang	31 Juli 2003	asli	1 sampul
989 B	Berkas Penyusunan	10 Januari - 4 Agustus 2003	tembusan, copy	1 sampul
990	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi .			
990 A	Naskah Undang-Undang	13 Agustus 2003	asli	1 sampul
990 B	Berkas Penyusunan	4 Juni - 14 Agustus 2003	tembusan, copy	1 sampul
991	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.			
991 A	Naskah Undang-Undang	13 Oktober 2003	asli	1 sampul
991 B	Berkas Penyusunan	8 Mei - 14 Oktober 2003	tembusan, copy	1 sampul
992	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003.			

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
992 A	Naskah Undang-Undang	22 Oktober 2003	asli	1 sampul
992 B	Berkas Penyusunan	25 Agustus - 28 Oktober 2003	tembusan	1 sampul
993	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi.			
993 A	Naskah Undang-Undang	22 Oktober 2003	asli	1 sampul
993 B	Berkas Penyusunan	10 April - 22 Oktober 2003	tembusan, copy	1 sampul
994	Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004.			
994 A	Naskah Undang-Undang	9 Desember 2003	asli	1 sampul
994 B	Berkas Penyusunan	9 Mei 2003-18 Desember 2003	asli	1 sampul
995	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.			
995 A	Naskah Undang-Undang	18 Desember 2003	asli	1 sampul
995 B	Berkas Penyusunan	28 Pebruari - 31 Desember 2003	tembusan, copy	2 sampul
996	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.			
996 A	Naskah Undang-Undang	18 Desember 2003	asli	1 sampul
996 B	Berkas Penyusunan	18 Desember 2003	tembusan	1 sampul
997	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau.			
997 A	Naskah Undang-Undang	18 Desember 2003	asli	1 sampul
997 B	Berkas Penyusunan	18 Desember 2003	tembusan	1 sampul
998	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah.			
998 A	Naskah Undang-Undang	18 Desember 2003	asli	1 sampul
998 B	Berkas Penyusunan	18 Desember 2003	tembusan	1 sampul
999	Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara.			
999 A	Naskah Undang- Undang	18 Desember 2003	asli	1 sampul
999 B	Berkas Penyusunan	18 Desember 2003	tembusan	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1000	Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat.			
1000 A	Naskah Undang-Undang	18 Desember 2003	asli	1 sampul
1000 B	Berkas Penyusunan	18 Desember 2003	tembusan	1 sampul
1001	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua.			
1001 A	Naskah Undang-Undang	18 Desember 2003	asli	1 sampul
1001 B	Berkas Penyusunan	18 Desember 2003	tembusan	1 sampul
1002	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara.			
1002 A	Naskah Undang-Undang	18 Desember 2003	asli	1 sampul
1002 B	Berkas Penyusunan	18 Desember 2003	tembusan	1 sampul
1003	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.			
1003 A	Naskah Undang-Undang	18 Desember 2003	asli	1 sampul
1003 B	Berkas Penyusunan	18 Desember 2003	tembusan	1 sampul
1004	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.			
1004 A	Naskah Undang-Undang	18 Desember 2003	asli	1 sampul
1004 B	Berkas Penyusunan	18 Desember 2003	tembusan	1 sampul
1005	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu.			
1005 A	Naskah Undang-Undang	18 Desember 2003	asli	1 sampul
1005 B	Berkas Penyusunan	18 Desember 2003	tembusan	1 sampul
1006	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku.			

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1006 A	Naskah Undang-Undang	18 Desember 2003	asli	1 sampul
1006 B	Berkas Penyusunan	18 Desember 2003	tembusan	1 sampul
1007	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.			
1007 A	Naskah Undang-Undang	18 Desember 2003	asli	1 sampul
1007 B	Berkas Penyusunan	18 Desember 2003	tembusan	1 sampul
TAHUN 2004				
1008	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.			
1008 A	Naskah Undang-Undang	14 Januari 2004	asli	1 sampul
1008 B	Berkas Penyusunan	19 Juni 2003 - 20 Januari 2004	tembusan, copy	1 sampul
1009	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.			
1009 A	Naskah Undang-Undang	14 Januari 2004	asli	1 sampul
1009 B	Berkas Penyusunan	8 September 1998 - 19 Januari 2004	tembusan, copy	1 sampul
1010	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.			
1010 A	Naskah Undang-Undang	15 Januari 2004	asli	1 sampul
1010 B	Berkas Penyusunan	11 Februari 2002 - 21 Januari 2004	tembusan, copy	1 sampul
1011	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.			
1011 A	Naskah Undang-Undang	15 Januari 2004	asli	1 sampul
1011 B	Berkas Penyusunan	17 Oktober 2002 - 18 Februari 2004	tembusan, copy	1 sampul
1012	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.			
1012 A	Naskah Undang-Undang	15 Januari 2004	asli	1 sampul
1012 B	Berkas Penyusunan	13 Agustus 2001 - 7 Januari 2004	tembusan, copy	1 sampul
1013	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002.			
1013 A	Naskah Undang-Undang	15 Januari 2004	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1013 B	Berkas Penyusunan	14 Nopember 2003 - 2 Maret 2004	tembusan, copy	1 sampul
1014	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.			
1014 A	Naskah Undang-Undang	18 Maret 2004	asli	1 sampul
1014 B	Berkas Penyusunan	27 Juni 2000 - 20 April 2004	tembusan, copy	1 sampul
1015	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.			
1015 A	Naskah Undang-Undang	29 Maret 2004	asli	1 sampul
1015 B	Berkas Penyusunan	1 Maret 2004 - 5 Mei 2004	tembusan, copy	1 sampul
1016	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.			
1016 A	Naskah Undang-Undang	29 Maret 2004	asli	1 sampul
1016 B	Berkas Penyusunan	1 Maret 2004 - 5 Mei 2004	tembusan, copy	
1017	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.			
1017 A	Naskah Undang-Undang	22 Juni 2004	asli	1 sampul
1017 B	Berkas Penyusunan	5 Januari 1999 - 6 Oktober 2004	tembusan, copy	1 sampul
1018	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara.			
1018 A	Naskah Undang-Undang	6 Juli 2004	asli	9 lembar
1018 B	Berkas Penyusunan	23 Oktober 2002 - 9 Agustus 2004	tembusan, copy	1 sampul
1019	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten.			
1019 A	Naskah Undang-Undang	6 Juli 2004	asli	9 lembar
1019 B	Berkas Penyusunan	6 Juli 2004	tembusan	8 lembar
1020	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.			
1020 A	Naskah Undang-Undang	6 Juli 2004	asli	9 lembar
1020 B	Berkas Penyusunan	6 Juli 2004	tembusan	8 lembar
1021	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo.			
1021 A	Naskah Undang-Undang	6 Juli 2004	asli	9 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1021 B	Berkas Penyusunan	6 Juli 2004	tembusan	8 lembar
1022	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.			
1022 A	Naskah Undang-Undang	19 Juli 2004	asli	1 sampul
1022 B	Berkas Penyusunan	6 September 2000 - 27 Juli 2004	tembusan, copy	1 sampul
1023	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.			
1023 A	Naskah Undang-Undang	26 Juli 2004	asli	1 sampul
1023 B	Berkas Penyusunan	14 Mei 2001 - 5 Agustus 2004	tembusan, copy	1 sampul
1024	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan <i>Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change</i> (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim).			
1024 A	Naskah Undang-Undang	28 Juli 2004	asli	1 sampul
1024 B	Berkas Penyusunan	31 Januari 2003 - 26 Oktober 2004	tembusan, copy	1 sampul
1025	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.			
1025 A	Naskah Undang-Undang	11 Agustus 2004	asli	1 sampul
1025 B	Berkas Penyusunan	13 Oktober 1999 - 6 Oktober 2004	tembusan, copy	1 sampul
1026	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.			
1026 A	Naskah Undang-Undang	13 Agustus 2004	asli	1 sampul
1026 B	Berkas Penyusunan	9 Maret 2004 - 6 Oktober 2004	tembusan, copy	1 sampul
1027	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjadi Undang-Undang.			
1027 A	Naskah Undang-Undang	13 Agustus 2004	asli	1 sampul
1027 B	Berkas Penyusunan	11 Mei 2004 - 6 Oktober 2004	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1028	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan <i>Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention on Biological Diversity</i> (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati).			
1028 A	Naskah Undang-Undang	16 Agustus 2004	asli	1 sampul
1028 B	Berkas Penyusunan	30 September 2002 - 26 Oktober 2004	tembusan, copy	1 sampul
1029	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.			
1029 A	Naskah Undang-Undang	13 Agustus 2004	asli	1 sampul
1029 B	Berkas Penyusunan	16 Juni 2003 - 29 September 2004	tembusan, copy	1 sampul
1030	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.			
1030 A	Naskah Undang-Undang	22 September 2004	asli	1 sampul
1030 B	Berkas Penyusunan	27 Mei 2003 - 24 September 2004	tembusan, copy	1 sampul
1031	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.			
1031 A	Naskah Undang-Undang	22 September 2004	asli	1 sampul
1031 B	Berkas Penyusunan	30 September 2003 - 6 Oktober 2004	tembusan, copy	1 sampul
1032	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.			
1032 A	Naskah Undang-Undang	5 Oktober 2004	asli	1 sampul
1032 B	Berkas Penyusunan	7 Februari 2001 - 6 Oktober 2004	tembusan, copy	1 sampul
1033	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.			
1033 A	Naskah Undang-Undang	5 Oktober 2004	asli	1 sampul
1033 B	Berkas Penyusunan	5 Februari 2003 - 6 Oktober 2004	tembusan, copy	1 sampul
1034	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.			
1034 A	Naskah Undang-Undang	6 Oktober 2004	asli	1 sampul
1034 B	Berkas Penyusunan	2 Nopember 2001 - 7 Oktober 2004	tembusan, copy	1 sampul
1035	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.			
1035 A	Naskah Undang-Undang	6 Oktober 2004	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1035 B	Berkas Penyusunan	30 Nopember 2001 - 7 Oktober 2004	tembusan, copy	1 sampul
1036	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.			
1036 A	Naskah Undang-Undang	6 Oktober 2004	asli	1 sampul
1036 B	Berkas Penyusunan	13 Maret 2002 - 3 Oktober 2004	tembusan, copy	1 sampul
1037	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.			
1037 A	Naskah Undang-Undang	6 Oktober 2004	asli	1 sampul
1037 B	Berkas Penyusunan	20 Januari 2003 - 4 Oktober 2004	tembusan, copy	1 sampul
1038	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.			
1038 A	Naskah Undang-Undang	6 Oktober 2004	asli	1 sampul
1038 B	Berkas Penyusunan	24 Juni 2003 - 7 Oktober 2004	tembusan, copy	1 sampul
1039	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.			
1039 A	Naskah Undang-Undang	15 Oktober 2004	asli	1 sampul
1039 B	Berkas Penyusunan	Desember 2000 - 18 Oktober 2004	tembusan, copy	2 sampul
1040	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.			
1040 A	Naskah Undang-Undang	15 Oktober 2004	asli	1 sampul
1040 B	Berkas Penyusunan	26 Januari - 14 Oktober 2004	tembusan, copy	1 sampul
1041	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.			
1041 A	Naskah Undang-Undang	16 Oktober 2004	asli	1 sampul
1041 B	Berkas Penyusunan	25 Juni 2003 - 22 Oktober 2004	tembusan, copy	1 sampul
1042	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004.			
1042 A	Naskah Undang-Undang	18 Oktober 2004	asli	1 sampul
1042 B	Berkas Penyusunan	19 Agustus - 19 Oktober 2004	tembusan, copy	1 sampul
1043	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005.			
1043 A	Naskah Undang-Undang	18 Oktober 2004	asli	1 sampul
1043 B	Berkas Penyusunan	12 Agustus - 19 Oktober 2004	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1044	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.			
1044 A	Naskah Undang-Undang	18 Oktober 2004	asli	1 sampul
1044 B	Berkas Penyusunan	11 Desember 2001 - 8 Desember 2004	tembusan, copy	1 sampul
1045	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.			
1045 A	Naskah Undang-Undang	18 Oktober 2004	asli	1 sampul
1045 B	Berkas Penyusunan	16 Januari 2004 - 18 Oktober 2004	tembusan, copy	1 sampul
1046	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.			
1046 A	Naskah Undang-Undang	18 Oktober 2004	asli	1 sampul
1046 B	Berkas Penyusunan	27 Mei 2003 - 18 Oktober 2004	tembusan, copy	1 sampul
1047	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.			
1047 A	Naskah Undang-Undang	19 Oktober 2004	asli	1 sampul
1047 B	Berkas Penyusunan	17 Juni 2003 - 19 Oktober 2004	tembusan, copy	2 sampul
1048	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.			
1048 A	Naskah Undang-Undang	27 Oktober 2004	asli	1 sampul
1048 B	Berkas Penyusunan	28 Februari 2001 - 28 Oktober 2004	tembusan, copy	1 sampul
1049	Pasal-pasal pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1951 - 1981.	Tahun 1951 - 1981	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
B. UNDANG-UNDANG DARURAT				
TAHUN 1949				
1050	Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1949 tentang Pengumuman Undang-Undang Federal yang akan diumumkan oleh Presiden atau Menteri Kehakiman, Nb. arsip rusak berat.	27 Desember 1949	asli	1 lembar
1051	Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1949 tentang Penyerahan Angkatan Laut Belanda kepada Angkatan Laut Republik Indonesia setelah kedaulatan diserahkan kepada Republik Indonesia.	27 Desember 1949	asli	3 lembar
TAHUN 1950				
1052	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 1 Tahun 1950 tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Negara Jawa Timur oleh Republik Indonesia Serikat.	15 Januari 1950	asli	4 lembar
1053	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 2 Tahun 1950 tentang penertiban Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat dan Tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah.	17 Januari 1950	salinan	5 lembar
1054	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan Tahun 1950.	20 Januari 1950	asli	2 lembar
1055	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 4 Tahun 1950 tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat.	21 Januari 1950	asli	6 lembar
1056	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Gaji Militer 1950.	21 Januari 1950	asli	7 lembar
1057	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 6 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota.	20 Januari 1950	asli	5 lembar
1058	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perguruan Tinggi.	23 Januari 1950	asli	1 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1059	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 8 Tahun 1950 tentang Untuk Mengadakan Tambahan Dalam Peraturan Keadaan Perang dan Darurat RIS Perang (Keputusan Raja Tanggal 13 September 1939 Nomor 32, <i>Staatsblad Indonesia Tahun 1939 Nomor 582</i>).	7 Februari 1950	asli	3 lembar
1060	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 9 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Postspaarbank.	9 Februari 1950	asli	1 lembar
1061	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 10 Tahun 1950 tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Daerah Negara Pasundan oleh Republik Indonesia Serikat.	10 Februari 1950	asli	4 lembar
1062	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 11 Tahun 1950 tentang Cara-cara Perubahan Susunan Kenegaraan dari Wilayah Republik Indonesia Serikat.	8 Maret 1950	asli	1 sampul
1063	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 12 Tahun 1950 tentang Mengadakan Pajak Peredaran.	13 Februari 1950	asli	1 sampul
1064	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pinjaman Darurat.	18 Maret 1950	asli	5 lembar
1065	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 14 Tahun 1950 tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Negara Sumatera Selatan Oleh Republik Indonesia Serikat,	17 Maret 1950	asli	4 lembar
1066	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 15 Tahun 1950 tentang Penyelesaian Urusan Pemulihan Hak.	29 Maret 1950	asli	5 lembar
1067	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 16 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan.	30 Maret 1950	asli	10 lembar
1068	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 17 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara.	30 Maret 1950	asli	4 lembar
1069	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 18 Tahun 1950 tentang Penghapusan Pengadilan-pengadilan Landgerecht dan Appelraad dan Pembentukan Pengadilan-pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.	17 April 1950	asli	2 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1070	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 19 Tahun 1950 tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat.	26 April 1950	asli	8 lembar
1071	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya.	13 Mei 1950	asli	8 lembar
1072	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat RIS Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pengeluaran Uang Kertas atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat.	2 Juni 1950	asli	4 lembar
1073	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 22 Tahun 1950 tentang Penurunan Cukai Tembakau.	22 Juni 1950	asli	5 lembar
1074	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 23 Tahun 1950 tentang Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri.	28 Juni 1950	asli	2 lembar
1075	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 24 tahun 1950 tentang Peraturan Tambahan Perjalanan Keluar Negeri.	28 Juni 1950	asli	3 lembar
1076	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 25 Tahun 1950 tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai Republik Indonesia.	30 Juni 1950	asli	5 lembar
1077	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 26 Tahun 1950 tentang Pengesahan dan Pengakuan Hutang Terhadap Kerajaan Belanda.	24 Juli 1950	asli	2 lembar
1078	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 27 Tahun 1950 tentang Mengubah "Peraturan Gaji Militer 1950" (P.G.M 1950).	23 Juli 1950	asli	3 lembar
1079	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 28 Tahun 1950 tentang Perubahan Peraturan pemberian Pensiun dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat.	24 Juli 1950	asli	2 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1080	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 29 Tahun 1950 tentang Penetapan Kejahatan-kejahatan dan Pelanggaran-pelanggaran Yang Dilakukan dalam Masa Pekerjaan Oleh Para Pejabat, Yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat Dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili Oleh Mahkamah Agung Indonesia.	9 Agustus 1950	asli	3 lembar
1081	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 30 Tahun 1950 tentang Penggantian Kerugian Anggota-anggota Senat Republik Indonesia Serikat.	24 Juli 1950	asli	2 lembar
1082	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 31 Tahun 1950 tentang Pemungutan Cukai Bea Barang-barang.	23 Agustus 1950	asli	2 lembar
1083	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 32 Tahun 1950 tentang Perubahan "Tariefordonnantie" (Staatsblad 1910 No. 628 jo. Staatsblad 1934 No. 471).	20 Oktober 1950	asli	2 lembar
1084	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 33 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Darurat Untuk Mencabut Kembali Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1950 (Lembaran Negara Nomor 7).	28 Oktober 1950	asli	3 lembar
1085	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 34 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Darurat Untuk Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1950 (Undang-Undang darurat Tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat).	10 November 1950	asli	2 lembar
1086	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 35 Tahun 1950 tentang Pengutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan Tahun 1951.	30 Desember 1950	asli	2 lembar
1087	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 36 Tahun 1950 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang, Undang-Undang Darurat dan Ordonansi-Ordonansi Mengenai Masalah-masalah Pajak, Dikeluarkan Sebelum Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	30 Desember 1950	asli	2 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1088	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 37 Tahun 1950 tentang Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932.	30 Desember 1950	asli	10 lembar
1089	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 38 Tahun 1950 tentang Tambahan dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950 (Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950).	30 Desember 1950	asli	4 lembar
1090	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 39 Tahun 1950 tentang Tambahan Pokok Bea (Opsenten) Atas Bea-bea Masuk Selama Tahun 1951.	27 Desember 1950	asli	2 lembar
1091	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia.	30 Desember 1950	asli	6 lembar
1092	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 41 Tahun 1950 tentang Menaikan Bea Yang Dikenakan Untuk Memperoleh Dokumen-dokumen Imigrasi.	30 Desember 1950	asli	7 lembar
1093	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 42 Tahun 1950 tentang Bea-Bea Imigrasi.	30 Desember 1950	asli	6 lembar
1094	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 43 Tahun 1950 tentang Perobahan pasal 45 " <i>Zegelverordening 1921</i> ".	30 Desember 1950	asli	3 lembar
TAHUN 1951				
1095	Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.	13 Januari 1951	asli	1 sampul
1096	Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan " <i>Rechtenordonnantie</i> " (<i>Staatsblad 1882 Nomor 240 Jo Staatsblad 1931 Nomor 471</i>).	13 Januari 1951	asli	8 lembar
1097	Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1951 tentang Menaikkan Jumlah Maksimum <i>Porto</i> dan Bea.	17 Januari 1951	asli	7 lembar
1098	Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1951 tentang Mengubah dan Menambah Peraturan Dalam <i>Staatsblad 1961 Nomor 47</i> .	18 Januari 1951	asli	2 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1099	Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1951 tentang Tambahan Undang-Undang Darurat Nomor 37 Tahun 1950 Tentang Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932.	19 Januari 1951	asli	3 lembar
1100	Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1951 tentang Mengubah " <i>Gronduur -Ordonnantie</i> " (S.1918 No.88) dan " <i>Vorstenlandsch Gronduureglement</i> " (S.1918 No. 20).	2 Maret 1951	asli	5 lembar
1101	Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1951 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 Nomor 141).	28 Februari 1951	asli	1 sampul
1102	Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1951 tentang Perubahan <i>Reglement A</i> Yang Dilampirkan Pada <i>Rechtenordonnantie</i> .	21 Mei 1951	asli	3 lembar
1103	Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1951 tentang Memperpanjang Berlakunya <i>Opcenten</i> Atas Beberapa Macam Cukai.	9 Juli 1951	asli	2 lembar
1104	Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1951 tentang Pencabutan kembali Peraturan Gaji Militer 1950.	23 Juli 1951	asli	1 lembar
1105	Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1951 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1950 Untuk Para Anggota Tentara Angkatan Laut dan Angkatan Udara.	24 Agustus 1951	asli	1 lembar
1106	Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah " <i>Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen</i> " (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu No. 8 Tahun 1948.	01 September 1951	asli	3 lembar
1107	Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951 tentang Bursa.	01 September 1951	asli	6 lembar
1108	Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak <i>Verponding</i> Atas Tahun 1951.	10 September 1951	asli	5 lembar
1109	Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951 tentang Penilaian Dari Bagian-bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik Yang Diperoleh Maupun Yang Berada Dalam Uang Asing, Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan Tentang Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944.	10 September 1951	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1110	Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.	10 September 1951	salinan	1 sampul
1111	Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang.	16 September 1951	asli	9 lembar
1112	Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1951 tentang Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Pajak Peredaran 1950.	29 September 1951	salinan	7 lembar
1113	Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan.	29 September 1951	salinan	1 sampul
1114	Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 tentang Penghentian Berlakunya " <i>Indische Muntwet 1912</i> " dan Penetapan Peraturan Baru Tentang Mata Uang.	27 September 1951	asli	6 lembar
1115	Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951 tentang Pengenaan Tambahan <i>Opsenten</i> Atas Bensin dan Sebagainya.	29 September 1951	salinan	4 lembar
1116	Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1951 tentang Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Tahun Anggaran 1950.	29 September 1951	asli	2 lembar
1117	Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1951 tentang Perubahan dan penambahan <i>Ordonansi</i> Pajak Peralihan Tahun 1944.	14 Oktober 1951	salinan	5 lembar
1118	Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1951 tentang Perubahan Beberapa Pos Tarif Bea Msuk.	18 Oktober 1951	salinan	4 lembar
1119	Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1951 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 <i>Ordonansi</i> (<i>Staatsblad</i> Untuk Indonesia 1948 No. 141).	22 Desember 1951	salinan	2 lembar
TAHUN 1952				
1120	Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952 tentang Pemindahan dan Pemakaian Tanah-tanah dan Barang-barang Tetap Yang lainnya yang mempunyai Titer Menurut Hukum <i>Eropa</i> .	1 Januari 1952	asli	3 lembar
1121	Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 tentang Kenaikan Tarif Pengenaan Pajak Perseroan Untuk Tahun Dinas 1952.	10 Januari 1952	asli	4 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1122	Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1952 tentang Mengadakan Bea Keluar Tambahan Sementara.	2 Februari 1952	asli	4 lembar
1123	Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1952 tentang Tambahan Pokok Bea Atas Bea-bea Masuk Selama Tahun 1952.	14 Februari 1952	asli	2 lembar
1124	Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1952 tentang Bank Industri Negara.	20 Februari 1952	asli	4 lembar
1125	Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1952 tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan Untuk Tahun	17 Maret 1952	asli	2 lembar
1126	Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1952 tentang Kewajiban Pengilinan Padi dan Perdagangan Bahan Makanan.	5 Mei 1952	asli	8 lembar
1127	Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1952 tentang Menambah dan Mengubah Undang-Undang Pelabuhan Berat Barang (<i>Goederengeld Ordonnantie</i>) Beserta Peraturan Uang Berat Barang (<i>Algemeen Goederengeld Reglement</i>)	28 Mei 1952	asli	4 lembar
1128	Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1952 tentang Penyelesaian Hutang di Zaman Pergolakan.	26 Agustus 1952	asli	5 lembar
1129	Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1952 tentang Perubahan Mengenai Mulai Berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1951 "Undang-Undang Darurat Tentang penetapan Berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1950 Untuk Para Anggota Tentara Angkatan Laut dan Angkatan Udara", Lembaran Negara No. 76 Tahun 1951.	18 Oktober 1952	asli	1 lembar
1130	Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1952 tentang Perubahan dan Penambahan dari " <i>Ordonnantie op de Vennootschaps Belasting 1925</i> " Yang Memberikan Pula Aturan Kelengkapan Lebih Lanjut Mengenai Pungutan Ini.	13 Desember 1952	asli	1 sampul
1131	Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan.	24 Desember 1952	asli	3 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1132	Undang-Undang Darurat Nomor 13 tahun 1952 tentang Larangan Untuk Mempergunakan dan Memasukkan Dalam Peredaran Uang Perak Lama Yang Dikeluarkan Berdasarkan " <i>Indische Muntwet 1912</i> "	30 Desember 1952	asli	4 lembar
1133	Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952 tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah dan Pajak Kekayaan.	30 Desember 1952	asli	1 sampul
1134	Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952 tentang Pemungutan Pajak <i>Verponding</i> Untuk Tahun-tahun 1953 Dan Berikutnya.	31 Desember 1952	asli	2 lembar
TAHUN 1953				
1135	Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1953 tentang Penetapan <i>Opsenten</i> Atas Bea Masuk.	7 Januari 1953	asli	3 lembar
1136	Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan.	7 Januari 1953	salinan	1 sampul
1137	Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan.	7 Januari 1953	salinan	1 sampul
1138	Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1953 tentang Penetapan Tambahan Opsenten Atas Cukai Bensin dan Sebagainya Selama tahun 1953.	7 Januari 1953	asli	2 lembar
1139	Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1953 tentang Menaikan Jumlah Maksimum <i>Porto</i> dan Bea.	5 Maret 1953	asli	5 lembar
1140	Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1953 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 <i>Ordonansi</i> (<i>Staatsblad</i> Untuk Indonesia 1948 No. 141).	26 Februari 1953	asli	2 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1141	Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan Atau Dalam Milik Penyimpanan, Pengangkutan, Atau Pembawaan Kawat Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Surat Izin.	17 Juni 1953	asli	3 lembar
1142	Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1953 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-peraturan Militer Termaksud Dalam Pasal 34 Ayat 5 <i>Staatsblad</i> 1949 Nomor 582 Sebagaimana Telah Dirubah dan atau Ditambah Kemudian Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan.	7 Juni 1953	asli	2 lembar
1143	Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing.	16 Oktober 1953	asli	3 lembar
TAHUN 1954				
1144	Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1954 tentang Mempersatukan Opsenten Yang Berlaku Dalam Tahun 1953, atas Cukai dari Beberapa Jenis barang Dalam Pokoknya Kenaikan Jumlah Cukai Atas Alkohol Sulingan Dalam Negeri dan Bir dan Kenaikan Bea Masuk atas Bir.	28 Desember 1953	salinan	7 lembar
1145	Undang-Undang Darurat Nomor 2 tahun 1954 tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat pembayaran Yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah Yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan.	28 Desember 1953	salinan	4 lembar
1146	Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1954 tentang Mengubah " <i>Indonesische Comptabiliteitswet</i> " (STBL. 1925 No. 448) dan " <i>Indonesische Bedrijvenwet</i> " (STBL. 1927 No. 419).	28 Desember 1953	salinan	10 lembar
1147	Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1954 tentang Undang-Undang Darurat Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukum Yang Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 <i>Ordonansi</i> (<i>Staatsblad</i> Indonesia 1948 No. 141) Untuk Selanjutnya.	30 Desember 1953	salinan	2 lembar
1148	Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1954 tentang Pemungutan Tambahan Pembayaran Atas Pengiriman Uang Keluar Negeri.	2 Maret 1954	asli	3 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1149	Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1954 tentang Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 28) Tentang Peraturan Pemberian <i>Pensium</i> dan <i>Onderstand</i> Kepada Para Anggota <i>Tentara Angkatan Darat</i> .	6 April 1954	salinan	3 lembar
1150	Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1954 tentang Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom Dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak dan Atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya.	21 April 1954	salinan	4 lembar
1151	Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat.	8 Juni 1954	asli	1 sampul
1152	Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954 tentang Pengubahan Nama Propinsi Sunda Kecil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara.	28 Mei 1954	salinan	4 lembar
1153	Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954 tentang <i>Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Maatschappij (B.V.M.) N.V.</i>	28 Mei 1954	salinan	4 lembar
1154	Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang <i>Amnesti</i> dan <i>Abolisi</i> .	27 Desember 1954	salinan	3 lembar
1155	Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1954 tentang Perubahan " <i>Krosok-Ordonnantie 1937</i> " (lembaran Negara Tahun 1937 No.	30 Desember 1954	salinan	2 lembar

TAHUN 1955				
1156	Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1955 tentang Penyaluran Kredit Guna Pembangunan Perindustrian Dalam Sektor <i>Partikelir</i> .	15 Januari 1955	salinan	4 lembar
1157	Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1955 tentang Bank Negara Indonesia.	4 Februari 1955	salinan	10 lembar
1158	Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1955 tentang Penunjukan Pelabuhan Palembang Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti " <i>Indische Bedrijvenwet</i> " (Staatsblad 1927 No. 419).	18 Maret 1955	salinan	6 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1159	Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1955 tentang Larangan Untuk Mengumpulkan Uang Logam Yang Sah dan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-alat Pembayaran Yang Sah.	11 Maret 1955	salinan	6 lembar
1160	Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1955 tentang Mengadakan <i>Opsenten</i> Atas Cukai Bensin.	4 Mei 1955	asli	4 lembar
1161	Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1955 tentang Perubahan dan Tambahan Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 1953.	16 April 1955	salinan	2 lembar
1162	Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.	11 Mei 1955	salinan	1 sampul
1163	Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi.	16 Mei 1955	salinan	4 lembar
1164	Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing.	31 Mei 1955	salinan	5 lembar
1165	Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1955 tentang Pemungutan Sumbangan dari Pabrik-pabrik Rokok Bagi "Badan Usaha Tembakau" (<i>Krosok Centrale</i>).	6 Juni 1955	salinan	4 lembar
1166	Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Darurat Tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.	6 Juni 1955	asli	3 lembar
1167	Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1955 tentang Perubahan Pasal 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953 (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 42).	1 Juni 1955	salinan	4 lembar
1168	Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1955 tentang Pencabutan dan Penggantian Undang-Undang Nomor 14 tahun 1953 (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 44).	1 Juni 1955	salinan	7 lembar
1169	Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1955 tentang Penunjukan Bagian Pembikinan <i>Sera</i> dan <i>Vaksin</i> daripada <i>Lembaga Pasteur</i> di <i>Bandung</i> menjadi Perusahaan Negara dalam arti " <i>Indische Bedrijvenwet</i> " (Staatsblad 1927 No. 419).	6 Juni 1955	salinan	5 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1170	Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1955 tentang Menghentikan Berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1955 Tentang Mengadakan <i>Opsenten</i> Atas Cukai Bensin (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 24).	30 Agustus 1955	salinan	2 lembar
1171	Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi di Sumatera.	11 Agustus 1955	asli	7 lembar
1172	Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan-peraturan Daerah Yang Dimaksud Dalam Pasal 6 Undang-undang Pembentukan Daerah daerah Otonom di Jawa.	05 September 1955	salinan	3 lembar
1173	Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1955 tentang Perubahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.	13 September 1955	asli	2 lembar
1174	Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri.	10 Oktober 1955	asli	4 lembar
1175	Undang-Undang Darurat Nomor 20 tahun 1955 tentang Peraturan Sementara Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955.	31 Desember 1955	asli	5 lembar
TAHUN 1956				
1176	Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat.	1 Oktober 1956	asli	4 lembar
1177	Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1956 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1956.	4 Oktober 1956	salinan	3 lembar
1178	Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1956 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Konstituante.	8 Oktober 1956	salinan	8 lembar
1179	Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.	14 November 1956	salinan	7 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1180	Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.	14 November 1956	asli	7 lembar
1181	Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.	14 November 1956	salinan	1 sampul
1182	Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.	14 November 1956	salinan	9 lembar
1183	Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.	14 November 1956	salinan	8 lembar
1184	Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.	14 November 1956	salinan	1 sampul
TAHUN 1957				
1185	Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1957 tentang Perubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Yang Dimaksud Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan.	16 Januari 1957	salinan	2 lembar
1186	Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah Makassar dan Pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Djeneponto Takalar.	16 Januari 1957	salinan	1 sampul
1187	Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah Luwu dan Pembentukan Daerah Tana Toradja dan daerah Luwu.	16 Januari 1957	salinan	1 sampul
1188	Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah Bone dan Pembetulan Daerah Bone, Daerah Wadjo dan Daerah Soppeng.	16 Januari 1957	salinan	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1189	Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang Perubahan Kedudukan Wilayah Daerah-daerah <i>Enclave</i> Imogiri, Kota Gede dan Ngawen.	16 Januari 1957	salinan	3 lembar
1190	Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956.	30 Januari 1957	salinan	1 lembar
1191	Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1957 tentang Dewan Nasional.	6 Mei 1957	asli	4 lembar
1192	Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1957 tentang Penetapan Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapradja Jakarta Raya.	7 Mei 1957	asli	3 lembar
1193	Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1957 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan.	7 Mei 1957	asli	3 lembar
1194	Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.	7 Mei 1957	asli	4 lembar
1195	Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.	22 Mei 1967	salinan	1 sampul
1196	Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.	22 Mei 1967	salinan	8 lembar
1197	Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1957 tentang Menambah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 Tentang "Menetapkan Undang-Undang Darurat Tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-Undang Darurat Nomor 25 dan 34 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang Republik Indonesia.	22 Mei 1967	asli	1 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1198	Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1957 tentang Penetapan Untuk Membebaskan Bank Indonesia Dari Kewajiban Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 Selama Enam Bulan Setelah Berakhirnya Keputusan Dewan Moneter Tanggal 2 Februari 1957 Nomor 23 Yang Diadakan Berdasarkan Pasal 16 Ayat 3 Undang - Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 Lembaran Negara No. 40 Tahun 1953).	22 Mei 1967	asli	4 lembar
1199	Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1957 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Konstituante.	7 Mei 1957	asli	5 lembar
1200	Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1957 tentang Pajak Bangsa Asing.	1 Juli 1957	asli	1 sampul
1201	Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1957 tentang Kenaikan Tarif Cukai Atas Bir, Gula, <i>Saccharin</i> , dsb. Dan kenaikan Bea Masuk atas Bir.	1 Juli 1957	asli	5 lembar
1202	Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1957 tentang Bank Tani dan Nelayan.	10 Agustus 1957	asli	6 lembar
1203	Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.	9 Agustus 1957	asli	9 lembar
1204	Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat.	9 Agustus 1957	asli	2 lembar
1205	Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah.	9 Agustus 1957	asli	3 lembar
1206	Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Ke I Maluku.	10 Agustus 1957	asli	3 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1207	Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Ke II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku.	10 Agustus 1957	asli	4 lembar
1208	Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1957 tentang Mengubah Undang-Undang darurat Nomor 15 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 62).	10 Agustus 1957	asli	2 lembar
1209	Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1957 tentang Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat.	9 Agustus 1957	asli	4 lembar
1210	Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer	10 Agustus 1957	asli	1 sampul
1211	Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa.	10 Agustus 1957	asli	1 sampul
TAHUN 1959				
1212	Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1959 tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah.	14 Januari 1959	salinan	10 lembar
1213	Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Garuda.	16 April 1959	asli	7 lembar
1214	Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pengeluaran Pinjaman Obligasi Berhadiah Tahun 1959.	4 Juli 1959	salinan	6 lembar
1215	Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan.	26 Juni 1959	salinan	1 sampul
1216	Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia.	26 Juni 1959	asli	8 lembar
1217	Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera.	26 Juni 1959	salinan	7 lembar
1218	Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Makassar.	4 Juli 1959	salinan	3 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------



NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	-------------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	-----------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------



NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
C. PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG				
TAHUN 1959				
1219	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1959 tentang Bank Umum Negara.	10 Agustus 1959	asli	3 lembar
1220	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang Penurunan Nilai Uang Kertas Rp. 500,- dan Rp. 1.000,-.	24 Agustus 1959	asli	4 lembar
1221	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembekuan sebagian dari Simpanan pada Bank-bank.	24 Agustus 1959	asli	5 lembar
1222	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959 tentang Penghapusan Sistim Bukti Ekspor (B.E).	24 Agustus 1959	asli	4 lembar
1223	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 tentang Ketentuan di Bidang Fiskal mengenai Penurunan Nilai Uang Kertas Rp. 1.000,- dan Rp 500,-.	14 September 1959	asli	3 lembar
1224	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pembatasan Waktu untuk melaksanakan Hak Menuntut Penukaran Uang Kertas Bank Pecahan-pecahan Rp. 1.000,- dan Rp. 500,- yang dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 1959 Nilainya masing-masing telah diturunkan menjadi Rp. 100,- dan Rp. 50,-.	14 September 1959	asli	3 lembar
1225	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1959 tentang Perubahan Ordonansi Pajak Kekayaan.	26 September 1959	asli	3 lembar
1226	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 tentang Perubahan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.	26 September 1959	asli	3 lembar
1227	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1959 tentang Perubahan Tarif Pajak Radio.	26 September 1959	asli	2 lembar
1228	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Penambahan Bea Balik Nama.	26 September 1959	asli	2 lembar
1229	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi.	26 September 1959	asli	8 lembar
1230	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959 tentang Pajak Dividen.	26 September 1959	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1231	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1959 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (STBL 1925 No 319).	26 September 1959	asli	4 lembar
1232	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1959 tentang Kenaikan Cukai-Tembakau.	26 September 1959	asli	4 lembar
1233	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1959 tentang Kenaikan Tarif Cukai atas Bir dan Alkohol Sulingan dan Kenaikan Bea-Masuk atas Bir.	26 September 1959	asli	3 lembar
1234	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1959 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (STBL 1944 No 17).	26 September 1959	asli	1 sampul
1235	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1959 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Upah (STBL 1934 No 611).	26 September 1959	asli	3 lembar
1236	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1959 tentang Perubahan dan Tambahan Aturan Bea Materai 1921.	26 September 1959	asli	1 sampul
1237	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908.	26 September 1959	asli	6 lembar
1238	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1959 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951.	26 September 1959	asli	6 lembar
1239	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi.	16 November 1959	asli	3 lembar
1240	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959 tentang Perubahan Nama Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia menjadi Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia.	16 November 1959	asli	3 lembar
1241	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.	16 Desember 1959	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1242	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1959 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan-peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang : 1. No 7 Tahun 1959 (LN. 1959 No 100) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan; 2. No 12 Tahun 1959 (LN. 1959 No 103 tentang Penetapan Pemungutan Pajak Dividen; 3. No 13 Tahun 1959 (LN 1959 No 104 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan; 4. No 15 Tahun 1959 (LN 1959 No 108 tentang Kenaikan Tarif Cukai atas Bir dan Alkohol Sulingan dan Kenaikan Bea-Masuk atas Bir; 5. No 16 Tahun 1959 (LN 1959 No 109) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan; 6. No 17 Tahun 1959 (LN 1959 No 110) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Upah; 7. No 18 Tahun 1959 (LN 1959 No 111) tentang Perubahan dan Tambahan Aturan Bea Materai; 8. No 19 Tahun 1959 (LN 1959 No 112) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Rumah Tangga; 9. No 20 Tahun 1959 (LN 1959 No 113) tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan.	21 Desember 1959	asli	1 sampul
1243	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penilaian Persediaan Uang Emas dan Bahan Uang Emas pada Bank Indonesia.	21 Desember 1959	asli	2 lembar
1244	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang Pinjaman Konsolidasi Tahun 1959.	21 Desember 1959	asli	5 lembar
1245	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.	21 Desember 1959	asli	8 lembar
1246	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Dasar Perhitungan Malayan-Dollar untuk melakukan Tarif Pajak-pajak Negara di Daerah Kepulauan Riau.	21 Desember 1959	asli	2 lembar
1247	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Perubahan Masa Pemungutan Pajak Verponding dan Pajak Bangsa Asing.	21 Desember 1959	asli	3 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
TAHUN 1960				
1248	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Penambahan Undang-Undang Darurat No 7 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 No 27) yang di tambah dengan Undang-Undang Darurat No 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No 156) tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.	2 Februari 1960	asli	3 lembar
1249	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan.	2 Februari 1960	asli	4 lembar
1250	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960 tentang Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda.	9 Februari 1960	asli	4 lembar
1251	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Penghentian Berlakunya Undang-Undang No 17 Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 No 100).	19 Februari 1960	asli	3 lembar
1252	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja dari Republik Indonesia untuk Tahun 1960.	23 Maret 1960	asli	2 lembar
1253	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Penetapan Bagian-bagian Perusahaan Negara berdasarkan IBW dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun 1960.	23 Maret 1960	asli	3 lembar
1254	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1960 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang tentang Penetapan Anggaran Belanja dan Sumber-sumber Pendapatan Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1959.	23 Maret 1960	asli	5 lembar
1255	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang tentang Penetapan Anggaran Perusahaan-perusahaan I.B.W dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1959.	23 Maret 1960	asli	2 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1256	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1960 tentang Pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden, jika Presiden Mangkat, berhenti atau berhalangan, sedang Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan.	23 Maret 1960	asli	2 lembar
1257	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1960 tentang Perubahan Modal Bank Indonesia.	23 Maret 1960	asli	2 lembar
1258	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1960 tentang Pembubaran panitia untuk menyelesaikan urusan pemulihan hak.	31 Maret 1960	asli	2 lembar
1259	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Bank Dagang Negara.	02 April 1960	asli	8 lembar
1260	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1960 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 No 80) tentang Penghapusan Badan Hukum <i>Algemene Volkscredietbank</i> .	07 April 1960	asli	3 lembar
1261	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1958 No 138) tentang Penanaman Modal Asing.	07 April 1960	asli	3 lembar
1262	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	14 April 1960	asli	2 lembar
1263	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1960 tentang Perubahan Tarif - Upah untuk Balai Harta Peninggalan.	14 April 1960	asli	3 lembar
1264	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan-ketentuan Pidana Lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945.	14 April 1960	asli	3 lembar
1265	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.	30 April 1960	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1266	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan menurut Perundang-undangan mengenai Senjata Api.	13 Mei 1960	asli	3 lembar
1267	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia.	25 Mei 1960	asli	7 lembar
1268	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1960 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Peralihan yang tersebut pada Pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 23 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 139) tentang Keadaan Bahaya.	25 Mei 1960	asli	3 lembar
1269	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank.	9 Juni 1960	asli	4 lembar
1270	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak-Pidana Korupsi.	9 Juni 1960	asli	1 sampul
1271	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1960 tentang Perubahan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 (L.embaran Negara 1958 Nomor 43).	9 Juni 1960	asli	2 lembar
1272	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1960 tentang Perubahan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Darurat No 7 Tahun 1955, sebagaimana telah diubah ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No 1 Tahun 1960.	9 Juni 1960	asli	2 lembar
1273	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1960 tentang Uang Honorarium Juru Sumpah.	13 Juli 1960	asli	3 lembar
1274	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1960 tentang Ancaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan, penyerahan, penguasaan, kepunyaan persediaan atau dalam milik, penyimpanan, pengangkutan atau pembawaan barang logam DKA dengan tidak mempunyai surat izin.	12 Agustus 1960	asli	4 lembar
1275	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi.	12 Agustus 1960	asli	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1276	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1960 tentang Peleburan Bank Industri Negara ke dalam Bank Pembangunan Indonesia.	16 Agustus 1960	asli	3 lembar
1277	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 (LN 1959 No 43) tentang Pinjaman Obligasi Berhadiah Tahun 1959.	23 Agustus 1960	asli	3 lembar
1278	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1960 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah dalam Lalu Lintas Pembayaran Luar Negeri.	24 Agustus 1960	asli	6 lembar
1279	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambahan Tarif Bea Masuk, Bea Keluar, Bea Statistik, Bea Berat Barang dan Pajak Masuk (Pajak Penjualan).	24 Agustus 1960	asli	7 lembar
1280	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1960 tentang Pajak Transfer.	24 Agustus 1960	asli	3 lembar
1281	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1960 tentang Kredit dan Likwiditet Bank.	24 Agustus 1960	asli	3 lembar
1282	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Darurat No 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.	14 Oktober 1960	asli	3 lembar
1283	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan.	14 Oktober 1960	asli	1 sampul
1284	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman tanaman tertentu.	14 Oktober 1960	asli	6 lembar
1285	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1960 tentang Penyaluran Militer Wajib Darurat ke dalam rangka Wajib Militer.	15 Oktober 1960	asli	4 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1286	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambah Undang-Undang No 66 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No 117) tentang Wajib Militer.	15 Oktober 1960	asli	4 lembar
1287	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1960 tentang Bank Koperasi, Tani dan Nelayan.	26 Oktober 1960	asli	1 sampul
1288	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1960 tentang Peleburan Bank Rakyat Indonesia ke dalam Bank Koperasi, Tani dan Nelayan.	26 Oktober 1960	asli	4 lembar
1289	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1960 tentang Peleburan Perseroan Terbatas Bank Tani dan Nelayan ke dalam Bank Koperasi, Tani dan Nelayan.	26 Oktober 1960	asli	4 lembar
1290	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi .	26 Oktober 1960	asli	1 sampul
1291	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1960 tentang Pembentukan Dewan Perusahaan.	29 Oktober 1960	asli	5 lembar
1292	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1960 tentang Perubahan Nama dan Kedudukan Hukum serta Pindahan Tempat Kedudukan NV <i>Nederlandsch-Indische Aardolie Maatschappij</i> .	3 Desember 1960	asli	4 lembar
1293	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah.	13 Desember 1960	asli	5 lembar
1294	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing.	14 Desember 1960	asli	10 lembar
1295	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.	14 Desember 1960	asli	8 lembar
1296	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1960 tentang Larangan organisasi-organisasi dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan orang asing tertentu.	14 Desember 1960	asli	4 lembar
1297	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.	14 Desember 1960	asli	7 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1298	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1960 tentang Perubahan Pasal 43 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 23 Tahun 1959 (LN 1959 No 139) tentang Keadaan Bahaya.	29 Desember 1960	asli	3 lembar
1299	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambahan Pajak Dividen.	29 Desember 1960	asli	2 lembar
1300	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1960 tentang Penarikan kembali Ordonansi Pajak Upah (Stbl 1934 No 611) sebagaimana telah di ubah dan di tambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 24 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No 141).	29 Desember 1960	asli	3 lembar
1301	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1960 tentang Penyempurnaan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944.	29 Desember 1960	asli	1 sampul
1302	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.	29 Desember 1960	asli	1 sampul
TAHUN 1962				
1303	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pemanggilan dan Pengerahan semua Warga Negara dalam rangka Mobilisasi Umum untuk Kepentingan Keamanan dan Pertahanan Negara.	6 Februari 1962	asli	6 lembar
1304	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri.	12 Mei 1962	asli	3 lembar
1305	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1962 tentang Penerimaan dan Penggunaan Warga Negara Asing yang Dengan Sukarela Turut Serta Dalam Perjuangan Pembebasan Irian Barat.	6 Juni 1962	asli	5 lembar
1306	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1962 tentang Pengesahan Perjanjian Karya antara Perusahaan Negara Pertamina dan <i>Pan American Indonesia Oil Co</i> untuk diri sendiri dan atas nama <i>Pan American International Oil Corporation</i> .	18 Juni 1962	asli	4 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1307	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang No 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan.	30 Juni 1962	asli	5 lembar
1308	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan.	3 Agustus 1962	asli	4 lembar
1309	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1962 tentang Penggunaan dan Pengawasan atas Penggunaan Dana-dana Investasi.	3 Agustus 1962	asli	6 lembar
1310	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan.	3 Agustus 1962	asli	5 lembar
1311	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1962 tentang Pengendalian Harga.	3 Agustus 1962	asli	4 lembar
1312	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1962 tentang Pencabutan Undang-Undang Krisis Impor 1933.	3 Agustus 1962	asli	2 lembar
1313	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa atas Beberapa Jenis Barang.	3 Agustus 1962	asli	6 lembar
1314	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Ketentuan di bidang Fiskal mengenai Pembayaran Sumbangan Wajib Istimewa.	3 Agustus 1962	asli	2 lembar
1315	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 atas Kendaraan Bermotor.	3 Agustus 1962	asli	1 sampul
1316	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1962 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa atas Kendaraan Bermotor yang di Impor ke dalam Daerah Pabean Indonesia.	3 Agustus 1962	asli	4 lembar
1317	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penegasan dari Pasal 16 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27) tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.	3 Agustus 1962	asli	3 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1318	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1962 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 atas Bangunan.	24 September 1962	asli	8 lembar
1319	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1962 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No 21 Prp Tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 No 65).	23 November 1962	asli	3 lembar

TAHUN 1963				
1320	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1963 tentang Pelunasan Cukai Tembakau oleh Perusahaan-perusahaan Hasil Tembakau Tanpa Pita-pita Cukai dan Pengeluaran Hasil-hasil Tembakau dari Perusahaan-perusahaan itu ke dalam Peredaran Bebas Tanpa Pita Cukai.	2 Maret 1963	asli	3 lembar
1321	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1963 tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi di Bidang Pembeaan Impor dan Ekspor.	22 Mei 1963	asli	2 lembar
1322	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1963 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1959 dan Pencabutan Undang-Undang Nomor 32 Prp Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 34 Prp Tahun 1960 (LN Tahun 1959 Nomor 91, LN Tahun 1960 Nomor 92 dan LN Tahun 1960 Nomor 94).	22 Mei 1963	asli	2 lembar
1323	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 86).	22 Juni 1963	asli	3 lembar
1324	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1963 tentang Surat Hutang <i>Landreform</i> .	22 Juni 1963	asli	6 lembar
1325	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi.	15 Juni 1963	asli	8 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1326	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.	12 Oktober 1963	asli	1 sampul
1327	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1963 tentang Pemasukan Daerah Tingkat II Kepulauan Riau ke dalam Daerah Pabean Indonesia.	22 Oktober 1963	asli	5 lembar
1328	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1963 tentang Penangguhan Pelaksanaan Pemungutan Bea-bea dan Cukai-cukai di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau.	04 November 1963	asli	2 lembar

TAHUN 1964				
1329	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 154) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 65).	6 Januari 1964	asli	6 lembar
1330	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara.	13 Februari 1964	asli	8 lembar
1331	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.	13 Februari 1964	asli	7 lembar

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1332	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.	13 Februari 1964	asli	7 lembar
1333	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Nilai Transaksi Rupiah dan Pembebanan atas Impor.	27 Maret 1964	asli	1 sampul
1334	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.	2 Mei 1964	asli	8 lembar
1335	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 s/d 6 Tahun 1964.	6 Januari - 2 Mei 1964	tembusan	1 jilid
TAHUN 1965				
1336	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Perubahan/Penambahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 109).	13 November 1965	asli	3 lembar
1337	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Kebijakanaksanaan Penerimaan Negara Tahun 1966.	31 Desember 1965	asli	1 sampul
TAHUN 1969				
1338	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara.	07 April 1969	asli	9 lembar
TAHUN 1971				
1339	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.			
1339 A	Naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	30 Juli 1971	asli	7 lembar
1339 B	Berkas Penyusunan	10 Mei - 2 September 1971	tembusan, copy	1 sampul
1340	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma.			
1340 A	Naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	5 Oktober 1971	asli	1 sampul
1340 B	Berkas Penyusunan	13 September - 8 Oktober 1971	tembusan, copy	1 sampul
TAHUN 1984				

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
1341	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.			
1341 A	Naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	16 Juni 1984	asli	7 lembar
1341 B	Berkas Penyusunan	19 - 22 Juni 1984	tembusan, copy	1 sampul
TAHUN 1992				
1342	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penanggulangan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.			
1342 A	Naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	11 Agustus 1992	asli	1 sampul
1342 B	Berkas Penyusunan	20 Januari - 27 September 1992	tembusan	1 sampul
TAHUN 1997				
1343	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan			
1343 A	Naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	31 Desember 1997	asli	5 lembar
1343 B	Berkas Penyusunan	2 Januari 1997 - 14 Januari 1998	tembusan, copy	1 sampul
TAHUN 1998				
1344	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan.			
1344 A	Naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	22 April 1998	asli	1 sampul
1344 B	Berkas Penyusunan	21 April - 23 April 1998	tembusan	1 sampul
1345	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.			
1345 A	Naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	24 Juli 1998	asli	1 sampul
1345 B	Berkas Penyusunan	23 Juli - 28 September 1998	tembusan	1 sampul
1346	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.			
1346 A	Naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	28 September 1998	asli	6 lembar
1346 B	Berkas Penyusunan	13 Agustus - 16 Oktober 1998	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
TAHUN 1999				
1347	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.			
1347 A	Naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	08 Oktober 1999	asli	1 sampul
1347 B	Berkas Penyusunan	8 - 11 Oktober 1999	tembusan	1 sampul
TAHUN 2000				
1348	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.			
1348 A	Naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	01 September 2000	asli	1 sampul
1348 B	Berkas Penyusunan	8 Agustus - 1 September 2000	tembusan, copy	1 sampul
1349	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.			
1349 A	Naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	01 September 2000	asli	1 sampul
1349 B	Berkas Penyusunan	01 September 2000	tembusan	1 sampul
1350	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.			
1350 A	Naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	25 September 2000	asli	6 lembar
1350 B	Berkas Penyusunan	28 Agustus - 26 September 2000	tembusan, copy	1 sampul
TAHUN 2002				
1351	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.			
1351 A	Naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	18 Oktober 2002	asli	1 sampul
1351 B	Berkas Penyusunan	5 Maret - 18 Oktober 2002	tembusan, copy	1 sampul
1352	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002.			
1352 A	Naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	18 Oktober 2002	asli	6 lembar
1352 B	Berkas Penyusunan	18 Oktober 2002	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
TAHUN 2004				
1353	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.			
1353 A	Naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	11 Maret 2004	asli	6 lembar
1353 B	Berkas Penyusunan	16 Februari - 20 April 2004	tembusan, copy	1 sampul
1354	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.			
1354 A	Naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	02 April 2004	asli	10 lembar
1354 B	Berkas Penyusunan	26 Maret - 26 Juli 2004	tembusan	1 sampul

TAHUN 2005				
1355	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.			
1355 A	Naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	13 Januari 2005	asli	7 lembar
1355 B	Berkas Penyusunan	10 Desember 2004 - 14 Januari 2005	tembusan, copy	1 sampul

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------



NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	-------------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
--------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------



NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	-------------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

NOMOR	ISI INFORMASI	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH
-------	---------------	-------------	----------------------	--------

